

Dr. H. A. Rusdiana, MM.
Drs. Nasihudin, M.Pd.

KESIAPAN PTKIS

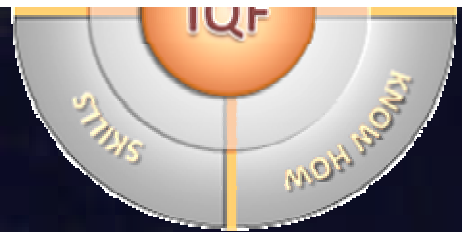
DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendaping Ijazah



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SGD BANDUNG
2018**

KESIAPAN PTKIS

DALAM MENUNGGU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH



Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kesiapan PTKIS setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan PTKIS Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, untuk mengetahui apakah PTKIS telah memahami konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya dalam rangka pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengantahapan-tahapan, yaitu: menggunakan petunjuk umum wawancara dan model wawancara baku terbuka, dan mengambil lokasi di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Fokus penelitian ini adalah kesiapan PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sumber data penelitian ini adalah Perangkat PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten belum melaksanakan konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah secara penuh karena hal itu belum dilaksanakan oleh PKIS secara maksimal dan optimal sehingga dalam implementasinya pun belum mencapai hasil yang optimal, konsep tersebut perlu didukung oleh lima aspek yang menjadi indikator kesiapan Institusi PTKIS yaitu: (1) aspek kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, (2) aspek desain organisasi yang berimplikasi terhadap profesionalisme kerja, (3) aspek daftar kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan program, (4) aspek kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang pelaksanaan program, (5) aspek perencanaan biaya yang matang minimal. Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, belum siap dan belum mendukung, dikarenakan masih rendahnya kemampuan SDM dalam hal pengelolaan program, sebagai kendala untuk mencapai hasil yang optimal dan maksimal dalam rangka pelaksanaan Lima aspek yang menjadi indikator pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, walupun disisi lain etos kerja aparatur/pelaksana sangat tinggi. Agar aparatur PTKIS siap dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, maka penelitian ini merekomendasikan agar setiap PTKIS membuat rincian kewenangan dan melaksanakan yang wajib untuk dilaksanakan, setiap perangkat PTKIS bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang berpedoman pada desain organisasi yang ada, setiap perangkat menyusun daftar kebutuhan dalam pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program sesuai dengan proporsi dana yang tersedia, dan setiap perangkat hendaknya menyusun perencanaan biaya atau estimasi biaya secara matang sebelum membuat dan melaksanakan program.

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SGD BANDUNG
2018**



Dr. H. A. Rusdiana, MM.
Drs. Nasihudin, M.Pd.

KESIAPAN PTKIS

DALAM Mendukung IMPLANTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN PENDAPING IJAZAH

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SGD BANDUNG
2018

KESIAPAN PTKIS

ILUSTRASI RESEARCH BY ETIM KONGRA



Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesiapan PTKIS setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan PTKIS Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, untuk mengetahui apakah PTKIS telah memahami konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya dalam rangka pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu: mengidentifikasi penajik usulan wawancara dan model wawancara bentuk terbuka, dan mengambil lokasi di 24 PTKIS Kopemas Wilayah II Jabar-Banten. Fokus penelitian ini adalah kesiapan PTKIS Kopemas Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sumber data penelitian ini adalah Penangku PTKIS Kopemas Wilayah II Jabar-Banten. Dalam penelitian ini teknik pemrosesan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTKIS Kopemas Wilayah II Jabar-Banten belum melaksanakan konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah secara penuh karena hal ini belum dilaksanakan oleh PTKIS secara maksimal dan optimal sehingga dalam implementasinya pun belum mencapai hasil yang optimal, konsep tersebut perlu didukung oleh lima aspek yang menjadi indikator kesiapan manusia PTKIS yaitu: (1) aspek kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, (2) aspek desain organisasi yang berimplikasi terhadap profesionalisme kerja, (3) aspek faktor kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan program, (4) aspek kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang pelaksanaan program, (5) aspek perencanaan biaya yang sangat signifikan. Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai bawahan PTKIS Kopemas Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, belum siap dan belum mendukung, dikarenakan masih rendahnya kemampuan SDM dalam hal pengelolaan program, sebagai kendala untuk mencapai hasil yang optimal dan maksimal dalam rangka pelaksanaan lima aspek yang menjadi indikator pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, walaupun dasar dan cara kerja operasional pelaksanaan sangat tinggi. Agar optimal PTKIS siap dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, maka penelitian ini merekomendasikan agar setiap PTKIS sebagai **UNIT** kewenangan dan melaksanakan yang wajib untuk dilaksanakan, setiap penangku PTKIS bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang berpedoman pada desain organisasi yang ada, setiap penangku menyesuaikan dalam pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program sesuai dengan prosedur dan yang tersedia, dan setiap penangku hendaknya menyesuaikan perencanaan biaya saat estimasi biaya secara matang sebelum memulai dan melaksanakan program.

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SGD BANDUNG
2018



Dr. H. A. Rusdiana, MM
Drs. Nasihudin, M.Pd.

KESIAPAN PTKIS

**DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SGD BANDUNG 2018**

KESIAPAN PTKIS

**DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan
SURAT KETERANGAN Pendamping Ijazah**

ISBN: 978 – 602 – 5823 – 04 – 6

Cetakan Pertama, Agustus 2018

16 cm x 24 cm 316 hlm +(i – xii)

Penulis:

Dr. H. A. Rusdiana, MM

Drs. Nasihudin, M.Pd.

Editor:

Mr. Muhardi, Ss., M.Pd.

Desain *Cover* dan Tata letak:

M. Zaky Nurzaman

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Dan Penerbitan

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th. 2002

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa seizin penerbit.



Kata Pengantar

Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dari segi regulasi, karena UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada kenyataannya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya pada perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten belum mendukung secara optimal, baik dalam aspek penafsiran kebijakan SKPI, secara normatif maupun pengorganisasian Kebijakan SKPI; strategi operasional penerapan SKPI, dan menanggulangi faktor-faktor kesiapan dalam mendukung kebijakan SKPI.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Jawa Barat dan Banten dari jumlah 117 tahun 2017-2018 sebagian besar penyelenggaranya adalah berbasis Yayasan Pendidikan Islam atau pesantren. Pimpinan PTKIS umumnya belum tentu berbasis keilmuan tentang kurikulum baik magister atau program doktor. Terlepas dari basis keilmuan atau keahlian personal pimpinan, peranpimpinan dalam optimalisasi kurikulum pada sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah kepastian.

Hasil Penelitian tentang Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI, yang dilaksanakan oleh Rusdiana dan Nasihudin pada dua puluh empat PTKIS: Studi PAI di Wilayah II Jawa Barat dan Banten berhasil mengidentifikasi aspek-aspek peran yang masih memerlukan pembenahan agar penerapan SKPI berjalan optimal. Peran dalam makna ilmu sosial sebagai “sekumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada individu dan lembaga sesuai dengan statusnya sebagai penyalenggara PT”. Aspek-aspek hasil penelitian tersebut menjadi penting terkait dua hal: *pertama*: aspek-aspek yang masih menjadi kendala optimalnya peran individu dan lembaga; *kedua*: isyarat yang harus menjadi kesadaran bersama mengenai solusi penerapannya.

Sesederhana apapun penelitian yang telah dilakukan, dan sekecil apapun sampelnya, Hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang sangat bermakna untuk dua hal tersebut. Kesadaran dan inspirasi untuk solusi adalah bagian dari rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Semoga.

Bandung, 17 Agustus 2018
An. Tim Pembimbing,

Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag.



Pengantar Penulis

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka Kemenag RI, meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Persoalannya adalah mengapa PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Atas dasar itu, kami meneliti "Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di duapuluhempat PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi; penafsiran kebijakan SKPI, pengorganisasian Kebijakan SKPI; strategi operasional penerapan SKPI, dan faktor-faktor kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan SKPI.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap model kesiapan implementasi kebijakan penerapan SKPI di PTKIS, khususnya pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

Bandung, 17 Agustus 2018
Tim Penulis,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Pembimbing Ahli.....	i
Pengantar Penulis	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	9
1. Identifikasi Permasalahan.....	9
2. Batasan Permasalahan	10
B. Tujuan Penelitian	11
1. Tujuan Umum	11
2. Tujuan Khusus.....	11
C. Signifikansi Penelitian.....	11
1. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan.....	11
2. Kegunaan bagi institusi.....	12
3. Kegunaan bagi masyarakat	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Kesiapan.....	13
1. Definisi Kesiapan	13
2. Prinsip, dan Aspek Kesiapan	13
3. Makna, Ciri, dan Faktor Kesiapan kerja	15
4. Esensi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI	20
B. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	23
2. Operasi Penyiapan Implementasi Kebijakan	24
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi	25
4. Variabel yang memengaruhi Implementasi Kebijakan	28

C. Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI	29
1. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi.....	29
2. Kebijakan PT dalam menghadapi Era Persaingan	30
3. Kebijakan Penerapan SKPI: memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan Tinggi.....	31
4. Mempersiapkan Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI.....	36
D. Penelitian terdahulu yang Relevan	40
1. Penelitian Yusuf Bachtiar Tahun 2001	41
2. Penelitian DIKTI Tahun 2006	42
3. Penelitian DIKTI Tahun 2014	42
4. Penelitian Wawan dan Imas Masitoh Tahun 2015	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain, Metode, Sumber dan Subjek Penelitian	45
1. Desain penelitian.....	45
2. Metode penelitian	46
3. Sumber Data Penelitian.....	49
4. Subjek Data Penelitian.....	49
B. Prosedur Penelitian	51
1. Persiapan Penelitian	52
2. Pelaksanaan Penelitian.....	53
3. Tahap Pembahasan, pengolahan hasil, dan Pengambilan Kesimpulan	53
C. Teknik/Cara Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara.....	53
2. Observasi.....	56
3. Dokumentasi.....	56
D. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data.....	56
1. Metode Analisis Data	58
2. Tahapan Analisis Data	59
3. Penarikan kesimpulan.....	63
4. Pengujian Keabsahan Data	65
5. Teknik Keabsahan Data.....	67
6. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	71
1. Profil Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten	71
2. Profil 24 PTKIS Kop. Wilayah II Jawa Barat dan Banten	72
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	90
1. Data Informasi Penelitian	90
2. Temuan Penelitian	170
C. Pembahasan	271
1. Analisis Data Kesiapan 24 PTKIS dalam Mendukung Kebijakan SKPI.....	271
2. Interpretasi Data Temuan Penelitian	280
3. Analisis Dampak Ketidaksiapan PTKIS dalam Mendukung penerapan Implementasi Kebijakan SKPI.....	287
4. Langkah Antisipatif Penyiapan Implementasi Kebijakan	296
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	305
B. Implikasi	306
C. Rekomendasi	309
DAFTAR PUSTAKA	311
PROFIL PENULIS	315



DAFTAR TABEL

Tabel	hlm
3.1.01 PTKIS sebagai Sampel Penelitian.....	50
3.1.02. Kisi-kisi Penelitian.....	57
4.1.01 Data Potensi PTKIS Tahun 2018.....	72
4.1.02 Lokasi PTKIS Objek Penelitian.....	73
4.2.01 Profil FAI UNMA Tahun 2017/2018	75
4.2.02 Profil IAIB Tahun 2017/2018.....	75
4.2.03 Profil STAI LaTansa Mashiro Th. Ak. 2017/2018	76
4.2.04 Profil STAI Fatahillah Tahun 2017/2018.....	77
4. 2.05 Profil STAI Al-Karimiyah Tahun 2017/2018.....	78
4. 2.06 Profil FPSI-UNID Tahun Akademik 2017/2018	78
4. 2.07 Profil IAIN Laa Roiba Bogor Tahun 2017/2018.....	79
4. 2.08 Profil STAI Kharisma Tahun 2017/2018	80
4. 2.09 Profil STAI Sukabumi Tahun 2017/2018	80
4. 2.10 Profil STIT Nurul Hikmah Tahun 2017/2018	81
4. 2.11 Profil STAI Haji Agus Salim Tahun 2017/2018	82
4. 2.12 Profil STAI As Shiddiqiyah Tahun 2017/2018.....	82
4. 2.13 Profil STAI KH. EZ. Muttaqien Tahun 2017/2018	83
4. 2.14 Profil STAI Riyadhul Jannah Tahun 2017/2018	84
4. 2.15 Profil STAIS Dharma Kusuma Tahun 2017/2018.....	84
4. 2.16 Profil STAI Cirebon Tahun 2017/2018	85
4. 2.17 Profil FKI UNSIA, Tahun 2017/2018.....	86
4. 2.18 Profil STAI Putra Galuh Tahun 2017/2018.....	86
4. 2.19 Profil STAIMA Tahun 2017/2018	87
4. 2.20 Profil STAINU Tasikmalaya Tahun 2017/2018	88
4. 2.21 Profil IAIC Cipasung Tahun 2017/2018	88
4. 2.22 Profil STAI Siliwangi Garut Tahun 2017/2018	89
4. 2.23 Profil STAI Al-Falah Tahun 2017/2018.....	90
4. 2.24 Profil STAI Siliwangi Cimahi Tahun 2017/2018.....	90

Tabel	hlm
4.3.1 Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI	243
4.3.2 Rekapitulasi Temuan Aspek: Penafsiran Kebijakan SKPI Berdasarkan Multi Situs	248
4.3.3 Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Pengorganisasian Kebijakan SKPI	249
4.3.4 Rekapitulasi Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Pengorganisasian	257
4.3.5 Temuan Berdasarkan Multi Situs dari Aspek Strategi Operasi Kebijakan.....	258
4.3.6 Rekapitulasi Nilai Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Strategi Operasi Kebijakan	264
4.3.7 Temuan Berdasarkan Multi Situs. Pada Aspek Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan SKPI	265
4.3.8 Rekapitulasi Nilai Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan	269
4.3.9 Temuan Berdasarkan Multi Situs dan Multi Kasus	270



DAFTAR GAMBAR

Gambar	hlm
2.1.01 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Edward III..	29
2.1.02. Diagram Persentase Keberhasilan Kebijakan.....	38
3.1.01. Proses analisis data Model Miles and Huberman	59
4.1.01. Peta Propinsi Jawa Barat dan Banten	71
4.2.01. Temuan data tunggal di FAI UNMA	172
4.2.02 Temuan data tunggal di IAIB Serang.....	175
4.2.03 Temuan data tunggal di STAI Latansa Mashiro.....	178
4.2.04 Temuan data tunggal di STAI Fatahilah	181
4.2.05 Temuan data tunggal di STAI Kharisma.....	184
4.2.06 Temuan data tunggal di FPSI-UNIDA.....	187
4.2.07 Temuan data tunggal di IAIN Laroiba	190
4.2.08 Temuan data tunggal di STAI Kharisma.....	193
4.2.09 Temuan data tunggal di STAI Sukabumi	196
4.2.10 Temuan data tunggal di STAI Nurul Hikmah.....	199
4.2.11 Temuan data tunggal di STAI K. H. Agus Salim.....	202
4.2.12 Temuan data tunggal di As Sidiqiyah	205
4.2.13 Temuan data tunggal di STAI KH. E.Z. Muttaqin	208
4.2.14 Temuan data tunggal di STAI Riyadul Jannah.....	211
4.2.15 Temuan data tunggal di STAIS Dharma.....	214
4.2.16 Temuan data tunggal di STAIC Cirebon	217
4.2.17 Temuan data tunggal di FKIS UNSIA Kuningan.....	220
4.2.18 Temuan data tunggal di STAI Putra Galuh Ciamis	223
4.2.19 Temuan data tunggal di STAIMA Banjar	226
4.2.20 Temuan data tunggal di STANU Tasikmalaya.....	229
4.2.21 Temuan data tunggal di IAIC Tasikmalaya	232
4.2.22 Temuan data tunggal di STAI Siliwangi Garut	233
4.2.23 Temuan data tunggal di STAI Al-Falah Cicalengka	235
4.2.24 Temuan data tunggal di STAI Siliwagi Cimahi.....	242

Gambar	hlm
4.3.1 Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI	243
4.3.2 Rekapitulasi Temuan Aspek: Penafsiran Kebijakan SKPI” Berdasarkan Multi Situs	249
4.3.3 Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Pengorganisasian Kebijakan SKPI	250
4.3.4 Rekapitulasi Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Pengorganisasian Kebijakan SKPI	258
4.3.5 Temuan Berdasarkan Multi Situs dari Aspek Strategi Operasi Kebijakan SKPI.....	259
4.3.6 Rekapitulasi Nilai Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Strategi Operasi Kebijakan SKPI.....	265
4.3.7. Temuan Berdasarkan Multi Situs. Pada Aspek Faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan SKPI	266
4.3.8. Rekapitulasi Nilai Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan SKPI.....	270
4.3.9. Temuan Berdasarkan Multi Situs dan Multi Kasus	271
4.41 Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI (Asp-1).....	273
4.4.2 Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI (Asp-1).....	275
4.4.3 Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Strategi Penerapan Kebijakan SKPI (Asp-3)	277
4.4.4 Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Kendala dalam Kebijakan SKPI (Asp-4).....	279
4.51 Intrepretasi dari kinerja Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI (Asp-1).....	281
4.5.2. Intrepretasi dari kinerja Pengorganisasian kebijakan SKPI, (Asp-2).....	282
4.5.3 Perencanaan strategi operasi kebijakan SKPI	283
4.5.4 Kendala yang dihadapi dalam Kesiapan Implementasi kebijakan SKPI (Asp-4).....	284
4.6.1 Data Capain kumulasi (Asp-1-4) Kesiapan Implementasi kebijakan SKPI.....	285
4.6.2 Grafik Perbandingan tingkat kesulitan menangani Kasus kesiapan penerapan SKPI	286



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan struktur ketenagakerjaan di era global memerlukan kualitas SDM yang handal. Kualitas yang dimaksud adalah SDM yang mempunyai daya saing secara terbuka dengan negara lain, adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan dan kondisi baru, terbuka terhadap perubahan, mampu belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*), *multi-skilling*, mudah dilatih ulang, serta memiliki dasar-dasar kemampuan luas, kuat, dan mendasar untuk berkembang di masa yang akan datang.

Dalam masa perubahan yang begitu cepat dalam berbagai aspek kehidupan diperlukan seseorang yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bekerja saja namun juga memiliki daya suai terhadap berbagai perubahan, karena secara umum dunia kerja di masa datang akan ditandai oleh ketidakpastian, semakin cepat dan sering berubah, dan menuntut fleksibilitas yang lebih besar (Sukamto, 2001:15). Perubahan ini secara mendasar tidak hanya menuntut angkatan kerja yang memiliki kemampuan dasar yang semakin kuat, tetapi juga menuntut kemampuan mendemonstrasikan penguasaan kognitif yang lebih tinggi, disamping kemampuan memecahkan masalah dan ketrampilan sosial untuk berinteraksi dan bekerjasama.

Selain ciri-ciri di atas, kualifikasi SDM yang dibutuhkan telah berkembang dan bertambah dalam bentuk kemampuan komunikasi, interpersonal, kepemimpinan, *teamworking*, analisis, *academic discipline*, *IT/computing*, fleksibilitas, dapat bekerja secara lintas kultural, memahami globalisasi, terlatih dan memiliki etika, dan kemampuan bahasa asing (Pardjono, dkk, 2003). Senada dengan hal tersebut Masrun (Mukhadis, 2004) menyatakan beberapa karakteristik sumberdaya manusia yang

dibutuhkan di era pengetahuan yaitu memiliki (a) kemampuan mengembangkan diri dan berorientasi ke depan; (b) ketaatan pada nilai-nilai moral dan keagamaan; (c) sikap sosial dalam melaksanakan hubungan antarmanusia; (d) intuisi persatuan dan kesatuan kebangsaan; (e) efisiensi waktu, tenaga, dan biaya; (f) kepekaan dan kemandirian; dan (g) kemampuan pengendalian diri.

Pada saat ini, minat, kebutuhan dan apresiasi terhadap pendidikan tinggi semakin meningkat dan berkembang. Hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya peminat masyarakat mendirikan pendidikan tinggi dan minat calon peserta didik masuk perguruan tinggi di tingkat diploma, sarjana maupun tingkat pascasarjana. Hal ini juga dialami oleh Pendidikan tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dari tahun ke tahun PTKIS terus bertambah dan jumlah mahasiswa semakin meningkat. Oleh karena itu, PTKIS sebagai institusi pendidikan tinggi telah menyiapkan diri untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Disisi lain, perkembangan masyarakat dan dunia kerja pada era global menuntut sumber daya manusia yang makin kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dalam bidang *hard skills* maupun *soft skills*. Dalam proses pembelajaran, Pendidikan tinggi perlu mendorong mahasiswa se-optimal mungkin untuk menggali pengalaman dari kegiatan kemahasiswaan agar memiliki nilai lebih. Untuk itu, Pendidikan tinggi perlu menghargai setiap ekstrakurikuler dan nonkurikuler dalam bentuk pemberian satuan kredit prestasi, seperti halnya pemberian satuan kredit semester pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.

Seiring dengan adanya tantangan global yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan global, pada tahun 2015 Indonesia akan memasuki *ASEAN Economic Community* (AEC). Dengan adanya AEC maka akan diberlakukan *system single market* di wilayah ASEAN. Dalam arti, pada tahun 2015 akan terjadi relasi terbuka untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi,

modal dan tenaga kerja diantara negara ASEAN. Hal ini perlu disikapi demi eksistensi Pendidikan Tinggi, dengan terus meningkatkan reputasi institusi dan daya kompetisi yang berorientasi pada kualitas lulusan, sekaligus memperkuat jaringan kerja sama.

Dengan adanya AEC maka Pendidikan tinggi, perlu menyiapkan informasi lulusan yang bermutu dan berdaya guna. Salah satu informasi untuk memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi termasuk PTKIS, adalah dengan diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud merupakan turunan **Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), menerbitkan sertifikat

kompetensi keguruan PAI, begitu juga Jurusan MPI dan yang lainnya, bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran. Demikian juga Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), harus menerbitkan sertifikat kompetensi alumni sebagai hakim, pengacara, atau kompetensi lain yang sesuai dengan keahlian sekaligus bisa digunakan alumninya untuk memasuki pasar kerja.

Persoalannya adalah bagaimana dengan fakultas-fakultas yang seluruh program studinya mengelola program keilmuan dan tidak pernah mengembangkan program pendidikan keahlian untuk memasuki pasar kerja? Sebab karakter keilmuan yang mereka kembangkan adalah ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk bekerja. Sebut saya misalnya program studi Aqidah Filsafat, al-Qur'ân dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain. Sementara, hampir 60% ilmu yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan [Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama](#) adalah ilmu-ilmu keagamaan yang tidak disertai dengan keterampilan kerja karena karakter keilmuannya. Oleh sebab itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: "...Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya" (Permendikbud 81/2014). Maka, mengacu pada Permendikbud ini, seorang mahasiswa/sarjana bidang al-Qur'ân dan Tafsir, misalnya, bisa memiliki sertifikat kompetensi melalui pelatihan yang diperoleh selama belajar dan belum dinyatakan lulus dari program studinya.

Kebijakan ini, diberlakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengamanatkan agar lulusan pendidikan tinggi pada level enam (Sarjana dan Diploma IV) harus mampu: "..Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi"(Permendikbud 81/2014).

Pernyataan KKNi ini, hendak menegaskan bahwa lulusan sarjana atau diploma IV harus mampu menjadi wirausahawan atau bekerja pada suatu lembaga. Apakah sebagai wirausahawan maupun bekerja di perusahaan, korporasi, atau jasa yang dimiliki oleh perseroan orang lain, dia harus memiliki kreatifitas dan inovasi untuk memajukan usaha tersebut, atau setidaknya mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga di mana dia bekerja sebagai profesional di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap sarjana harus memiliki *basic skill* yang bisa mengantarkannya menjadi profesional, baik untuk menjadi wirausahawan maupun bergabung dalam usaha orang lain. Bukan masalah bila *skill* tersebut relevan atau tidak dengan program studi tempatnya belajar, karena kurikulum pendidikan tinggi selalu menyiapkan maksimal 20% pendidikan kompetensi di luar kompetensi utama dan pendukung dari program studi.

Seluruh keterampilan yang beragam, baik *inherent* dengan program studi maupun tidak, harus dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani pejabat berwenang, dan diberikan pada para mahasiswa di samping ijazah dan transkrip. Bahkan jika ada sertifikat kompetensi yang mereka peroleh dari luar institusi, yang sifatnya keterampilan atau keahlian, selama diperlukan pasar kerja serta diperoleh kuliah, juga harus diakui dan ditulis dalam dokumen resmi tersebut. Itulah yang disebut SKPI. Ia menjadi lampiran sekaligus pendamping ijazah yang harus diberikan pada seluruh sarjana pendidikan akademik, vokasi, profesi maupun spesialis.(PP no 4 Th. 2014). SKPI memuat penjelasan berbagai kompetensi yang dimiliki mahasiswa/sarjana, terlepas apakah relevan atau tidak dengan program studinya, diperoleh melalui pelatihan dalam institusi atau di luar institusi, atau melalui festival dan kompetisi yang semuanya diperoleh dalam masa studi mereka. Dengan demikian, institusi yang akan menerimanya sebagai pegawai, memiliki persepsi yang benar tentang calon pegawai yang direkrutnya, dan para sarjananya pun terbantu dengan penjelasan tersebut, sehingga proses dedikasi keilmuan, keterampilan, dan keahlian dalam menunjang pengembangan karir profesional serta partisipasi mereka dalam proses pemajuan bangsa akan semakin cepat dan nyata.

Terkait hal itu, Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa SKPI harus ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris” (Permendikbud 81/2014). Penggunaan dua bahasa didasarkan pertimbangan bahwa para sarjana yang akan memasuki pasar kerja saat ini memiliki kesempatan sangat luas dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Diketahui, implementasi MEA memungkinkan meluasnya pasar kerja di seluruh negara ASEAN. Sesuai kesepakatan Bali Concord II tahun 2003 diputuskan bahwa mulai tahun 2015 berlaku *free flow of service* (aliran layanan gratis), di seluruh negara ASEAN bagi seluruh warga negara-negara di kawasan ini. (ASEAN Economic Community Blueprint, 2008: 10). Dengan demikian, sarjana yang ada di posisi level enam KKNI, yang merupakan calon wirausahawan dan tenaga profesional, harus diakseskan pada lapangan kerja dengan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang melahirkannya, baik untuk pasar kerja di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk menghadapi era persaingan tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia “termasuk pendidikan tinggi keagamaan” harus mempersiapkan tiga aspek yang sangat strategis. Ketiganya yaitu perbaikan kurikulum dan program pendidikan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua untuk komunikasi tingkat regional, dan menyiapkan para mahasiswa sebagai profesional muda yang memiliki budaya kerja baik (Dede Rosyada 2014:7). Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya.

Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu *skill* khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka

kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka seluruh perguruan tinggi “termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam Swasta yang mengelola program studi keagamaan dan sebahagian besar tidak diorientasikan pada pasar kerja” harus memberikan perhatian serius dengan mengembangkan program-program pelatihan dan workshop bagi para mahasiswa, khususnya untuk keterampilan dan keahlian alternatif di luar keahlian program studi, bersertifikat dan dapat dideskripsikan dalam SKPI, sehingga bisa dijadikan informasi penting untuk memasuki pasar kerja. Rancangan baru pendidikan tinggi tersebut sebagai sebuah gerakan inovatif untuk mengakses seluruh sarjana Strata I atau diploma IV pada pada pasar kerja yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN. Itulah barangkali yang menjadi kesulitan bagi PTKI.

Terkait dengan itu, dalam merespon kebijakan pemerintah tersebut, Kemenag RI, meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Akan tetapi sebagian besar PTKI, khususnya PTKIS, sampai saat ini belum banyak yang merespon kebijakan itu. Padahal hal itu sudah melekat kewajibannya pada Tupoksi PT, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Tridharma PT.

Dalam menyikapi kebijakan, termasuk menyikapi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tangkilisan (2003: 18), memberikan pandangannya ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam mempersiapkan untuk implementasi keputusan/kebijakan yaitu dimulai dari: (a) penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; (b) pengorganisasian yaitu merupakan unit

atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; (c) strategi penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa organisasi dapat dilihat sebagai aktor atau badan-badan yang berperan dalam pelaksanaan suatu program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi. Penafsiran terhadap rencana program ke dalam proses implementasi hanya dilakukan oleh organisasi/birokrasi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program.

Bertitik tolak dari latar belakang kondisi dan permasalahan di atas, tampaknya bertumpu pada persoalan implementasi kebijakan SKPI di PTKIS, tampaknya sulit untuk dapat diimplementasikan dengan alasan, sebagaimana dikemukakan Edwar III (Widodo, 2011:9), yaitu: (1) salah satu tahapan yang paling krusial dari kebijakan adalah tahap implementasi; (2) implementasi kebijakan selalu ditandai oleh adanya kesenjangan antara isi kebijakan dengan konteks kebijakan; dan (3) perlu dicarikan faktor-faktor kritis yang dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Menurutya efektivitas implementasi kebijakan hanya akan dicapai apabila faktor-faktor kritis dari implementasi kebijakan dapat diatasi dan dijadikan solusi. Faktor-faktor kritis tersebut menurut George Edward III, mencakup empat variabel penentu kebijakan publik yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap, dan (4) struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif (Widodo, 2011:10).

Persoalan kemudian mengapa PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Atas dasar itu, kami bermaksud meneliti "*Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di duapuluhempat PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten*" Dengan tujuan untuk mengidentifikasi; penafsiran kebijakan SKPI, pengorganisasian Kebijakan SKPI; strategi operasional penerapan SKPI, faktor-faktor kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan SKPI.

Hal itu menjadi penting, dengan terjawabnya permasalahan tersebut akan sangat membantu bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada umumnya, dan khususnya pada PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang akuntabel, agar dapat memberikan kepuasan kepada *customers* dan *stakeholders*.

B. Perumusan masalah

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data, maka terlebih dahulu merumuskan permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah yaitu, “Bagaimana kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI”.

1. Identifikasi Permasalahan

Berawal dari deskripsi latar belakang masalah di atas, beragam fakta menggambarkan betapa kompleksnya Kebijakan yang harus diimplementasikan di PTKIS, demi kemaslahatan masyarakat dapat menimbulkan citra buruk bagi mutu program PTKIS sehingga tidak dapat menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan kebijakan. Dampak ikutannya dapat berupa anggapan bahwa manajemen pendidikan Islam di PTKIS memang belum mampu menyajikan yang bermutu yang memenuhi harapan kepada *customers* dan *stakeholders*.

Ahli manajemen kebijakan David C. Korten (Tarigan, 2000:19), memandang, bahwa suatu program akan berhasil diimplementasikan, jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output

program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2. Batasan Permasalahan

Salah satu isu yang paling krusial dari tahap kebijakan organisasi tidak terkecuali kebijakan SKPI pada PTKIS, adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan dengan dengan konteks kebijakan organisasi. Untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan perlu dicarikan faktor-faktor kritis yang dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan hanya akan dicapai apabila faktor-faktor kritis dari implementasi kebijakan dapat diatasi dan dijadikan. Faktor-faktor kritis tersebut menurut George Edward III mencakup empat variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Rumusan Permasalahan (Widodo, 2011:9).

Berawal dari deskripsi latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dijadikan kajian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta terhadap Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)? Untuk mengkaji

pokok permasalahan tersebut maka penulis mem-*breakdown* ke dalam beberapa sub masalah yaitu:

- a. Bagaimana, intepretasi atau penafsiran kebijakan penerapan SKPI di lingkungan PTKIS?
- b. Bagaimana, pengorganisasian kebijakan SKPI, di PTKIS?
- c. Bagaimana, aplikasi strategi penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS?
- d. Bagamana Kendala yang dihadapi dan bagaimana Solusi dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, peneliti ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI..

2. Tujuan Khusus

Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan manajemen pendidikan dan pemanfaatannya di dalam dunia pendidikan saat ini, maka bagaimana seharusnya pihak-pihak terkait mengantisipasi perkembangan sistem informasi manajemen pendidikan serta pemanfaatannya tanpa kehilangan kontrol dan landasan organisasi pendidikan yang antara lain menyangkut efektivitas dan efisiensinya, khususnya dalam implementasi kebijakan SKPI di PTKIS, maka secara khusus peneletian ini, bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan intepretasi atau penafsiran kebijakan SKPI dilingkungan PTKIS;
- b. Mendeskripsikan Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS;
- c. Mendeskripsikan aplikasi strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS;
- d. Mendeskripsikan Kendala yang dihadapi, dan Solusi dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS;

C. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan kebijakan pendidikan Tinggi keagamaan Islam yang akurat, khususnya dalam mengimplementasi kebijakan SKP, dilingkungan PTKIS.

2. Kegunaan bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan Pendidikan di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan penerapan SKP PTKIS.

3. Kegunaan bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PTKIS sehingga keakuratan data informasi PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar Baten dari waktu ke waktu diikuti dengan peningkatan kualitas SKP yang akurat dan akuntabel. Data SKP, yang berkualitas, akurat dan akuntabel akan dapat meningkatkan PTKAIS yang akuntabel, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, dan memberi kontribusi dalam pembangunan pendidikan Islam yang dapat ditunjukkan antara lain dengan ketaatan PTKIS sebagai penyelenggara pendidikan dan berbagai dukungan sumberdaya dari PTKIS terhadap kegiatan pembangunan Pembangunan Pendidikan Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kesiapan PTKIS yang menjadi fokus penelitian adalah pemahaman para pengelola PTIS terhadap Penerapan SKPI. Pemahaman para pengelola PTKIS mengenai SKPI dapat menunjukkan seberapa besar kesiapan mereka untuk mengimplementasikan SKPI. Pemahaman PTKIS yang diteliti meliputi: Penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; atau disebut juga; pengorganisasian, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; dan aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, dan pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

A. Konsep Dasar Kesiapan

1. Definisi Kesiapan

Kata “Kesiapan” ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *readiness*. Istilah *readiness*, di dalam *Dictionary of Education* (Good. 2003:473), mempunyai arti “*Willingness, desire, and ability to engage in given activity*”. Jadi, kesiapan berarti Kemauan, hasrat/dorongan, dan kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan tertentu.

Secara terminologis, istilah “Kesiapan”, adalah kondisi yang mendahului kegiatan itu sendiri, tanpa kesiapan atau kesediaan ini proses mental tidak terjadi”. (S. Nasution, 2003:179). Selanjutnya, menurut Slameto (2010:113), yang menyatakan bahwa “Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi”.

2. Prinsip, dan Aspek Kesiapan

Prinsip-prinsip dan aspek-aspek kesiapan menurut Slameto (2010 :115). Dari segi prinsip kesipan:

- a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
- b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.
- d. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

Adapun, aspek-aspek yang terkandung dalam kesiapan, yaitu:

- a. Kematangan (Maturation); Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan.
- b. Kecerdasan; Menurut J. Piaget dalam Slameto, perkembangan kecerdasan adalah sebagai berikut: (1) sensory motor period (0-2 tahun), (2) Preoperational (2-7 tahun), (3) Concrete operation (7-11 tahun), (4) Formal operation (lebih dari 11 tahun).

Untuk hal itu, Ngilim Purwanto (2006: 45), mengaitkan juga dengan taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Bloom yang terdiri atas tiga ranah, yaitu:

- a. Ranah kognitif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan dan kemampuan intelektual.
- b. Ranah afektif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, nilai-nilai perasaan dan minat.
- c. Ranah psikomotorik mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan keterampilan fisik, gerak yang ditunjang oleh kemampuan psikis.

Berdasarkan teori tersebut, memperlihatkan bahwa kesiapan hanya dapat tercapai berkat adanya usaha belajar dan latihan. Misalnya seorang pegawai dikatakan telah siap kerja jika ia telah mempunyai kesiapan dalam kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*) dan keterampilan (*psikomotorik*).

Wiyono (2008: 55), mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi

kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al. dalam (Wiyono:2008:56) adalah sikap komprehensif yang memengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo.

3. Makna, Ciri, dan Faktor Kesiapan kerja

a. Makna kesiapan kerja

Secara individu, kesiapan kerja terdiri atas dua kata, yaitu kesiapan dan kerja. Dali Gulo dalam Sugihartono (1991: 7) mengartikan bahwa "Kesiapan (*readiness*) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu". Menurut Taliziduhu Ndraha (1999: 1), "Kerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuh kebutuhan yang ada".

Dari kedua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kesiapan kerja merupakan suatu kondisi awal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam rangka penciptaan suatu produk atau penambahan nilai suatu unit sumber daya.

Kesiapan kerja merupakan modal utama bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan sehingga dengan kesiapan yang dimiliki akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003: 94) "Kerja adalah pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan tertentu". Menurut Mukijat (1984:356), kerja (*work*), adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan umum.

Bambang Endroyo (1984: 4), menegaskan bahwa pengertian kerja memiliki arti yang luas, meliputi usaha, tugas, ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Ditinjau dari segi individu, yaitu gerak dari badan dan pikiran untuk memenuhi kebutuhan badaniyah maupun rohaniyah. Ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasikal barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan ditinjau dari segi spiritual merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan/megabdi kepada Allah SWT, dan makluknya.

Bambang Endroyo (1984:9-11), mengemukakan bahwa “Kesiapan kerja adalah kondisi yang menunjukkan adanya keserasian antara kematangan fisik, mental serta pengalaman sehingga individu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam hubungannya dengan pekerjaan.

Adapun menurut Herminanto Sofyan (1991 :17), “kesiapan kerja adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan tanpa mengalami kesulitan dan hambatan dengan hasil maksimal dengan target yang telah ditentukan”.

Kesiapan kerja dalam penelitian ini dimaksudkan kesiapan untuk mengimplementasikan penerapan kebijakan PMA Nomor 1 tahun 2016 tentang tentang Ijazah, Transkrip nilai dan surat ketengan pendampin Ijazah. Pendidikan Tinggi Keaamaan Islam.

b. Ciri-ciri kesiapan kerja

Ciri-ciri seseorang mempunyai kesiapan kerja menurut Sukirin yang dikutip Herminanto Sofyan (1991:1), menegaskan bahwa untuk mencapai tingkat kesiapan kerja dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

1) Tingkat kematangan

Tingkat menunjukkan pada proses perkembangan atau pertumbuhan yang sempurna, dalam arti siap digunakan. Kesiapan dibedakan menjadi kesiapan fisik yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik dan kesiapan mental yang berhubungan dengan aspek kejiwaan.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan pengalaman-pengalaman yang diperoleh berkaitan dengan lingkungan, kesempatan-kesempatan yang tersedia, dan pengaruh dari luar yang tidak sengaja. Pengalaman merupakan salah satu factor penentu

kesiapan karena dapat menciptakan suatu lingkungan yang dapat dipengaruhi perkembangan kesiapan seseorang.

3) Keadaan mental dan emosi yang serasi

Keadaan mental dan emosi yang serasi meliputi keadaan kritis, memiliki perimbangan-pertimbangan yang logis, obyektif, bersikap dewasa dan emosi terkendali, kemauan untuk bekerja dengan orang lain, mempunyai kemampuan untuk menerima, kemauan untuk maju serta mengembangkan keahlian yang dimiliki.

Dengan demikian, kesiapan kerja seseorang dalam melakukan sesuatu juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Jika ditinjau dari segi pengalaman dan keterampilan, misalnya seseorang telah mempunyai kesiapan kerja, karena pada saat proses belajar-mengajar mereka telah diberi pengalaman, keterampilan, serta stimulasi yang mengarah pada dunia kerja. Berdasarkan uraian di atas kesiapan kerja banyak dipengaruhi oleh tiga hal:

- 1) Faktor psikologis yang meliputi mental, emosi, keinginan atau minat, semangat.
- 2) Faktor fisiologis yang meliputi panca indera, system syaraf pusat dan otototot yang berfungsi dengan baik.
- 3) Faktor pengalaman yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bekerja.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja

Menurut Slameto (2010:113), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Kondisi fisik, mental dan emosional, (2) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, (3) Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi kesiapan seseorang untuk berbuat sesuatu.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Slameto (2010: 115), bahwa "Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan". Menurut Kartini (1991: 21), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja adalah faktor-faktor dari dalam diri sendiri (*intern*) dan faktor-faktor dari luar diri sendiri (*ekstern*). Faktor-faktor dari dalam diri sendiri meliputi, kecerdasan, ketrampilan dan kecakapan, bakat,

kemampuan dan minat, motivasi, kesehatan, kebutuhan psikologis, kepribadian, cita-cita, dan tujuan dalam bekerja, sedangkan faktor-faktor dari luar diri sendiri meliputi, lingkungan keluarga (rumah), lingkungan dunia kerja, rasa aman dalam pekerjaannya, kesempatan mendapatkan kemajuan, rekan sekerja, hubungan dengan pimpinan, dan gaji.

Sejalan yang dikemukakan oleh Herminanto (1986: 6) “faktor yang mempengaruhi kesiapan mental kerja adalah prestasi belajar, keadaan ekonomi orang tua, bimbingan sosial, bimbingan karier, dan pengalaman kerja”.

Menurut Dewa Ketut (1993: 44), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kesiapan Kerja, diantaranya:

1) Faktor-faktor yang bersumber pada diri individu

Faktor-faktor yang bersumber pada diri individu, yang meliputi:

- (a) Kemampuan intelegensi; Setiap orang memiliki kemampuan intelegensi berbeda-beda, di mana orang yang memiliki taraf intelegensi yang lebih tinggi akan lebih cepat memecahkan permasalahan yang sama bila dibandingkan dengan orang yang memiliki taraf intelegensi yang lebih rendah. Kemampuan intelegensi yang dimiliki oleh individu memegang peranan penting sebagai pertimbangan apakah individu tersebut memiliki kesiapan dalam memasuki suatu pekerjaan.
- (b) Bakat; Bakat adalah suatu kondisi, suatu kualitas yang dimiliki individu yang memungkinkan individu tersebut untuk berkembang pada masa mendatang, sehingga perlu diketahui sedini mungkin. Misalannya bakat-bakat seorang pegawai untuk mempersiapkan peserta didik sesuai dengan bidang kerja dan jabatan atau karir setelah lulus dari pra jabatan, dan sekolah pimpinan tingkat dasar, menengah, dan atas yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian.
- (c) Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan dan campuran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut, dan kecenderungan-kecenderungan lain untuk bisa mengarahkan individu

kepada suatu pilihan tertentu. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai kesiapan dan prestasi dalam suatu pekerjaan serta pemilihan jabatan atau karir.

- (d) *Motivasi*, adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi sangat besar pengaruhnya untuk mendorong peserta didik dalam memasuki dunia kerja sehingga menciptakan kesiapan dari dalam dirinya untuk bekerja.
- (e) *Sikap*, adalah suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap positif dari dalam diri individu tentang suatu pekerjaan atau karir akan berpengaruh terhadap kesiapan individu tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan.
- (f) *Kepribadian* seseorang memiliki peranan penting yang berpengaruh terhadap penentuan arah pilih jabatan dan kesiapan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.
- (g) *Nilai-nilai* yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap pekerjaan yang dipilihnya dan prestasi dalam pekerjaan sehingga menimbulkan kesiapan dalam dirinya untuk bekerja.
- (h) *Hobi* adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu karena kegiatan tersebut merupakan kegemarannya atau kesenangannya. Hobi yang dimiliki seseorang akan menentukan pemilihan pekerjaan sehingga menimbulkan kesiapan dalam dirinya untuk bekerja.
- (i) *Penguasaan terhadap materi pelajaran* dalam pendidikan yang sedang ditekuninya oleh individu berpengaruh terhadap kesiapan kerja individu tersebut.
- (j) *Keterampilan* adalah kecakapan dalam melakukan sesuatu. Keterampilan seseorang akan mempengaruhi kesiapan untuk melakukan suatu pekerjaan.
- (k) *Penggunaan waktu senggang*; Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran di sekolah digunakan untuk menungjung hobinya atau untuk rekreasi.
- (l) *Aspirasi dan pengetahuan sekolah* atau pendidikan sambilan Aspirasi dengan pendidikan sambilan yang

diinginkan yang berkaitan dengan perwujudan dari cita-citanya.

- (m) Pengetahuan tentang dunia kerja; Pengetahuan yang sementara ini dimiliki anak, termasuk dunia kerja, persyaratan, kualifikasi, jabatan struktural, promosi jabatan, gaji yang diterima, hak dan kewajiban, tempat pekerjaan itu berada, dan lain-lain.
- (n) Pengalaman kerja yang pernah dialami siswa pada waktu duduk di sekolah atau di luar sekolah yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Industri.
- (o) Kemampuan dan keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah; Kemampuan fisik misalnya badan kekar, tinggi dan tampan, badan yang kurus dan pendek, penampilan yang tidak sesuai etika dan kasar.
- (p) Masalah adalah problema yang timbul dan bertentangan dalam diri individu. Sedangkan keterbatasan pribadi misalnya mau menang sendiri, tidak dapat mengendalikan diri, dan lain-lain.

2) Faktor-faktor Sosial

Faktor Sosial, yang meliputi bimbingan dari orang tua, keadaan teman sebaya, keadaan masyarakat sekitar dan lain-lain.

4. Esensi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberikan respon atau reaksi. Kesediaan itu datang dari dalam diri seseorang atau kelompok dan juga berhubungan dengan kematangan. Kesiapan amat perlu diperhatikan dalam suatu proses, karena jika seseorang atau kelompok sudah ada kesiapan, maka hasilnya akan memuaskan. Berkenaan dengan kesiapan seorang atau kelompok/ organisasi/ lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTKIS), dalam mendukung implemnatasi kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendaping Ijazah, yang harus diberikan kepada lulusannya selain dari Ijazah dan transkrip nilai. Hal ini, berdasar pada Peraturan Menteri Agama RI (PMA), nomor 1 tahun 2016, tentang Ijazah, Transkrip nilai dan surat ketengan pendampin Ijazah. Pendidikan Tinggi keaamaan Islam.

Kerja dalam konteks penelitian ini, melaksanakan tugas pemerintah berdasar pada kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Agama RI (PMA), nomor 1 tahun 2016, tentang Ijazah, Transkrip nilai dan surat ketengan pendampin Ijazah. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Yang sejatinya harus sudah dilaksanakan sejak tanggal PMA tersebut dikeluarkan tanggal 12 Januari 2016. Artinya sejak tanggal tersebut PTKI maupun PTKIS harus sudah siap mengerjakan/memimplentasikan penerapan pemberian SKPI disampin ijazah dan transkrip nilai, kepada Lulusannya.

Berdasar pandangan Tangkilisan (2003: 18), ada tiga langkah kegiatan utama yang paling penting dalam mempersiapkan untuk implementasi keputusan/kebijakan yaitu:

- a. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; atau disebut juga *interpretasi*, yaitu aktivitas;
 - 1) Respon terhadap Kebijakan
 - 2) Menafsirkan agar kebijakan menjadi program
 - 3) Menafsirkan program menjadi rencana kegiatan
 - 4) Pengarahan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilksanakan;
- b. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan;
 - 1) Desain organisasi dan struktur organisasi;
 - 2) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan;
 - 3) Integrasi dan koordinasi;
 - 4) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;
 - 5) Hak, wewenang dan kewajiban;
 - 6) Pendelegasian (Sentralisasi dan Desentralisasi);
 - 7) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia;
 - 8) Budaya organisasi
- c. Aplikasi, berhubungan dengan:
 - 1) Perlengkapan rutin bagi pelayanan,
 - 2) Pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Konsep “kesiapan PTKIS” merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu “kesiapan” dan “ PTKIS”. Dalam kamus Bahasa Indonesia (2008:1342), kata “kesiapan” berasal dari kata “siap” mendapat awalan ke-dan akhiran-an., kesiapan adalah suatu keadaan bersiap-siap untuk mempersiapkan sesuatu. Pengertian PTKIS, secara formal tersurat dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) adalah [perguruan tinggi di Indonesia](#) yang pengelolaannya berada di bawah [Kementerian Agama](#). Secara akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam Swasta dilakukan oleh [Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia](#) (Kemristekdikti), sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Kementerian Agama, secara operasional diselenggarakan oleh masyarakat.

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

PTKIS, sebagai lembaga pendidikan tinggi berfungsi untuk memiliki sumberdaya potensial diataranya. Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari segi kesiapan SDM terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah sebagai berikut

- 1) Integritas, Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
- 2) Kompetensi Kompetensi berarti pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982: 55). Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor kesiapan yang dipengaruhi dari segi eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dalam organisasi ada istilah insentif, yang merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi.
- 2) Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak.
- 3) Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

B. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli, diantaranya: Menurut Patton dan Sawicki (1993:199), bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan/melaksanakan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya. Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat

diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9)

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)

Jones (Arif Rohman, 2009: 122), menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Selanjutnya ia, mengemukakan ada beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

2. Operasi Penyiapan Implementasi Kebijakan

Berdasar pandangan Tangkilisan (2003: 18), ada tiga langkah kegiatan utama yang paling penting dalam mempersiapkan implementasi keputusan/kebijakan yaitu: (a) Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; maksunya; (b) Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; (c) Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya;

Senada dengan itu, dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, seorang ahli yang bernama Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009: 135), mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: (a) *pengorganisasian*, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; (b) *Interpretasi*, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (c) *Aplikasi*, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah dibuat sebelumnya yang di dalamnya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif, faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Kesemuanya itu menunjukkan secara spesifik dari proses implementasi yang sangat berbeda dengan formulasi kebijakan pendidikan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kegagalan dan keberhasilan implementasi menurut Arif Rohman (2009: 147) ada tiga yaitu:

- a. Faktor pertama; berkaitan dengan diktum atau rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan (*decision maker*). Menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuannya tepat atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah difahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan atau tidak, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Oberlin Silalahi bahwa pembuat kebijakan harus terlebih dahulu mencapai

beberapa konsensus diantara mereka mengenai tujuan-tujuan, serta informasi yang cukup untuk mencapai tujuan.

- b. Faktor kedua adalah pada personil pelaksananya. Menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut.
- c. Faktor ketiga adalah faktor organisasi pelaksana. Menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang diterapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Peters (1982) dalam (Tangkilisan, 2003:22) menyatakan, bahwa implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

- a. Informasi; Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dan kebijakan itu.
- b. Isi Kebijakan; Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- c. Dukungan; Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi; Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Adapun, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan, Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan

oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. (Winarno, 2002:113).

Rippley dan Franklin (1982), dalam (Tangkilisan, 2003:21) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005:93), dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan;
- b. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
- c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin;
- d. apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan
- f. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Adapun variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. (Subarsono, 2005:93)

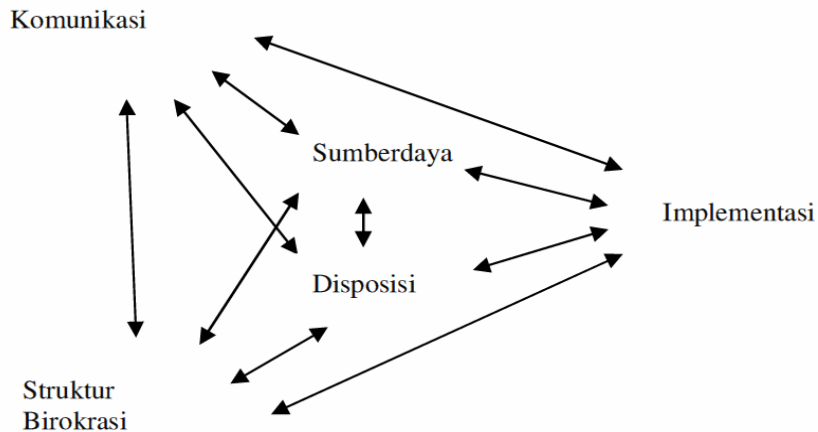
4. Variabel yang memengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Smith dalam Islamy (2001:80), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a. *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, memengaruhi dan merangsang target *group* untuk melaksanakannya
- b. *Target groups* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan
- c. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Environmental factors* yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Ahli manajemen kebijakan David C. Korten (Penelitian Tarigan, 2000:19), memandang, bahwa suatu program akan berhasil diimplementasikan, jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu: *pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

George Edward III (Widodo (2010:96), penelitian mengkaji ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Hal itu, divisualisasikan pada gambar 2.1, berikut:



Gambar: 2.1.01
Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

Sumber: George Edward III (Widodo, 2010:96)

C. Penerapan SKPI Sebagai Kebijakan Pendidikan Tinggi menghadapi era Persaingan

1. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O'Neil (Nugroho, 2008: 37), dinyatakan "bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam globalisasi". Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

2. Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam menghadapi era Persaingan

Era baru dunia pendidikan, diperlukannya reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini memiliki nuansa bagaimana dunia pendidikan berusaha menggunakan perangkat komputer, yang dapat di aplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja dunia pendidikan secara signifikan. Sistem informasi manajemen merupakan sistem operasional yang melaksanakan beranekaragam fungsi untuk menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan operasi dan manajemen organisasi yang bersangkutan (Gordon, 1998:1).

Untuk menghadapi era persaingan, pendidikan tinggi di Indonesia “termasuk pendidikan tinggi keagamaan” harus mempersiapkan tiga aspek yang sangat strategis. Ketiganya yaitu perbaikan kurikulum dan program pendidikan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua untuk komunikasi tingkat regional, dan menyiapkan para mahasiswa sebagai profesional muda yang memiliki budaya kerja baik (Dede Rosyada 2014.:11). Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI.

Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu *skil* khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.

3. Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka seluruh perguruan tinggi “termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam yang mengelola program studi keagamaan dan sebahagian besar tidak diorientasikan pada pasar kerja” harus memberikan perhatian serius dengan mengembangkan program-program pelatihan dan workshop bagi para mahasiswa, khususnya untuk keterampilan dan keahlian alternatif di luar keahlian program studi, bersertifikat dan dapat dideskripsikan dalam SKPI, sehingga bisa dijadikan informasi penting untuk memasuki pasar kerja. Rancangan baru pendidikan tinggi tersebut sebagai sebuah gerakan inovatif untuk mengakseskan seluruh sarjana Strata I atau diploma IV pada pada pasar kerja yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN.

Dengan adanya AEC maka Pendidikan tinggi, perlu menyiapkan informasi lulusan yang bermutu dan berdaya guna. Salah satu informasi untuk memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi termasuk PTKIS, adalah dengan diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri.

a. Pengertian SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. (PPTK.Menkes, 2015:4).

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

- 1) Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada

- jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- 2) SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik.
 - 3) SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. (Megawati Santoso, 2013).

b. Kebijakan Penerapan SKPI

Secara yuridis, dikeluarkannya Permendikbud No. 81 Tahun 2014, SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai "Rekam Jejak Mahasiswa dalam Perkuliahan". Jadi, dengan adanya SKPI ini segala macam kegiatan kita selama perkuliahan dapat digambarkan disini.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari Lulusan perguruan Tinggi Keagamaan bergelar. (PMA No1 Tahun 2016, pasal 1 ayat 3).

Dengan demikian, SKPI merupakan sebuah dokumen resmi yang harus diperoleh setiap sarjana Strata 1 atau diploma IV yang mendampingi ijazah dan transkrip nilai mereka. SKPI dituliskan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, sehingga bisa difahami para pengguna di Indonesia dan negara lain. Penulisan dwi bahasa juga memungkinkan para sarjana sendiri bisa mengakses pasar kerja global, setidaknya di seluruh negara ASEAN. Selanjutnya, SKPI juga menjelaskan seluruh kompetensi bersertifikat yang dimiliki masing-masing sarjana, khususnya yang didapat dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh program studi sebagai program pendidikan keterampilan dan keahlian alternatif yang dapat melengkapi kompetensi kesarjanaan mereka. Selain itu, SKPI juga menjelaskan keterampilan atau keahlian bersertifikat yang diperoleh melalui festival atau kompetisi selama mereka kuliah pada program studi yang melahirkannya. Harapannya, melalui SKPI, setiap sarjana dapat terakseskan pada pasar kerja di seluruh negara ASEAN dan siap berkompetisi dengan para sarjana dari universitas lain.

Terkait hal itu, Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa SKPI harus ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa didasarkan pertimbangan bahwa para sarjana yang akan memasuki pasar kerja saat ini memiliki kesempatan sangat luas dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Diketahui, implementasi MEA memungkinkan meluasnya pasar kerja di seluruh negara ASEAN. Sesuai kesepakatan Bali Concord II tahun 2003 diputuskan bahwa mulai tahun 2015 berlaku *free flow of service* (aliran layanan gratis), di seluruh negara ASEAN bagi seluruh warga negara-negara di kawasan ini (Economic Community Blueprint, 2008:10). Dengan demikian, sarjana yang ada di posisi level enam KKNI, yang merupakan calon wirausahawan dan tenaga profesional, harus diakseskan pada lapangan kerja dengan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang melahirkannya, baik untuk pasar kerja di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

c. Isi dan Substansi SKPI

Jika dilihat segi konstitusional, SKPI itu berisi mengenai hal-hal berikut seperti PMA No 61 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat (1), berikut:

- (1) SKPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memuat:
 - (a) Lambang Perguruan Tinggi;
 - (b) Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT;
 - (c) Nama Program Studi;
 - (d) Nama Lengkap Pemilik SKPI;
 - (e) Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI
 - (f) NIM untuk mahasiswa PTKIN, NIMKO/NRM, NIRL untuk mahasiswa PTKIS
 - (g) Tanggal, Bulan, Tahun Masuk dan Kelulusan
 - (h) Nomor Seri Ijazah
 - (i) Gelar yang Diberikan Beserta Singkatannya
 - (j) Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi)
 - (k) Program Pendidikan (Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, atau Spesialis)
 - (l) Capaian Pembelajaran Lulusan Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), secara Naratif;

- (m) Level KKKNI;
 - (n) Persyaratan Penerimaan;
 - (o) Bahasa Pengantar Kuliah;
 - (p) Sistem Penilaian;
 - (q) Lama Studi;
 - (r) Jenis dan Program Pendidikan Tinggi Lanjutan; dan
 - (s) Skema Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.

SKPI pada intinya berbeda dengan Transkrip Akademik, walaupun sama-sama menerangkan mengenai perkuliahan. Bedanya ialah jika Transkrip Akademik hanya menggambarkan mengenai nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliahnya, sedangkan SKPI lebih menggambarkan pada apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perkuliahannya.

- 1) SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan.
- 2) Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang KKKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses pendidikan baik formal, non formal, maupun informal, yaitu suatu proses internasilisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (science), atau pengetahuan (knowledge) dan pengetahuan prkatis (know-how), (b) keterampilan (skill), (e) afeksi (affection) dan (f) kompetensi kerja (competency)

Pencapaian mahasiswa selama perkuliahannya dapat digambarkan pada kolom Capaian Pembelajaran Lulusan, yakni menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Misalkan untuk lulusan Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Akuntansi dapat membuat laporan keuangan melalui serangkaian siklus akuntansi dan menganalisisnya.

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Hal ini dapat membantu para perekrut kerja (HRD perusahaan) dalam menyeleksi tenaga kerja.

Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada di SKPI, yakni Aktivitas Mahasiswa selama Perkuliahan. Hal ini termasuk pada kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik. Pada SKPI juga dimuat mengenai KKNi atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pada kolom KKNi ini menjelaskan mengenai pemahaman jenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan atau mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja.

Dalam SKPI digunakan dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris sebagai Bahasa Internasional. Hal ini dilakukan karena pemakaian SKPI tidak hanya berlaku pada wilayah Nasional saja, namun juga hingga wilayah Regional bahkan Internasional.

d. Pihak yang Berwenang yang Berkaitan dengan Kebijakan SKPI

Ada beberapa pihak yang berwenang dalam rangka dikeluarkannya SKPI. Kewenangan dikeluarkan SKPI dilakukan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Adapun untuk penandatanganan SKPI dilakukan oleh:

- 1) Untuk Universitas atau Institut dilakukan oleh Dekan Terkait
- 2) Untuk Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua dan Pemimpin Unit Pengelola Program Studi terkait.
- 3) Untuk Akademik atau Politeknik dilakukan oleh Pemimpin Unit Pengelola Program Studi terkait.
- 4) Untuk Akademi Komunitas dilakukan oleh Direktur

e. Manfaat SKPI

Ada beberapa manfaat dengan dikeluarkannya SKPI, yaitu:

1) Manfaat SKPI Bagi Lulusan

Manfaat Skpi Bagi Lulusan, antara lain sbb:

- (a) Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penugasan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna didalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip
- (b) Sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya
- (c) Dapat meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari keakuan jenis dan jenjang program studi.

2) Manfaat SKPI Bagi Perguruan Tinggi

Peruruan tinggi menerbitkan SKPI akan memperoleh Bagi Perguruan Tinggi, antara lain sbb:

- (a) Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip
- (b) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capain pembelajaran suatu program studi yang transparan.
- (c) Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualifiaction framework* masing-masing negara.
- (d) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

4. Persiapan Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI

Secara Yuridis, dikeluarkannya Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (UUD.No12 Th.2012). Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Penerbitan SKPI ini didasari oleh adanya tiga Permendikbud, yakni Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Permendikbud No. 49 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 81 Tahun 2014.

Untuk mengejar target pemerintah mengimplementasikan secara penuh, Penerimaan SKPI ini mulai efektif dilakukan pada tahun akademik 2014/2015. Khusus untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan berdasar pada Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2016. Diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2016. Tentu memerlukan strategi jitu.

Oleh karena itu pelaksanaan strategi harus memenuhi dua kriteria kondisi dasar, yaitu *necessary condition* dan *sufficient condition*. (1) *Necessary condition* adalah kriteria mutlak yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. Setelahnya, pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*). (2) *Necessary condition* adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana pemeliharaan.

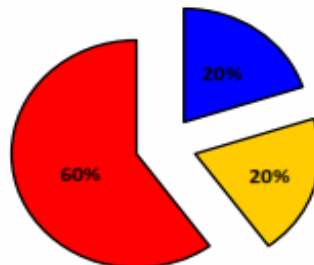
Tidak hanya kedua kriteria tersebut yang harus terpenuhi, ada hal yang juga harus menjadi prasyarat untuk dapat mengimplementasikan SKPI, yang notabene barang baru, yaitu komitmen dari para pemimpin dan pejabat PTKIS, termasuk dukungan politik dari instansi pembina PTKIS dan Kopertais, serta SDM yang menguasai ilmu dan konsep SKPI dalam jumlah yang memadai, mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Penerapan SKPI membutuhkan pembaharuan

yang terus menerus, sehingga ada satu unsur lagi yang mutlak harus terpenuhi dalam upaya implementasi SKI, yaitu pendanaan yang cukup. Unsur pendanaan tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan.

Melihat kompleksitas implementasi penerapan SKI, dapat dipastikan bahwa penerapan SKPI di lingkungan PTKIS memerlukan sistem IT based system yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

a. Manajemen Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas mengoperasikan sebuah program. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Persentase keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari aspek rencana sebesar 20%, keberhasilan implementasi 60%, sisanya 20% adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Hal itu tampak pada gambar 2.2, berikut:



Gambar 2.1.02.

Diagram Persentase Keberhasilan Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho, 2009: 502

Pelaksanaan/implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan

manajemen implementasi kebijakan dapat disusun berurutan sebagaimana tampak pada tabel 2.1, berikut:

Tabel 2. 1.
Manajemen Implementasi

No.	Tahap	Isu Penting
1	2	3
1.	Implementasi Strategi (Pra Implementasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun struktur dengan strategi - Melembagakan strategi - Mengoperasikan strategi - Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2.	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Desain organisasi dan struktur organisasi - Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan - Integrasi dan koordinasi - Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia - Hak, wewenang dan kewajiban - Pendelegasian (Sentralisasi dan Desentralisasi) - Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia - Budaya organisasi
3.	Penggerakan dan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas kepemimpinan - Motivasi, etika dan mutu - Kerjasama tim dan komunikasi organisasi - Negosiasi
4.	Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - Desain pengendalian - Sistem informasi manajemen - Pengendalian anggaran dan keuangan - Audit

Sumber: Riant Nugroho, 2009: 526

b. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan implementasi kebijakan SKPI di beberapa PTKIS, adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja penerima mandat Tugas Pembantuan, pelaksana kebijakan pemerintah.

c. Tersedianya SDM yang kompeten

Penyiapan dan penyusunan Program SKPI tersebut memerlukan SDM yang menguasai dibidangnya. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan SKPI pada PTKIS. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM yang kompeten. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten.

d. Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan SKPI dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengubah kondisi menjadi *sufficient condition* (kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi), dibutuhkan kebijakan, prosedur dan teknologi. Pengembangan dokumen kebijakan dibutuhkan untuk mengakomodasi penerapan SKI. Idealnya, dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di PTKIS masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik standar operasional prosedur (SOP). Hal lain yang tak kalah penting, yaitu PTKIS juga memerlukan dukungan teknologi khususnya aplikasi penatausahaan SKPI yang mengakomodasi didalamnya agar implementasi penerapan SKPI ini, sesuai dengan harapan.

D. Penelitian terdahulu yang Relevan dan Mendukung terhadap Penelitian Kesiapan PTKIS dalam mendukung Kebijakan penerapan SKPI

SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat yang juga disebut *Diploma Supplement* ini berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Sederhananya, SKPI adalah rekam

jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di curriculum vitae (CV).

Nantinya, SKPI ini dikeluarkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip akademik. Kalau ijazah merupakan bukti telah selesainya suatu jenjang pendidikan tertentu, dan transkrip nilai adalah daftar nilai pencapaian selama menempuh perkuliahan, SKPI menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Hal ini dapat membantu para perekrut kerja (HRD perusahaan) dalam menyeleksi tenaga kerja.

1. Penelitian Yusuf Bachtiar 2001

Penelitian Yusuf Bachtiar (2001), dengan judul: "Kesiapan Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) di Kota dan Kabupaten Bandung,"berdasarkan data empiris/lapangan, menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS), baik berupa pandangan para ahli pendidikan maupun berupa pandangan para praktisi pendidikan, sampai saat ini belum dapat dibantah tentang kebaikan dan keuntungannya.
- b. Kesiapan pelaksanaan MPBS pada Dinas dan cabang Dinas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat (orang tua siswa dan sekolah dari jenjang SD, SLTP dan SMU) di Kota dan Kabupaten Bandung, dilihat dari aspek organisasi, kurikulum, SDM, kesiswaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat, secara keseluruhan termasuk pada kategori cukup siap.

2. Penelitian DIKTI Tahun 2006

Hasil Riset Dikti tahun (2006), Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada dalam kebijakan SKPI, yakni aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Hal ini termasuk pada kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik, maupun pengembangan karakter dan keprofesian. Manfaat SKPI juga dapat dirasakan oleh para calon wisudawan atau para lulusan seperti, penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, meningkatkan kelayakan kerja (*employability*), merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, serta memberikan informasi bahwa institusi berada dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) yang diakui pengguna lulusan.

Selain itu, SKPI juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi) pemegangnya, memudahkan dibaca dan dipebandingkan antar negara, memberikan rekaman karir akademik, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah. SKPI juga menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri. Pada 2006 capaian pembelajaran yang diterapkan mengacu kepada 29 kompetensi utama. Kehadiran SKPI dalam kurikulum sejatinya bukan lagi hal baru. Ia telah hadir dan diberlakukan sejak tahun 2006. Namun seiring berjalannya waktu SKPI terus bertransformasi dan mengalami perbedaan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh DIKTI setidaknya terdapat perbedaan yang mencolok dengan capaian pembelajaran yang diterapkan pada tahun 2006.

3. Penelitian DIKTI Tahun 2014

Riset tahun 2014, menunjukkan bahwa; capaian pembelajaran mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memiliki empat kriteria diantaranya, kemampuan bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, sikap dan tata nilai serta keterampilan umum. Karena pentingnya SKPI ini, disarankan bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta prestasinya. Jadi, selain

mengikuti perkuliahan dengan baik dan meraih nilai maksimal, mahasiswa juga harus membekali diri dengan pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar atau workshop baik itu yang sesuai maupun yang dapat mendukung bidang keilmuannya.

4. Penelitian Wawan dan Imas Masitoh 2015

Wawan dan Imas Masitoh (2015), melakukan penelitian tentang "*Mutu Kinerja Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di lingkungan Kopertais II Jawa Barat*", Diketahui, bahwa Kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik merupakan faktor-faktor mutu kinerja yang sangat menentukan bagi perguruan tinggi agama Islam swasta. Sehingga, lemahnya kondisi dalam faktor-faktor itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi pengaruh kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik terhadap mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, dengan pendekatan kuantitatif, melalui teknik pengumpulan data dengan angket terhadap 53 dosen dan 53 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah WMS dan *path analysis*. Penelitian difokuskan pada Institut Agama Islam swasta se-Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta. Untuk meningkatkan mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta, penelitian ini, merekomendasikan bahwa sistem nilai dan iklim organisasi dalam budaya organisasi dipertahankan; kinerja pimpinan program studi dan pelayanan akademik ditingkatkan, serta visi, misi, tujuan, dan strategi dibuat.

Walaupun keempat penelitian di atas dari segi substantif memiliki kesamaan namun konten, fokus dan lokus penelitian berbeda, akan tetapi penelitian tersebut dapat mendukung terhadap penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Kebijakan penerapan SKPI: Studi di duapuluh empat PTKIS Kopertais Wilayah II, Jawa Barat dan Banten" ini, dipandang

penting untuk dilaksanakan, antara lain sebagai media sosialisasi bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pengelolaan pendidikan tinggi khususnya pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, termasuk mahasiswa, masyarakat sebagai pengguna atau stakeholdes tentang kebijakan pemerintah melalui peraturan presiden (perpres) nomor 8 tahun 2012 yang kemudian dituangkan dalam Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Permendikbud No. 49 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 81 Tahun 2014. Pemberlakuan SKPI ini mulai efektif dilakukan pada tahun akademik 2014/2015. Khusus untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan berdasar pada Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2016. Diberlakukan sejak tanggal tanggal 12 Januari 2016.

Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi pembuka tabir dalam mengurai kekusutan dari berbagai hambatan dan tantangan dalam menyiapkan proses penerapan SKPI khususnya pada PTKIS di lingkungan di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2016. sejatinya kebijakan ini, diberlakukan sejak tanggal tanggal 12 Januari 2016.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain, Metode, Sumber dan Subjek Penelitian

1. Desain penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian dimaksudkan sebagai suatu rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian (Nana&Ibrahim,1989: 43). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan pada awalnya merupakan kegiatan untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan. Pemikiran ini, dipengaruhi oleh Ann Majchrzak (1984:12), mengemukakan bahwa penelitian kebijakan adalah sebuah penelitian tentang suatu permasalahan sosial yang mendasar dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan berkenaan dengan masalah sosial tersebut.

Dikarenakan karakteristik, penelitian ini sipatnya penelitian kebijakan dalam rangka peningkatan mutu PTKIS. Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Agama RI no 1 tahun 2016, tentang: *Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan*. Fokus kajian implementasi kebijakan penerapan Surat Keterangan pendamping Ijazah termaktub dalam Bagian keempat pasal 19, yaitu: (1) SKPI diterbitkan oleh perguruan tinggi. (2) SKPI ditandatangani oleh: Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut; Ketua Jurusan untuk Sekolah Tinggi; Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan Dekan untuk ascasarjana yang terintegrasi di

Fakultas. Kebijakan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2016.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei. Penelitian survei merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang berlangsung secara alamiah tanpa mendapat perlakuan (*treatment*) dari peneliti seperti halnya jenis penelitian eksperimen (Sugiyono, 2009:3).

Atas dasar itu, maka desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan *mix methods* dengan status sepadan. Penelitian kualitatif untuk mengetahui toleransi kesiapan 24 PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI. dan penggunaan metode kuantitatif untuk memperoleh tingkat toleransi kesiapan 24 PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI. Hal dilakukan dengan sepadan, namun tidak terlalu dominan di salah satunya.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Pemilihan tempat penelitian berdasarkan daerah dengan jumlah ketiga perguruan tersebut seimbang, tidak lebih banyak salahsatunya. Selain itu dua kabupaten merupakan kabupaten dengan konflik perguruan yang kerap terjadi.

2. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Pendekatan *mix methods* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah terangkum dalam bab I, rumusan masalah yang pertama dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif dan rumusan masalah yang kedua dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masing-masing PTKIS sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah.

Penelitian ini menggunakan teknik campuran bertahap. Menurut Creswell (2010:313), strategi ini merupakan strategi dimana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan *interview* terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif, dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis yang dibangun berdasarkan hasil awal kualitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.
- b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan data kuantitatif dan menganalisisnya pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.
- c. Strategi transformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya.

Penelitian campuran atau biasa disebut dengan *mix methods* memiliki beberapa desain penelitian di dalamnya. yaitu desain *mix methods* dengan status sepadan. Metode ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam tingkat sepadan untuk memahami sebuah fenomena yang sedang dikaji. Selanjutnya ada desain metode campuran (*mix methods*) dominan-kurang dominan pada satu bidang tertentu kadang identik dengan satu metode tertentu seperti Psikologi eksperimental dengan kuantitatif dan metode kualitatif untuk kajian ilmu pengetahuan Antropologi. Lalu yang ketiga metode campuran berurutan dimana peneliti melaksanakan tahap kajian penelitian kualitatif dan kemudian melaksanakan secara terpisah tahap penelitian kuantitatif, atau sebaliknya Creswell menyebut desain ini sebagai desain dua tahap. (Creswell, 2010:332). Yang terakhir adalah desain metode campuran (*mix methods*) sejajar atau bersamaan. Data kualitatif atau kuantitatif di kumpulkan dalam waktu yang sama dan dianalisis untuk saling melengkapi.

Metode penelitian kualitatif, digunakan dalam penelitian ini adalah metode Dengan alasan bahwa penelitian kualitatif berpendirian tidak hanya satu kebenaran yang mutlak (Rahmat, 2009: 41). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong 2007: 103). Dengan digunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh data yang mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui “Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendaping Ijazah” Data penelitian ini, akan diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun, metode kuantitatif, yang dipergunakan dalam penelitian ini, khususnya kuantitatif analitik adalah metode deduktif. Dalam metoda ini teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik (2000: 6) menyatakan bahwa pada dasarnya metoda ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan: (1) kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun; (2) menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut; dan (3) melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut Moleong (2007:111), sumber data dalam penelitian kualitatif utamanya adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan yang lain seperti dokumen dan lainnya hanyalah sebagai tanggapan. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTKIS).

4. Subjek Data Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup unsur pimpinan dan pelaksana pada PTKIS yang terdapat di di lingkungan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan data yang diperoleh dari KOPERTAIS Wilayah II Jabar Banten, jumlah PTKIS yang terdapat di KOPERTAIS Wilayah II Jabar Banten Tahun Akademik 2017/2018, berjumlah 159 PTKIS yang terdiri dari 10 Universitas, 9 Institut, dan 140 Sekolah Tinngi.

Pemilihan sampel PTKIS yang menjadi subjek penelitian menggunakan teknik *purposive random sampling*. Ali (1993:77), menyatakan teknik penyampelan ini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan adalah PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten tahun akademik 2017/2018, dengan pertimbangan implementasi penerapan SKPI harus diberlakukan mulai tahun 2017 (Kemendikbud 2017).

Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10% dari seluruh populasi. Suharsimi (2010: 33), menyatakan jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Diambil presentase 15 % dari seluruh jumlah subjek penelitian yaitu 159 PTKIS maka diperoleh 24 PTKIS, sebagai sampel yang dipilih secara acak. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI sehingga subjek dari penelitian ini adalah para penyelenggara PTKIS di seluruh PTKIS yang menjadi sampel penelitian (24 PTKIS) untuk lebih jelasnya tampak pada tabel 3.1.01, berikut:

Tabel 3. 1. 01

PTKIS sebagai Sampel Penelitian

No	Nama PTKIS	Kualifikasi PT	Kab/Kota/Propinsi
1	2	3	5
1.	FAI Universitas Mathlauul Anwar	Univ	Kab. Pandeglang-Banten
2.	IAIB Serang	Ins	Kota Serang-Banten
3.	STAI Latansa Mashiro	ST	Kab. Lebak -Banten
4.	STAI Fatahilah	ST	Kota Tangerang-Banten
5.	STAI Al-Karimiyah	ST	Kota Depok- Jawa Barat
6.	FAI Univ Juanda	Univ	Kota Bogor-Jawa Barat
7.	IAIN Laroiba	Ins	Kab. Bogor-Jawa Barat

1	2	3	5
8.	STAI Karisma	ST	Kab. Sukabumi-Jawa Barat
9.	STAI Sukabumi	ST	Kota Sukabumi-Jawa Barat
10.	STAI Nurul Hikmah	ST	Kab. Cianjur-Jawa Barat
11.	STAI Agus Salim	ST	Kota Bekasi-Jawa Barat
12.	STAI As Sidiqiyah	ST	Kab. Karawang-Jawa Barat
13.	STAI DR. KHE. Z Muttaqin	ST	Kab. Purwakarta-Jawa Barat
14.	STAI Riyaduljannah	ST	Kab. Subang-Jawa Barat
15.	STAIS Dharma	ST	Kab. Indramayu-Jawa Barat
16.	STAI Cirebon	ST	Kota Cirebon-Jawa Barat
17.	FKIS UNSIA	Univ	Kab. Kuningan-Jawa Barat
18.	STAI Miftahul Huda Al Azhar	ST	Kota Banjar -Jawa Barat
19.	STAI Putra Galuh	ST	Kab. Ciamis-Jawa Barat
20.	STAINU Tasikmaya	ST	Kota Tasikmalaya-Jawa Barat
21.	IAIC Cipasung	Ins	Kab. Tasikmalaya-Jawa Barat
22.	STAI Siliwangi Garut	ST	Kab. Garut-Jawa Barat
23.	STAI Al-Falah	ST	Kab. Bandung-Jawa Barat
24.	STAI Siliwangi	ST	Kota Cimahi-Jawa Barat

Sumber: diolah oleh peneliti

Keterangan:

Univ= Universitas 3 PTKIS

Ins. = Institut 3 PTKIS

ST =Sekolah Tinggi 19 PTKIS

Jumlah = 24 PTKIS

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan dan pengambilan kesimpulan.

1. Persiapan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah:

- a. Melaksanakan observasi awal untuk identifikasi masalah dan analisis akar penyebab masalah melalui wawancara dengan unsur penyelenggara PTIS (Pimpinan-Dosen dan tenaga kependidikan), serta pencarian data *online* dari *website* resmi maupun media mana maupun koran *online* mengenai SKPI.
- b. Menentukan subjek penelitian dan sampel dengan mencari data dari Kopertais Wilayah II Jabar-Banten berupa daftar PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat 159 PTKAIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Besar sampel yang digunakan adalah 24 PTKIS yang terdiri dari Universitas, Intitut, dan Sekolah Tinggi se KOPERTAIS Wilayah II Jabar-Banten yang dipilih secara acak. Subjek penelitian pada penelitian merupakan seluruh pimpinan, Dosen dan tenaga Kependidikan di 24 PTKIS tersebut.
- c. Menyusun instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner (angket) dan pedoman wawancara. Selain itu didukung pula dengan dokumentasi untuk memperoleh data berupa daftar PTKIS se KOPERTAIS Wilayah II Jabar-Banten diperoleh dari Kantor KOPERTAIS Wilayah II Jabar-Banten. Dokumentasi juga digunakan sebagai recap seluruh kegiatan penelitian baik berupa foto kegiatan penelitian dan kegiatan pembelajaran, hasil wawancara, bukti guru telah melakukan sosialisasi atau seminar mengenai penerapan SKPI, serta surat ijin penelitian.
- d. Memvalidasi instrumen penelitian disesuaikan dengan isi yang terdapat pada PMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan. Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Validasi diperkuat dengan validasi instrumen dari pembimbing sebaya.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, dengan menggunakan sampel sebanyak 24 PTKIS yang diperoleh secara acak. Peneliti membagikan kuesioner, mewawancarai, dan mengumpulkan dokumentasi dari 24 PTKIS yang menjadi sampel penelitian.

3. Tahap Pembahasan, pengolahan hasil dan Pengambilan Kesimpulan

Melakukan pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian secara deskriptif dari analisis data hasil kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

C. Teknik/Cara Pengumpulan Data

Teknik dalam *mix method* dengan strategi metode campuran bertahap (*sequential mixed methods*) terutama strategi eskplanatoris sekuensial merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Pertama akan dilakukan wawancara terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif diikuti data kuantitatif.

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu, pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain- lain (Moleong, 2007:186).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Khususnya wawancara mendalam (dept interview). Para pakar kualitatif mengatakan bahwa dengan wawancara akan diketahui perasaan, persepsi, perasaan, dan pengetahuan interviewee (subjek wawancara) secara intensif (Ghoni, Fauzan, 2012:175)

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan interview guide atau pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar

pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang permanen (mengikat). Susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi (Ghoni, Fauzan, 2012:176). Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berjumlah 4 pertanyaan, tetapi di kembangkan saat proses wawancara sesuai kebutuhan karena wawancara ini merupakan wawancara bebas terpimpin, beberapa contoh pertanyaannya (a) bagaimana cara mengintrepretasi atau penafsiran Kebijakan SKPI? (b) bagaimana pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI;? (c) bagaimana rencana strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS,.....? dan (d) faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan SKPI?

Wawancara dilakukan dengan unsur pimpinan utama pelatih dari masing-masing PTKIS, diantaranya, Rektor/wakil Rektor, Dekan/wakil dekan; Ketua/wakil ketua STAI dan ketua jurusan/program studi.

Dalam wawancara ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara namun peneliti juga lebih terbuka dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Responden dalam wawancara ini adalah (pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa) Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan mereka dalam mendukung implementasi penerapan SKPI. pad 24 PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten.

Skala disusun untuk mengungkap sikap pro-kontra positif dan negatif, setuju-tidak setuju terhadap objek sosial. Skala berisi pernyataan-pernyataan sikap (*attitude statements*), yaitu suatu pernyataan mengenai objek sikap. Dalam hal ini peneliti menggunakan skala *likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:136). Dalam skala likert ada dua pernyataan sikap, yaitu pernyataan

yang bersifat mendukung (*favorable*) dan pernyataan yang tidak mendukung (*unfavorable*). Dimana dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yakni sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Kriteria penilaian bergerak dari 4,3,2,1 untuk jawaban *favorable* dan 1,2,3,4 untuk jawaban yang *unfavorable*.

Jumlah subjek yang dilibatkan dalam penyebaran skala tidak kurang dari 96 orang, dengan perhitungan 4 orang setiap PTKIS. Tidak ada batas rentang usia bagi setiap PTKIS kelompok PTKIS Universitas, Institut, maupun STAI.

Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena penelitian ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, menurut Tesch (Creswell, 2002: 144-45), dapat ditempuh tahap-tahap sebagai berikut jika peneliti telah menyiapkan teks atau transkrip wawancara secara lengkap, yaitu:

- a. Pahami catatan secara keseluruhan. Peneliti akan membaca semua catatan dengan seksama dan mungkin juga akan menuliskan sejumlah ide yang muncul.
- b. Peneliti akan memilih satu dokumen wawancara yang paling menarik, yang singkat yang ada pada tumpukan paling atas.
- c. Menyusun daftar seluruh topik untuk beberapa informan.
- d. Tahap berikutnya, peneliti akan menyingkat topik-topik tersebut ke dalam kode-kode dan menuliskan kode-kode tersebut pada bagian naskah yang sesuai.
- e. Selanjutnya peneliti akan mencari kata yang paling deskriptif untuk topik dan mengubah topik-topik tersebut ke dalam kategori-kategori.
- f. Membuat keputusan akhir tentang singkatan setiap kategori dan mengurutkan kategori-kategori tersebut menurut abjad.
- g. Mengumpulkan setiap materi yang ada dalam satu tempat dan memulai melakukan analisis awal.
- h. Seandainya diperlukan, akan disusun kode-kode terhadap data yang sudah ada.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, tujuan, dan perasaan. Penggunaan metode ini dengan tujuan agar mendapatkan data yang lebih kaya sehingga hasil penelitian dapat diperkuat dengan fakta di lapangan. Observasi dilakukan selama proses wawancara, penyebaran skala, dan selama peneliti berada di lingkungan 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten (April –Mei 2018)

Observasi memiliki macam-macam tipe. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif (*passive participation*), yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Ghoni, Fauzan, 2012:165).

Dengan observasi peneliti berharap mendapatkan data atas informasi yang akurat tentang bagaimana kesiapan PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar Banten. dalam implementasi SKPI.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh, dilakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Suharsimi (2010) menyatakan dibandingkan metode lain, metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Sugiyono (2010) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dikumpulkan berupa data:

- e. Penafsiran atau intepretasi kebijakan penerapan SKPI dilingkungan PTKIS;
- f. Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS;
- g. Aplikasi strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS;
- h. Kendala yang dihadapi, dan Solusi dalam mengiplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS;

Untuk melengkapi dalam memperoleh data dalam, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menyiapkan kisi-kisi penelitian, sebagaimana tampak pada tabel 3.1.02, berikut:

Tabel: 3.1.02. Kisi-kisi Penelitian

No.	Masalah/ sub Masalah	Hubungan Konsep/Indikator	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Penafsiran/ intrepretasi.	a. Respon terhadap Kebijakan b. Menafsirkan kebijakan menjadi program c. Pengarahan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilksanakan;	- Rektor - Wk R - Dekan - Ketua - WK - Kaprodi
2.	Pengorganisa- sian Kegiatan	a. Desain dan struktur organisasi ; b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; c. Integrasi dan koordinasi; d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia; e. Hak, wewenang&kewajiban f. Pendelegasian (Sentralisasi dan Desentralisasi); g. Pengembangan kapasitas organisasi dan SDM; h. Budaya organisasi	- Rektor - Wk R - Dekan - Ketua - WK - Kaprodi
3.	Aplikasi Kegiatan	a. Perlengkapan rutin bagi pelayanan, b. Pembiayaan atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan c. Pedoman/Panduan/juklak/juknis atau kelengkapan program lainnya	- Rektor - Wk R - Dekan - Ketua - WK - Kaprodi
4.	Kendala yang dihadapi, dan Solusi	a. Kendala: - Komunikasi/Informasi - Isi Kebijakan - Dukungan - Pembagian Potensi	- Rektor - Wk R - Dekan - Ketua - WK - Kaprodi
		b. Solusi: - Komunikasi (<i>communications</i>), - Sumber daya (<i>resources</i>), - Disposisi atau Sikap - Struktur birokrasi	- Rektor - Wk R - Dekan - Ketua - WK - Kaprodi

Sumber: diolah oleh Peneliti

D. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data

1. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengelolaan data yang sudah terkumpul dan diharapkan diperoleh gambaran yang akurat dan konkret dari subjek penelitian.

Dalam penelitian *mix methods* analisis data dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Analisis campuran bersamaan: analisis terhadap data kualitatif dan kuantitatif.
- b. Analisis kualitatif-kuantitatif bertahap: analisis data kualitatif diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif sebagai penegasan.
- c. Analisis kuantitatif-kualitatif bertahap: analisis data kuantitatif diikuti pengumpulan analisis data kualitatif

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-kuantitatif bertahap. Jadi, analisis dilakukan pada data kualitatif lalu diikuti analisis data kuantitatif. Kelompok yang telah teridentifikasi kemudian dibandingkan dengan data kuantitatif yang tersedia atau dengan data yang dikumpulkan melalui analisis kualitatif.

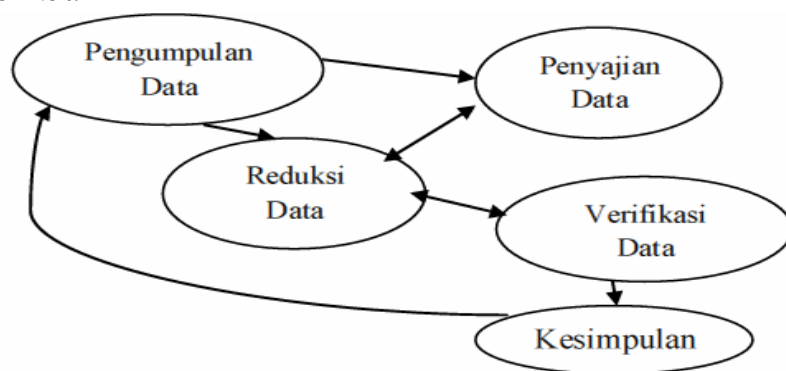
Analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis varians satu jalan, analisis ini dilakukan untuk mengolah data yang hanya mengenal satu variabel pembanding (Tasyakkori, 2010:207).

Adapun, analisis data kualitatif adalah upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis kannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian, saat wawancara peneliti sudah menganalisis jawaban dari hasil wawancara. Bila jawaban belum memuaskan, maka peneliti memberikan pertanyaan kembali sampai jawaban dianggap telah kredibel. (Bogdan & Biklen dalam Moleong. 2007:11).

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data ini adalah penggolongan data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang akan dianalisis sebelumnya dikumpulkan (*data collection*), data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari kuesioner, wawancara, dan dokumentasi dari 24 PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten.

2. Tahapan Analisis Data

Tahap analisis data Model Miles and Huberman Miles and Huberman (Sugiyono, 2011:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data setelah pengumpulan data, antara lain data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan data *verification* (verifikasi data). Proses analisis data tersebut digambarkan 3.1.01 sebagai berikut:



Gambar: 3.1.01
Proses analisis data Model Miles and Huberman
Sumber: Miles and Huberman (Sugiyono, 2011:328).

a. Pengumpulan dan Teknik Penggolongan data

1) Pengumpulan data

Milles B. dan A. Michael (Sugiyono, 2011: 328) menyatakan penggolongan data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data disesuaikan dengan fokus penelitian. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi; (2) mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. Dengan demikian diharapkan data yang didapat mengarah pada tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Data hasil wawancara digolongkan dengan mengelompokkan jawaban dari responden yang dianggap sama. Data hasil kuesioner, jawaban tiap butir soal mendapat skor pada masing-masing alternatif jawaban.

2) Teknik Pengolahan dan Penggolongan data

Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesiapan di antara 24 PTKIS peneliti mengklasifikasikan subjek menjadi 4 alternatif jawaban, yaitu: ST (sangat sering) mendapat skor 4, T (tinggi) mendapat skor 3, C (cukup) mendapat skor 2, dan K (kurang) mendapat nilai 1.

Rentang Nilai R Kesiapan:

3.50 - 4.00 = Sangat Tinggi

2.80 - 3.49 = Tinggi

2.00 - 2.79 = Cukup

1.00 - 1.99 = Kurang. (Zainal Arifin 2009:257)

Adapun penggolongan/pengklasifikasian dilakukan dengan membuat norma terlebih dahulu. Norma tersebut diketahui dengan mencari tahu standar deviasi dan mean. Hasil data kuesioner dianalisis dengan menjumlahkan skor jawaban kemudian dihitung dalam bentuk presentase. melalui rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{Asp-1+Asp-2+Asp-3+Asp-4}{4} = NRK$$

Dimana:

K = Kesiapan

Asp-1 = Penafsiran/intrepetasi

Asp-2 = Penengoganisasian

Asp-3 = Rancangan Strtegi

Asp-4 = Faktor-faktor

NRK = Nilai Rata-rata Kesipan (Ali 1993:148)

Berdasar pada, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari:

- 1) Verifikasi Data; Kuesioner dikumpulkan kemudian dicek tentang kelengkapan jawaban responden pada tiap item berdasarkan pedoman jawaban kuesioner.
- 2) Tabulasi Data; Tabulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran mengenai frekuensi tiap option dalam setiap item, sehingga terlihat jelas frekuensi jawaban tersebut.
- 3) Persentase Data; Persentase data digunakan untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban dalam kuesioner yang dihitung dalam jumlah persentase, karena jawaban pada setiap kuesioner berbeda. Ali (1985: 184) mengemukakan bahwa rumus untuk menghitung persentase, yaitu:
% = dimana : %: Persentase (jumlah persentase yang dicari)
n : Nilai yang diperoleh
N : Jumlah seluruh nilai 100 : Bilangan tetap

b. Penyajian data (data display).

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

Penyajian Data, dilakukan setelah penggolongan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sugiyono (2010) menyatakan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Penelitian ini menggunakan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk rangkuman secara deskriptif dan sistematis dari hasil yang diperoleh, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; dan setiap rangkuman diberikan penjelasan dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Diharapkan dari data yang diperoleh akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, data dapat terorganisir dan terdapat pola hubungan dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Reduksi data

Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

d. Verifikasi dan Penafsiran data

Langkah yang terakhir adalah verifikasi data atau menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang saat penelitian berada di lapangan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: (1) menguji kesimpulan yang diambil dengan membandingkan teori yang dikemukakan pakar, terutama teori yang relevan; (2) melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan pemberian kuesioner, wawancara, dan dokumentasi; (3) membuat

kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang dirumuskan dan berupa temuan baru.

Penafsiran dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap jawaban pada pertanyaan yang diajukan. Kriteria penafsiran data untuk kepentingan penelitian ini adalah merujuk pada pendapat Riduwan (2010:41), yang penulis sarikan sebagai berikut :

81% - 100%	= Sangat diterapkan
61% - 80%	= Diterapkan
41% - 60%	= Cukup diterapkan
21% - 40%	= kurang diterapkan
0% - 20%	= Sangat kurang diterapkan

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (statement) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek.

Selanjutnya uraian makna itu sendiri akan memperlihatkan tema-tema makna (*meaning themes*) yang menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Serta aspek penting lain yang dianalisis dalam fenomenologis adalah penjelasan holistik dan umum tentang sebuah pembicaraan dengan subjek penelitian. Dari penjelasan umum tersebut harus ditarik keterkaitan antar makna yang dikembangkan pada setiap topik yang dibicarakan

selama proses wawancara berlangsung (*general description of the experience*).

Menurut Kirk dan Miller, (Moleong Lexy 1996:42), bahwa keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan *prosedur fieldnote* atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan.

Dalam hal Penarikan kesimpulan, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi. Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (*statement*) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek.

Selanjutnya uraian makna itu sendiri akan memperlihatkan tema-tema makna (*meaning themes*) yang menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Serta aspek penting lain yang dianalisis dalam fenomenologis adalah penjelasan holistik dan umum tentang sebuah pembicaraan dengan subjek penelitian. Dari penjelasan umum tersebut harus ditarik keterkaitan antar makna yang dikembangkan pada setiap topik yang dibicarakan selama proses wawancara berlangsung (*general description of the experience*).

Menurut Kirk dan Miller, (Moleong Lexy 1996:42), bahwa keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai

data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan prosedur fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan.

4. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas (Sugiyono 2010). Uji keabsahan data dalam metode kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dan atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara, berikut:

1) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan selain peneliti melakukan pengamatan, peneliti juga mencari data mengenai kebijakan penerapan SKPI dari *website* Kemendikbud/ristek Dikti.

Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis terutama berkaitan dengan proses sosialisasi, pelatihan guru, dan sekolah *pilot of project* penerapan SKPI. Peneliti melakukan pengecekan apakah data sudah benar atau tidak disesuaikan dengan data yang diperoleh dari Kemendikbud sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Data yang telah ditemukan dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Bahan referensi dalam penelitian ini berupa dokumentasi surat undangan

sosialisasi penerapan SKPI yang diperoleh oleh responden serta sertifikat peserta *In House Training* penerapan SKPI yang dapat menunjukkan bahwa responden benar-benar telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan penerapan SKPI .

b. Uji Transferabilitas

Pengujian transferabilitas atau keteralihan menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif maka peneliti membuat laporan yang rinci, jelas, dan sistematis. Laporan penelitian ini dibuat dengan rinci dan jelas berisi data-data lengkap mengenai hasil penelitian mulai dari hasil wawancara, hasil kuesioner, dan dokumentasi berupa foto kegiatan dan sertifikat keikutsertaan dalam sosialisasi penerapan SKPI serta menggunakan kata-kata efektif dalam penyajian data sehingga mudah dibaca.

c. Uji Dependabilitas

Pengujian dependabilitas atau kebergantungan dilakukan untuk mengatasi kesalahan pada konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas penelitian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses audit dilakukan oleh auditor yang independen yaitu dosen pembimbing penelitian.

Dosen Ahli/pembimbing melakukan melakukan proses audit dimulai dari bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan bukti keseluruhan proses, maka dependabilitas penelitiannya dapat diragukan.

Proses peneliti menentukan masalah/fokus dapat dibuktikan dari surat pengajuan tema skripsi yang diberikan kepada pembimbing. Proses memasuki lapangan dapat dibuktikan peneliti dari surat perijinan penelitian dari pihak

fakultas, dinas pendidikan dan surat telah melakukan penelitian dari tiap sekolah. Proses menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan dapat dibuktikan dari catatan bimbingan yang dilakukan peneliti bersama pembimbing.

d. Uji Konfirmabilitas

Pengujian konfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila telah disepakati banyak orang. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Hasil penelitian ini telah dikaitkan dengan proses penelitian dan telah disepakati untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang penelitian. Hasil penelitian yang telah disepakati dari peneliti dan pembimbing dan telah dikaitkan dengan proses penelitian dianggap telah memenuhi standar konfirmabilitas.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan upaya penelitian benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Beberapa teknik keabsahan data ialah:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Hal ini dilakukan agar mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

b. Ketekunan/keajegan

Ketekunan/keajegan memiliki arti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan apa yang dikatakan orang lain dengan apa yang dikatakan oleh subjek penelitian dan membandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan.

1) Triangulasi dengan Sumber Data

Pada teknik ini peneliti membandingkan informasi yang diperoleh pada latar penelitian melalui sumber yang berbeda yaitu informasi yang diperoleh dari informan dicek silang dengan informan serupa dari informan lain. Suatu informasi diakui kebenarannya apabila disepakati oleh para informan.

2) Triangulasi dengan Metode Pengumpulan Data

Triangulasi dengan metode yang dimaksud adalah pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Melalui teknik ini peneliti membandingkan antara data yang diperoleh dari sumber yang sama tetapi metode yang digunakan berbeda, yaitu data hasil dokumen/pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.

3) Melakukan Diskusi dengan Teman Sejawat

Diskusi dengan teman sejawat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan data yang dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang terkait. Biasanya dilakukan dengan cara konsultasi dengan sesama rekan mahasiswa, dosen/pejabat yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, dan dosen pembimbing

4) Melakukan Pengecekan Nara Sumber (Membercheck)

Membercheck adalah, proses pengecekan kebenaran data yang di diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya

adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang dikemukakan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel dan dapat dipercaya secara ilmiah, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah arar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Pengecekan nara sumber *membercheck* menunjukan adanya upaya yang melibatkan informan ahli atau informan kunci dalam memeriksa data yang telah disimpulkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persepsi peneliti tentang data yang dikumpulkan adalah cocok atau tidak cocok.

6. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian juga dibuat sistematis dengan isi/substansi dari laporan disajikan secara urut sesuai dengan fokus dan kisis-kisi penelitian yaitu:

- a. Deskripsi penafsiran atau intrepretasi kebijakan penerapan SKPI dilingkungan PTKIS;
- b. Deskripsi pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS;
- c. Deskripsi aplikasi strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS;
- d. Deskripsi, faktor-faktor yang menjadi, dan Solusi dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS;



BAB IV

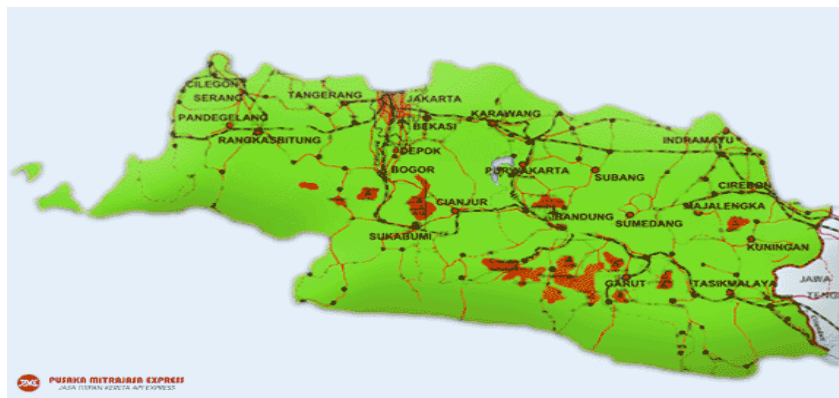
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

5. Profil KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS), dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 74 Tahun 1982, setelah melalui beberapa kali penyempurnaan. Sampai saat ini, status Kopertais masih tetap sebagai lembaga non struktural. Kopertais Wiyah II Jawa Barat dan Banter merupakan salah satu kopertais dari 14 Kopertais diwilayah Indonesia.

Wilayah kerja Kopertais II, mecakup dua Propinsi yaitu Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, sebagaimana tampak pada gambar, 4..1.01, berikut:



Gambar, 4.1. 0.1. Peta Propinsi Jawa Barat dan Banten

Sumber: Dokumen Kopertais Wilayah II

Sampai saat ini, keberadaan PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, tidak kurang dari 117 PTKIS, (288 Program Studi), meliputi: 98 Sekolah Tinggi, 8 Institut, dan 11 Universitas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2, berikut:

Tabel 4.1.01
Data Potensi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Tahun 2018

No	Jenis PTKI	Jumlah	Prosen
1	Sekolah Tinggi Agama Islam	98	83.75 %
2	Institut Agama Islam	8	6.83 %
3	Universitas Islam	11	9.42 %
	Jumlah	117	100.00 %

Sumber: Data Statistik Kopertais Wil. II Jabar-Banten, 2018
diolah oleh peneliti.

Data tabel 4.1.01, menunjukkan bahwa jumlah PTKIS di lingkungan KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten, sebagian besar didominasi oleh STAI 98 (83, 75 %), Institut 8 (6.83 %), Universitas 11 (9.42%), yang pada umumnya berada di daerah.

6. Profil 24 Perguruan Tinggi Keamaan Islam Swasta (PTKIS) Wilayah II Jawa Barat dan Banten

Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, selanjutnya dalam penelitian ini disingkat PTKIS, dahulu disebut Pendidikan tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, bertujuan untuk menghasilkan ahli-ahli agama Islam yang bermutu dan bermanfaat bagiserta untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan budaya Islam guna meningkatkan taraf kehidupanserta memperkaya kebudayaan nasional (Rahim, 2001: 149).

Penelitian ini dilakukan di 24 PTKIS, berada di Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Adapun waktu dilaksanakan penelitian ini dimulai bulan Maret sampai Bulan Juni 2018. Objek Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI, subjek penelitian ini adalah para penyelenggara PTKIS di seluruh PTKIS yang menjadi sampel penelitian, tampak pada tabel 4.1.02, berikut:

Tabel 4.1.02
Lokasi PTKIS Objek Penelitian

No	Nama PTKIS	Kualifikasi	Alamat
1	2	3	4
1.	FAI Universitas Mathlauul Anwar	Univ	Sindang Hayu Saketi Kab. Pandeglang Banten
2.	IAIB Serang	Ins	Jl. Ki Fathoni no 12/51 depan Masjid Agung Serang.
3.	STAI Latansa Mashiro	ST	Jl. Soekarno-Hatta (By Pass) Pasirjati Rongkasbitung-Lebak
4.	STAI Fatahilah	ST	Jln. Raya Puspitek (depan Masjid Agung) Serpong Kota Tangerang
5.	FAI Univ Juanda	Univ	Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor 16720 Telp. (0251) 243357, 240773
6.	IAIN Laroiba	Ins	Jl, Raya Leuwiliang No. I Kab. Bogor
7.	STAI Al-Karimiyah	ST	Jl. H. Maksum No. 52 Sawangan Depok
8.	STAI Karisma	ST	Jl. Raya Siliwangi No. 39 Curug, Sukabumi, Jawa Barat
9.	STAI Sukabumi	ST	Jl. Veteran I No. 36 PO BOX 19 Sukabumi 43 11 1 Jawa Barat
10.	STAI Nurul Hikmah	ST	Jln. Pertigaan Pasir Hayam No. 32 Cilaku Cianjur 43285
11.	STAI Agus Salim	ST	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kali Ulu RT 003/001 Tanjungsari-Cikarang Utara
12.	STAI Ass Sidiqiyah	ST	Ponpes As-shiddiqi yah Desa Kecamatan Cilamaya Kulon Karawang-Prop Jawa Barat
13.	STAI DR. KHE. Z Muttaqin	ST	Jl. Baru Maracang (Jl. Srikandi) No. 35, Purwakarta
14.	STAI Riyadul Jannah	ST	Jl. Raya Jalancagak No. 44, Subang
15.	STAIS Dharma	ST	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1/1 Segeran Kidul Juntinyuat Ibramayu
16.	STAI Cirebon	ST	Komplek Islamic Centre Jl. Tuparev No. 111 Cirebon
17.	FKIS UNSIA	Univ	Mayasih Cigugur Kuningan

1	2	3	4
18.	STAI Miftahul Huda Al Azhar	ST	Jl.PesantrenNo.2 Citangkolo Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Banjar
19.	STAI Putra Galuh	ST	Jalan Raya Banjar No. 141 KM.3 Cijantung Cijeungjing
20.	STAINU Tasikmaya	ST	Jl. DR. Sukardjo No. 47 Tasikmalaya
21.	IAIC Cipasung	Ins	Jl. Mukhtamar NU No. 1 Tasikmalaya Pon.Pesantren Cipasung
22.	STAI Siliwangi Garut	ST	Jl. Raya Tutungan No. 117 Leles Garut
23.	STAI Al-Falah	ST	Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka Kab Bandung
24.	STAI Siliwangi Cimahi	ST	Jl. Ters. Jend. Sudirman Kb Rumput Kota Cimahi

Sumber: Data Statistik Kopertais Wil. II Jabar-Banten, 2018

Dari tabel 4.1.2, diketahui bahwa objek penelitian (lokus), ini, dilaksanakan di 24 PTKIS, terdiri 3 Universitas, 3 Institut, dan 19 STAI. Tersebar di propinsi Banten 1 Universitas, 1 Insitut, dan 2 STAI . di Probinsi Jawa Barat 2 Universitas, 2 Insitut, dan 18 STAI. Ke 24 objek tersebut sebagai berikut:

a. FAI Universitas Matlaul Anwar Pandeglang (LP-1)

Fakutas Agama Islam, Univesitas Mathlaul Anwar, berdomisili di Jalan Sindang Hayu No. 11, Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. berdiri berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar SK PBMA No. 84/A/II/1988. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 54 Tahun 1991 tentang Status Terdaftar Program Studi Syariah Ahwal Asy-Syaksiyah Perubahan nama dari STISMA menjadi STAIMA SK PBMA No. 154/SK/PBMA/VIII/1994, dan SK MENAG RI No. 265 Tahun 1995 Tanggal 16 Juni 1995, tentang Program Studi Syariah/Asy dan Program Tarbiyah/PAI); Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan mahasiswa 496 mahasiswa, alumni sebanyak 125, dibina dan dikembangkan oleh 41 tenaga Dosen, dan 10 tenga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 125 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil FAI UNMA Pendeglang dapat dilihat pada tabel 4.2.0.1, berikut:

Tabel 4.2.01
Profil FAI UNMA Pandeglang Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Huk Keluarga/ C	14	3	1	2	1	167	39
2	Ekonomo Syariah/C	16	3	1	2	1	148	25
3	Pend Agama Islam/C	21	4	1	4	1	281	66
	Jumlah	41	10	3	8	3	496	125

Sumber: Profil FAI Univesitas Mathlaul Anwar Tahun 2018.

b. Insitut Agama Islam Banten (LP-2)

Institut Agama Islam Banten (IAIB) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di indonesia yang berbentuk Institut, termasuk kedalam Kopertais wilayah II. Kampus ini telah beridiri sejak 1 Februari 1987 dengan Nomor SK PT 01 Tahun 1987 dan Tanggal SK PT 1 Februari 1987, Institut ini beralamat di Jl. Ki Fathoni No. 12/51 Pegantungan, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. IAIB, terdiri dari 3 Jurusan/program studi Tafsir Hadist, Perbandingan Agama, dan Pendidikan Agama Islam. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan mahasiswa 1181 mahasiswa, dibina oleh 109 tenaga Dosen, dan 22 tenga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 271 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil IAIB dapat dilihat pada tabel 4.2.02, berikut:

Tabel 4. 2.02
Profil IAIB Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Std Agama-Agama/C	12	3	1	2	1	143	19
2	Tafsir Hadist/C	14	3	1	5	1	167	15
3	Perband Agama/C	16	3	1	5	1	148	16
4	KPI/C	33	2	1	6	1	155	13
5	Pend Agama Islam/C	22	7	1	2	1	402	162
6	Hk.Keluaca /C	12	3	1	2	1	166	16
	Jumlah	109	21	6	22	6	1181	271

Sumber: Profil IAIB Tahun 2018. (diolah oleh peneliti)

c. STAI Latansa Mashiro (LP-3)

STAI LaTansa Mashiro Rangkasbitung Lebak merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia yang berbentuk Sekolah Tinggi, dikelola oleh Kementerian Agama dan termasuk kedalam kopertis wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam La Tansa Mashiro ini telah berdiri sejak 28 November 2002 dengan Nomor SK PT Dj.II/400/2002 dan Tanggal SK PT 28 November 2002, Sekolah Tinggi ini beralamat di Jl Soekarno Hatta (By Pass) Pasirjati Rangkasbitung kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Memiliki tiga jurusan/prodi. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan mahasiswa 373 mahasiswa, dibina oleh 38 tenaga Dosen, dan 9 tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 53 sarjana S-1.

Untuk lebih jelasnya profil LaTansa Mashiro dapat dilihat pada tabel 4.2.03 berikut:

Tabel 4. 2.03

Profil STAI LaTansa Mashiro Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapas			Mahs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/ B	15	3	1	3	1	267	41
2	PIAUD S1 /C	12	3	1	2	1	108	12
3	Ekonomi Syariah /C	13	3	1	2	1	98	9
Jumlah		38	9	3	7	3	373	53

Sumber: Profil STAI La Tansa Mashiro Tahun 2018.

d. STAI Fatahillah (LP-4)

STAI Fatahillah Serpong merupakan salah satu Perguruan Tinggi PTA Islam Swasta di Indonesia yang berbentuk Sekolah Tinggi, dikelola oleh Kementerian Agama dan termasuk kedalam kopertis wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Kampus ini telah berdiri sejak 20 Maret 2000 dengan Nomor SK PT E/35/2000. Sekolah Tinggi ini beralamat di Jl Raya Puspiptek Serpong No.135 (Belakang Masjid Agung Al Mujahidin Serpong), Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Memiliki dua jurusan/prodi. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan mahasiswa 465 mahasiswa, dibina oleh 27 tenaga Dosen, dan 6 tenaga

kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 53 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Fatahillah dapat dilihat pada tabel 4.2.4, berikut:

Tabel 4.2.04
Profil STAI Fatahillah Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/C	15	3	1	4	1	376	41
2	Muamalah /C	12	3	1	3	1	108	12
	Jumlah	27	6	2	7	3	373	53

Sumber: Profil STAI Fatahillah Serpong Tahun 2018.

e. STAI Al-Karimiyah (LP-5)

STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok Terletak di Kota Depok-Prop. Jawa Barat-Indonesia, Kampus ini Merupakan Sebuah Sekolah Tinggi PTA Islam Swasta di Jawa Barat dan Termasuk dari kopertis wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Beralamat di Jl. H. Maksu No. 23 Sawangan Baru RT/RW. 004/002 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawang dengan Kodepos : 16511, Kalian Dapat Menghubungi Kantor Sekolah Tinggi di nomor 0251 8617335, dengan no FAX (0251 8617335) atau Alamat Email: stai.alkarimiyah@gmail.com. STAI Al-Karimiyah, memiliki dua jurusan/prodi. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan mahasiswa 412 mahasiswa, dibina oleh 28 tenaga Dosen, dan 6 tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 76 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Al-Karimiyah dapat dilihat pada tabel 4.2.05, berikut:

Tabel 4. 2.05
Profil STAI Al-Karimiyah Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/C	16	3	1	3	1	311	46
2	Muamalah /C	12	3	1	3	1	101	30
	Jumlah	28	6	2	6	2	412	76

Sumber: Profil STAI Al-Karimiyah Tahun 2018.

f. FPSI Univ Juanda (LP-6)

Fakultas Pendidikan dan Studi Islam Universitas Djuanda Bogor adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor berada dibawah naungan Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1987. Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor 16720. Telp. (0251) 243357, 240773. Fax. (0251) 240985

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang didirikan pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Djuanda Bogor Nomor 048/2011 tanggal 28 April 2011 yang didalamnya mengelola 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Kependidikan Islam/Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada awalnya Program Studi Kependidikan Islam berada dibawah naungan Fakultas Pendidikan dan Studi Islam yang berdiri pada tahun 1995 berdasarkan keputusan Kementerian Agama Islam No.137/1995. Sedangkan perubahan nama Program Studi Kependidikan Islam menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.1429 Tahun 2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012. FPSI-UNIDA, pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan mahasiswa 402 mahasiswa, dibina oleh 42 tenaga Dosen, dan 9 tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 78 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil FPSI-UNIDA dapat dilihat pada tabel 4.2..06, berikut:

Tabel 4. 2.06

Profil FPSI-UNID Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Manaj Pendidikan Islam/B	19	3	1	3	1	163	42
2	Manaj. Dakwah/C	11	3	1	3	1	141	15
3	Ekonomi Syariah S1/C	12	3	1	2	1	108	21
	Jumlah	42	9	3	8	3	402	78

Sumber: Profil FPSI-UNIDA Tahun 2018.

g. IAIN Laroiba (LP-7)

IAIN Laa Roiba Bogor merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 22 Oktober 1995, kampus ini beralamat di Jl. Kampung Setu Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor 16640, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. yang berbasis research, berkomitmen untuk terus mencetak para sarjana yang siap pakai. Kampus Laa Roiba terdiri dari tiga kampus, kampus I di Leuwiliang, kampus II di Cibinong dan kampus III di Parung Panjang. Memiliki enam Program Studi. Pada tahun Akademik 2017/2018 IAIN Laroiba, membina 964 mahasiswa S-1 dan S-2, dibina dan dikembangkan oleh 88 Dosen dan 19 orag tenaga kependidikan. Pada tahun ini meluluskan 118 Sarjana: 99 sarjana S-1 dan 19 sarjana S-2.

Untuk lebih jelasnya profil IAIN Laa Roiba Bogor dapat dilihat pada tabel 4.2.0.7, berikut:

Tabel 4. 2.07

Profil IAIN Laa Roiba Bogor Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mahs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Ek. Syariah S1 /C	19	3	1	3	1	163	12
2	Huk Keluarga S1 /C	11	3	1	3	1	144	15
3	Pend Guru MI S1/B	13	3	1	3	1	121	22
4	ManPend. Islam S1 /B	12	3	1	3	1	102	21
5	PAI- S1 /B	15	4	1	3	1	341	29
6	PAI S2 /B	18	3	1	3	1	113	19
	Jumlah	88	19	6	18	6	964	118

Sumber: Profil IAIN Laa Roiba Bogor Tahun 2018.

h. STAI Karisma (LP-8)

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kharisma berlokasi di Jalan Raya Siliwangi No. 39 Ciutara Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Kode Pos 43359. Telepon 0266736868. Faximile 0266736868. Saat ini STAI Kharisma memiliki dua jurusan, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. STAI Kharisma berdiri 30 Agustus 1995. Saat ini STAI Kharisma memiliki dua jurusan, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun Akademik 2017/2018,

membina dan mengembangkan 465 mahasiswa, dibina oleh 38 tenaga Dosen, dan 6 tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 122 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Kharisma dapat dilihat pada tabel 4.2.08, berikut:

Tabel 4. 2.08

Profil STAI Kharisma Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	R K	L a b		
1	Pend Agama Islam/B	15	3	1	3	1	367	97
2	PGMI /C	13	3	1	2	1	108	25
	Jumlah	28	6	2	5	2	465	122

Sumber: Profil STAI Kharisma Tahun 2018.

i. STAI Sukabumi (LP-9)

STAI Sukabumi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 26 September 1991, kampus ini beralamat di Jl. Lio Balandongan Sirnagalih No. 74 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabum, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. STAI Sukabumi memiliki 6 program Studi dengan program S1 5 prodi dan 1 program S2. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 964 mahasiswa S1 712 dan S2 163, dibina oleh 86 tenaga Dosen, dan 19 tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 198 sarjana: sarjan S-1.99 dan 29 sarjana S2. Untuk lebih jelasnya profil STAI Sukabumi, dapat dilihat pada tabel 4.2.09, berikut:

Tabel 4. 2.09

Profil STAI Sukabumi Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	R K	L a b		
1	Pen. Ag. Islam S2/B	15	4	1	3	1	163	12
2	PG PAUD S1/C	19	3	1	3	1	144	15
3	Pend Guru MI S1/B	11	3	1	3	1	121	22
4	Manj Haji&Umroh/B	13	3	1	3	1	102	21
5	Pen. Ag Islam S1/B	12	3	1	3	1	341	29
6	Ekomi Syaria,ah S1/B	16	3	1	3	1	113	19
	Jumlah	86	19	6	18	6	964	118

Sumber: Profil STAI Sukabumi Tahun 2018.

j. STIT Nurul Hikmah (LP-10)

STIT Nurul Hikmah Cianjur merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 20 April 2007, kampus ini beralamat di Komplek Pondok Pesantren Al-Fatmah Pertigaan Pasir Hayam No 32, Cianjur, Jawa Barat. STIT Nurul Hikmah, memiliki satu program studi S-1 Pendidikan Agama Islam. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 167 mahasiswa, dibina oleh 15 tenaga Dosen, dan 3 orang tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 43 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STIT Nurul Hikmah, dapat dilihat pada tabel 4.2.10, berikut:

Tabel 4. 2.10
Profil STIT Nurul Hikmah Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/ Terakreditasi C	15	3	1	3	1	167	43
	Jumlah	15	3	1	3	1	167	43

Sumber: Profil STAI Nurul Hikmah Tahun 2018.

k. STAI Agus Salim (LP-11)

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 5 November 2003, Kampus ini beralamat di Jl. Jend.Urip Sumohardjo Kali Ulu Rt.003/001 Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kode Post:-17530 Nomor Telp:-(021) 89114664 Fax:-(021) 89114664 Email:-staihascikarang@yahoo.co.id.

STAI. Haji Agus Salim memiliki dua jurusan/program studi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 463 mahasiswa, dibina oleh 26 tenaga Dosen, dan 6 tenaga kependidikan, meluluskan alumni sebanyak 121 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Haji Agus Salim dapat dilihat pada tabel 4.2.11, berikut:

Tabel 4. 2.11
Profil STAI Haji Agus Salim Cikarang Tahun 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/C	14	3	1	3	1	369	96
2	Hukum Ekonomi Syariah/C	12	3	1	2	1	104	25
	Jumlah	26	6	2	5	2	465	121

Sumber: Profil STAI Haji Agus Salim Tahun 2018

1. STAI As Siddiqiyah (LP-12)

STAI Asshiddiqiyah Karawang Berada di Kab. Karawang-Prop. Jawa Barat-Indonesia, Perguruan Tinggi ini bisa disebut Sebuah Sekolah Tinggi PTA Islam Swasta di Jawa Barat dan Bagian dari kopertis wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Beralamat di Dusun Krajan Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Kodepos: 41384, Kamu Dapat Mengontak Kantor Sekolah Tinggi di nomor 081314490111, dengan no FAX (0264) 8380220) atau Alamat Email: info@staias.ac.id, Kamu juga Dapat Mencari Informasi Lebih Lanjut di staias.ac.id/stai-asshiddiqiyah-karawang.ac.id.

STAI As Shiddiqiyah memiliki satu program studi S-1 Manajemen Pendidikan Islam. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 294 mahasiswa, dibina oleh 13 tenaga Dosen, dan 3 orang tenaga kependidikan, tahun ini akan meluluskan alumni sebanyak 53 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI As Shiddiqiyah, dapat dilihat pada tabel 4.2.12, berikut:

Tabel 4. 2.12
Profil STAI As Shiddiqiyah Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/ Terakreditasi C	13	3	1	5	1	294	53
	Jumlah	13	3	1	5	1	294	53

Sumber: Profil STAI As Shiddiqiyah Tahun 2018

m. STAI DR. KH. E. Z Muttaqin (LP-13)

STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 1 Juli 1987, kampus ini beralamat di, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Kode Post: Nomor Telp: (0264) 200092 Fax: Email: staimuttaqien@yahoo.co.id. STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, memiliki tiga program studi.

Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 528 mahasiswa, dibina oleh 35 tenaga Dosen, dan 10 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 79 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, dapat dilihat pada tabel 4.2.13, berikut:

Tabel 4. 2.13

Profil STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Tahun 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Ekomi Syari,ah /C	15	4	1	3	1	163	12
2	Hukum Keluarga/ C	19	3	1	3	1	144	15
3	Pen. Agama Islam/ B	11	3	1	3	1	221	52
	Jumlah	35	10	3	9	3	528	79

Sumber: Profil STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Tahun 2018.

n. STAIS Riydul Jannah Subang (LP-14)

STAI Riyadhul Jannah Subang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 30 Juni 2000, kampus ini beralamat di Jalan Raya Prapatan Bandung Jalancagak Subang Jawa Barat, Subang, Jawa Barat, Indonesia. STAI Riyadhul Jannah Subang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 30 Juni 2000, kampus ini beralamat di Jalan Raya Prapatan Jalancagak Subang Jawa Barat, Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kode Post: 41281 Telp: (0260) 471707 Fax: (0260) 471707 Email: stairsubang@gmail.com.

STAI ini memiliki tiga program studi. PAI, Ekomi Syari'ah, dan PG-MI. Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 565 mahasiswa, dibina oleh 38 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 112 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Riyadhul Jannah Subang dapat dilihat pada tabel 4.2.14 berikut:

Tabel 4. 2.14

Profil STAI Riyadhul Jannah Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Pend. Ag Islam,/ C	15	3	1	3	1	367	81
2	Ekonomi Syariah/C	12	3	1	2	1	108	22
3	Pend Guru MI/ C	11	3	1	2	1	98	19
	Jumlah	38	9	3	7	3	565	112

Sumber: Profil STAI Riyadhul Jannah Th. 2018 (diolah oleh peneliti)

o. STAIS Dharma (LP-15)

STAI Pangeran Dharma Kusuma Segaran merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 20 November 2003, kampus ini beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1/1 Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu Jawa Barat, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Kode Post :-45282.Telp :-0234 487575 Fax :-0234 485176 Email:stais_dharma@windowslive.com. STAI ini memiliki tiga program studi.

Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 513 mahasiswa, dibina oleh 42 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 141 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Pangeran Dharma Kusuma Segaran dapat dilihat pada tabel 4.2.15 berikut:

Tabel 4. 2.15

Profil STAIS Dharma Kusuma Tahun 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Pend. Agama Islam/B	15	3	1	3	1	411	101
2	Muamalah/C	13	3	1	2	1	107	23
3	Ekonomi Syariah/C	14	3	1	2	1	95	17
	Jumlah	42	9	3	7	3	513	141

Sumber: Profil STAIS Dharma Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

7. STAIC Cirebon (LP-16)

STAI Cirebon merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 27 Mei 1989 , kampus ini

beralamat di Komplek Islamic Centre Kab. Cirebon, Jl. Tuparev No. 111 Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Kode Post: 45153 Nomor Telp: (0231) 231816 Fax: (0231) 231816 Email: staic@staic.ac.id. STAI ini memiliki tiga program studi.

Pada tahun Akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 561 mahasiswa, dibina oleh 42 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 132 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Cirebon dapat dilihat pada tabel 4.2.16 berikut:

Tabel 4. 2.16
Profil STAI Cirebon Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Pend Agama Islam/B	15	4	1	4	1	365	101
2	Ahwalu Syakyyiah C	14	3	1	2	1	105	12
3	Pend.Guru MI/ C	13	3	1	2	1	91	9
	Jumlah	42	10	3	8	3	561	132

Sumber: Profil STAI Cirebon Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

p. FKIS UNSIA (LP-17)

Fakultas Keagamaan Islam Al-Ihya, dahulu STAI Al-Ihya Kuningan Terletak di Kab. Kuningan-Prop. Jawa Barat-Indonesia, Perguruan Tinggi ini Merupakan Sebuah PTKIS di Jawa Barat dan Termasuk dari kopertis wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Berlokasi di Jalan Mayasih Nomor 11 Kelurahan Cigugur Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan Kodepos : 45552, Kantor Sekolah Tinggi di nomor (0232) 873186, dengan no FAX ((0232) 873186) atau Alamat Email: stai@al-ihya.com, <http://stai.al-ihya.com>.

Fakultas Keagamaan Islam UNSIA, memiliki lima prodi, pada tahun akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 853 mahasiswa, dibina oleh 73 tenaga Dosen, dan 11 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 138 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil Fakultas Keagamaan Islam Al-Ihya dapat dilihat pada tabel 4.2.17 berikut:

Tabel 4. 2.17
Profil FKI UNSIA, Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	RK	L a b		
1	Pen. Agama Islam /B	15	4	1	3	1	341	79
2	Hukum Keluarga /C	19	3	1	2	1	163	25
3	Pend Guru MI /B	11	3	1	2	1	144	15
4	Kom. Peny Islam/C	13	3	1	2	1	124	12
5	Perbankan Syari,ah/C	15	3	1	2	1	102	17
	Jumlah	73	11	5	11	5	853	138

Sumber: Profil FKI UNSIA Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

q. STAI Putra Galuh (LP-18)

STAI Putra Galuh Ciamis merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 17 Desember 2007, kampus ini beralamat di Jalan Raya Banjar No. 141 KM 3 Cijantung Cijeungjing Ciamis, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Kode Post:46271, Nomor Telp: 0265777991, Fax:0265777991, Email:staipg_cms@yahoo.co.id. STAI Putra Galuh, memiliki tiga prodi. Pada tahun akademik 2017/2018, membina dan mengembangkan 565 mahasiswa, dibina oleh 39 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 153 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Putra Galuh Ciamis dapat dilihat pada tabel 4.2.19 berikut:

Tabel 4. 2.18
Profil STAI Putra Galuh Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	RK	L a b		
1	Pend. Guru MI/ C	15	3	1	4	1	108	41
2	Pend PIAUD/C	13	3	1	2	1	367	102
3	Perbankan Syari'ah C	11	3	1	2	1	98	10
	Jumlah	39	9	3	8	3	565	153

Sumber: Profil STAI Putra Galuh Th. 2018. (diolah oleh peneliti)

r. STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar (LP-19)

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar Dipimpin oleh Drs. KH. Muharir Ar.,

S.H.,M.Pd.I, merupakan Perguruan Tinggi Islam tertua di Kota Banjar dengan potensi yang luar biasa. Berkedudukan di Jl.Pesantren No.2, Langensari, Kujangsari, Kota Banjar, Dengan bangga menawarkan berbagai sarana pendidikan dan pengajaran guna meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia. beridiri sejak 1 Mei 2003. STAIMA, memiliki empat prodi.

Pada tahun akademik 2017/2018, STAIMA, membina dan mengembangkan 651 mahasiswa, dibina oleh 42 tenaga Dosen, dan 12 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 174 sarjana S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Putra Galuh Ciamis dapat dilihat pada tabel 4.2.19 berikut:

Tabel 4. 2.19

Profil STAIMA Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	R K	L a b		
1	Pend. Agama Islam/B	15	3	1	3	1	366	91
2	Pend. Guru MI/ C	12	3	1	2	1	109	62
3	Hukum Keluarga/C	13	3	1	2	1	98	19
4	Ekonomi Syari'ah/C	12	3	1	2	1	108	12
	Jumlah	42	12	4	9	4	651	174

Sumber: Profil STAIMA Tahun 2018. (diolah oleh peneliti)

s. STAINU Tasikmaya (LP-20)

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya merupakan satu dari sekian Kampus PTA Islam Swasta di Nusantara yang berwujud Sekolah Tinggi, dikelola oleh Kementerian Agama dan tercatat kedalam kopertis wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Kampus ini telah berdiri sedari tahun 4 September 2008 dengan Nomor SK PT Dj.I/302/2008 dan Tanggal SK PT 4 September 2008 , Sekolah Tinggi ini bertempat di Jl. Dr. Sukarjo 47, kota Kota Tasikmalaya. STAINU Tasikmalaya, memiliki tiga prodi. Pada tahun akademik 2017/2018, STAINU, membina dan mengembangkan 515 mahasiswa, dibina oleh 38 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 194 sarjana. 123 Sarjan S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAINU Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 4.2.20, berikut:

Tabel 4. 2.20

Profil STAINU Tasikmalaya Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Hukum Keluarga/C	11	3	1	3	1	91	19
2	Kom.Peny.Islam/C	12	3	1	2	1	103	12
3	Man Pend.Islam/B	15	3	1	2	1	331	92
	Jumlah	38	9	3	7	3	515	123

Sumber: Profil STAINU Tahun 2018. (diolah oleh peneliti)

t. IAIC Tasikmaya (LP-21)

Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta atau IAIC yang telah beridiri sejak 23 Desember 1965 , kampus ini beralamat di Jl. Mukhtar NU. No.1 Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. IAIC, memiliki 7 prodi.

Pada tahun akademik 2017/2018, IAIC, membina dan mengembangkan 994 mahasiswa, dibina oleh 93 tenaga Dosen, dan 21 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 194 sarjana S1, dan 39 S2. Untuk lebih jelasnya profil IAIC Cipasung Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 4.2.21, berikut:

Tabel 4. 2.21

Profil IAIC Cipasung Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1	Ek. Syari'ah S1/B	15	3	1	3	1	198	51
2	Huk. Keluarga S1/B	12	3	1	2	1	103	22
3	P.Agama Islam S1/B	13	3	1	2	1	367	29
4	KPI/S1/B	12	3	1	2	1	102	22
5	MPI S2/B	15	3	1	2	1	118	27
6	P.B.Arab S1/ B	12	3	1	2	1	103	22
7	P B. Arab S2/B	14	3	1	2	1	102	12
	Jumlah	93	21	7	15	7	994	194

Sumber: Profil IAIC Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

u. STAI Siliwagi Leles (LP-22)

STAI Siliwangi Garut merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 7 Desember 1976, Kampus ini Bisa dibilang Sebuah Sekolah Tinggi PTA Islam Swasta di Jawa Barat dan Bagian dari Kopertis Wilayah II Jabar Banten Ditjen Pendidikan Islam. Berlokasi di Jl. Raya Leles No. 117 Kab. Garut Kodepos: 44152, Anda Dapat Menghubungi Kantor Sekolah Tinggi di nomor (0262) 455000, dengan no FAX (0262) 455000 atau Alamat Email: staisgarut@yahoo.co.id,

STAI Siliwangi Garut, memiliki tiga prodi. Pada tahun akademik 2017/2018, STAI ini, membina dan mengembangkan 523 mahasiswa, dibina oleh 36 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 63 Sarjan S-1. Untuk lebih jelasnya profil STAI Siliwangi Garut dapat dilihat pada tabel 4.2.22, berikut:

Tabel 4. 2.22

Profil STAI Siliwangi Garut Tahun 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn	RK	Lab		
1	Pend. Agama Islam/B	13	3	1	3	1	121	41
2	Pend. RA/C	12	3	1	2	1	103	12
3	Prbakan Syariah/C	11	3	1	2	1	99	9
	Jumlah	36	9	3	7	3	523	63

Sumber: Profil STAI Siliwangi Garut Th. 2018. (diolah oleh peneliti)

v. STAI Al-Falah (LP-23)

STAI Al-Falah Cicalengka merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 15 Juni 1986, kampus ini beralamat di Jl Kapten Sangun no 6 Cicalengka Kab Bandung Prop. Jawa Barat. STAI ini, membina dan mengembangkan 321 mahasiswa, dibina oleh 36 tenaga Dosen, dan 9 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 97 Sarjan S-1.

Untuk lebih jelasnya profil STAI Al-Falah Cicalengka dapat dilihat pada tabel 4.2.24, berikut:

Tabel 4. 2.23
Profil STAI Al-Falah Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	R K	L a b		
1	Pend. Agama Islam/B	12	3	1	3	1	141	45
2	Kom. Peny. Islam/C	11	3	1	3	1	135	33
3	Hk.Keluarga (AS)/C	12	3	1	2	1	45	19
	Jumlah	35	9	3	8	3	321	97

Sumber: Profil Al-Falah Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

w. STAI Siliwangi Cimahi (LP-24)

STAI Siliwangi Cimahi Bandung merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 22 Desember 1971, kampus ini beralamat di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Kebon Rumput Kota Cimahi, Jawa Barat. STAI ini, memiliki 3 Prodi, membina dan mengembangkan 673 mahasiswa, dibina oleh 72 tenaga Dosen, dan 12 orang tenaga kependidikan, tahun ini meluluskan alumni sebanyak 134 Sarjan S-1.

Untuk lebih jelasnya profil STAI Siliwangi Cimahi dapat dilihat pada tabel 4.2.24, berikut:

Tabel 4. 2.24
Profil STAI Siliwangi Cimahi Tahun Akademik 2017/2018

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Kn t	R K	L a b		
1	Pend. Agama Islam/B	23	3	1	3	1	368	41
2	Pend. Guru MI/C	14	3	1	3	1	107	42
3	Tdr. Bhs Inris/C	13	3	1	2	1	95	29
4	Muamalah/C	12	3	1	2	1	103	22
	Jumlah	72	12	3	10	4	673	134

Sumber: Profil STAI Siliwangi Cimahi Th 2018. (diolah oleh peneliti)

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Data Informasi Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, unuk mendeskripsikan Kesiapan PTKIS dalam mendukung penerapan Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, fokus penelitian yaitu: (a)

00 Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI

intrepretasi atau penafsiran Kebijakan SKPI; (b) pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI; (c) rencana strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS; dan (d) faktor-faktor dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS. Atas dasar itu, maka dalam bagian ini akan dideskripsikan hasil Kesiapan PTKIS dalam mendukung penerapan Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yaitu:

a. FAI Universitas Matlaul Anwar Pandeglang (LP-1)

Fakutas Agama Islam Univesitas Mathlaul Anwar, (FAI-UNMA), sebagai lembaga pendidikan tinggi telah berdiri sejak tahun 1988, berdasarakan Keputusan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar SK PBMA No. 84/A/II/1988. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 54 Tahun 1991 tentang Status Terdaftar Program Studi Syariah Ahwal Asy-Syaksiyah (Syariah/AS); Perubahan nama dari STISMA menjadi STAIMA SK PBMA No. 154/SK/PBMA/VIII/1994, dan SK MENAG RI No. 265 Tahun 1995 Tanggal 16 Juni 1995, tentang Program Studi Syariah/Asy dan Program Tarbiyah/PAI); maka sejak itu, FAI-UNMA, sudah memiliki kewajiban untuk mengembangkan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Terkait dengan itu, FAI-UNMA, memiliki kewajiban menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, berdasarkan PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Berdasar pada hasil observasi tanggal 21 April 2018, sampai saat ini, FAI-UNMA, belum menerbitkan SKPI. Persoalannya, bagaimana FAI-UNMA, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan penerapan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 25 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan

yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya, bagaimana pihak FAI-Unma menafsirkan kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka. Berikut, penuturan Dekan FAI-UNMA, sebagai berikut:

"...sebenarnya Kami sangat memahami dan setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami lebih memprioritaskan pada kebijakan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi"ditutup atau merger. Hal ini bukan berarti mengesampingkan kebijakan SKPI dan menganggapnya tidak penting".(Wawancara dengan IF.1.1. Senin, 25 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Organisasi, merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; Melakukan pengorganisasian kebijakan biasanya terdapat permasalahan yang berhubungan dengan siklus kerja pada aktifitas organisasi, permasalahan kultur (pembenturan), adanya dominasi elit, pendanaan, kapasitas dan kompetensi fasilitator, serta birokrasi koordinasi administrasi. Tujuan pengorganisasian kebijakan yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya *"Capacity Building"*, pengembangan kapasitas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut menyebabkan pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan. Persoalannya, mengapa pihak FAI-UNMA sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan Wakil Dekan FAI-UNMA, sebagai berikut:

"...untuk hal itu, Kami dapat memahami bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku. Kami menyadari pula bahwa berkembang tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas SDM

dalam menggerakkan organisasi. Dari tingkat permasalahan hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Lesson yang diperoleh berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas, bagi Kami masih minim, itulah kemudian pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana” (Wawancara dengan IF.1.2. Senin, 25 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak FAI-Unma sampai saat ini, belum merancang strategi operasi kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan Ketua prodi PAI, FAI-UNMA, sebagai berikut:

“...Kami menyadari bahwa: “.strategi yang dapat dilakukan agar pengoperasian kegiatan dapat berjalan dari informing sampai ke tahap mourning adalah: menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan; memperhatikan basis kelompok, basis lintas kebijakan, mempertimbangkan kelembagaan lokal.”Namun demikian, terbentur oleh keadaan, diantaranya; waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan” (Wawancara dengan IF.1.3. Senin, 25 Juni 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Padahal masa lalu yang memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah yang dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya Fakultas Agama Islam Universitas Mathlul Anwar, (FAI-UNMA), sebagai lembaga pendidikan tinggi telah berdiri sejak

tahun 1988, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan.

Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kesiapan melaksana kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, sebagaimana dipaparkan oleh Wadec III FAI-Unma; Penuturannya, sebagai berikut:

"...Kami menyadari bahwa: Lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1988, bahkan telah meluluskan alumni lebih dari seribuan. Namun kondisi yang memaksa seperti halnya, pada tahun akademik 2017/2018, ini, Kami membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 496 mahasiswa, meluluskan alumni sebanyak 125, dibina dan dikembangkan oleh 51 tenaga Dosen, dan 12 tenaga kependidikan, mereka kebanyakan tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa" (Wawancara dengan IF.1.4. Senin, 25 Juni 2018).

Pada prinsipnya FAI UNMA, memahami, dan mendukung pentingnya kebijakan penerapan SKPI, namun keterbatasan dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Insitut Agama Islam Banten (LP-2)

Institut Agama Islam Banten (IAIB) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang berbentuk Institut, termasuk kedalam Kopertais wilayah II. Kampus ini telah beridiri sejak 1 Februari 1987 dengan Nomor SK PT 01 Tahun 1987 dan Tanggal SK PT 1 Februari 1987. IAIB memiliki 3 fakultas, 6 jurusan/program studi, 476 mahasiswa, dibina dan dikembangkan oleh 109 dosen dan 21 orang tenaga administrasi. (Profil IAIB tahun 2018).

Apabila dilihat dari pendiriannya IAIB, merupakan PTKIS tertua di wilayah Banten, maka sejak itu, IAIB, memiliki kewajiban untuk mengembangkan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Seiring dengan perkembangan, IAIB memiliki kewajiban menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, berdasarkan PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Berdasar pada hasil observasi tanggal 21 April 2018, sampai saat ini, IAIB, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi

pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana IAIB, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 26 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak IAIB, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal l kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami , khususnya di lingkungan IAIB, stelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Izajah dan transip nilai"(Wawancara dengan IF.2.1. Senin, 26 Juni 2018).

Untuk itu, Dekan Fak Tarbiyah, menambahkan: *"... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksananak, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu menjadi tanggungjawab Kami unuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami lebih fokus pada kewajiban prioritas yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019, apabila Kami tidak melakukannya maka akan kena sanksi ditutup atau merger. (Wawancara dengan IF.2.2. Selasa, 26 Juni 2018).*

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian Kebijakan, (Kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan Kebijakan, hal ini berlaku pada semua Kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak IAIB, sampai saat ini, belum mengorganisasikan Kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Rektor II, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, mempertimbangkan tingkat permasalahan yang mungkin dihadapi hingga bisa sampai ke tujuan yang ingin dicapai, diperoleh adanya suatu pemisah antara gagasan dan realita. Pelajaran yang diperoleh dari itu berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.2.3. Selasa, 26 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak FAI-Unma sampai saat ini, belum merancang strategi operasi kebijakan SKPI, yang kewajiban itu melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Dekan Fakultas Syariah IAIB, sebagai berikut:

"...Kami memahami bahwa: ".strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki

oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.2.4, Selasa, 26 Juni 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya IAIB, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1978, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa IAIB, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Warek II IAIB, sebagai berikut:

“...betul, lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1978, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan yang mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi./lancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami , yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 521 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 211, dibina dan dikembangkan oleh 109 tenaga Dosen, dan 21 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga” dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini.(Wawancara dengan IF.1.2. Seelasa, 25 Juni 2018).

Pada prinsipnya IAIB, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan kebijakan tersebut.

c. STAI Latansa Mashiro (LP-3)

STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung Lebak merupakan salah satu PTKIS berbentuk Sekolah Tinggi, termasuk kedalam

kopertis wilayah II Jabar Banten kerja Kopertai II Jawa Barat dan Banten. Apabila dilihat dari segi performen kampus, STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung Lebak dpat dikatakan cukup memadai dan representatif Sekolah Tinggi Agama Islam La Tansa Mashiro ini telah berdiri sejak 28 November 2002 dengan Nomor SK PT Dj.II/400/2002 dan Tanggal SK PT 28 November 2002, beralamat di Jl Soekarno Hatta (By Pass) Pasirjati Rangkasbitung Lebak-Banten, kabupaten/kota Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Memiliki tiga jurusan/prodi, dengan 565 mahasiswa tahun ini meluluskan 53 sarjana S-1, yang dibina dan dikembangkan oleh 38 dosen dan 9 tenaga kependidikan/administrasi (Observasi, tanggal 24 April 2018).

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan aka mutu dan akuntabilitas PT, STAI La Tansa Mashiro memiliki kewajiban menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, berdasarkan PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Berdasar pada hasil observasi tanggal 24 April 2018, sampai saat ini, STAI La Tansa Mashiro belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI La Tansa Mashiro, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 29 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI La Tansa Mashiro, belum menafsirkan kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal l kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januri 2016, maka sejak itulah STAI La Tansa Mashiro memiliki kewajiban

untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...pada dasarnya Kami memahami bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, pertanyaan Kami, bahkan mungkin sama dengan teman-teman PTKIS lain, mengapa kebijakan itu tidak operasional/kewajibannya bersamaan dengan izajah, padahal setelah Kami kaji pasal demi pasal kewajiban PTKIS, tentang itu, tidak terpisahkan. Bagi Kami PTKIS kecil boleh dibilang sebagai pendatang baru, biasanya Kami manut mengikuti ramennya pasar dalam istilah bahasa ekonominya. Atas dasar itulah sehingga "anggapan sementara" tentang SKPI dianggap tidak penting. Tidak sepentingnya blanko ijazah, NIRL, dan sejenisnya"(Wawancara dengan IF.3.1. Jum'at, 29 Juni 2018).

Wakil Ketua I, menabahkan: "...Lazimnya sebuah kebijakan baru ketika hendak diberlakukan dilengkapi dengan informasi lengkap (juklak/juknis); sebuah kebijakan dilengkapi pula dengan adanya ancaman (bagi izajah yang ditandatangani oleh Rektor/dekan/ketua STAI/ketua prodi yang tidak ber NIDN, dianggap tidak syah, apalagi prodinya tidak terakreditasi), biasanya kebijakan baru bagi PTKIS, begitu akan atau harus dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami. Sehingga dalam hal ini, bukan berarti "Kami tidak siap" untuk mengimplementasikan/menerapkan kebijakan SKPI, yang menjadi kewajiban Kami" (Wawancara dengan IF.3.2. Jum'at, 29 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI La Tansa Mashiro, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua III, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sepakat bahwa pengembangan kapasitas dalam menyikapi kebijakan KMA no.1/2016, sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI,

sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, Pelajaran yang dapat diambil dari kebijakan tersebut adalah pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan sampainya pada tujuan/hasil yang optimal, memang hal itu tidak mudah, karena hal itu memerlukan pemikiran yang dinamis, hal itu belum Kami miliki. Itulah barangkali menjadi kelemahan Kami, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana". (Wawancara dengan IF.3.3. Jum'at, 29 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa sekelas STAI La Tansa Mashiro, sampai saat ini, belum memiliki strategi nerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Kaprodi PAI, sebagai berikut:

"...pada dasarnya Kami memahami bahwa: "strategi pengoperasian kegiatan memerlukan beberapa pertimbangan agar program atau kebijakan bisa terlaksana, dalam hal ini pengoperasian penerapan kebijakan SKPI, untuk kegiatan itu, Kami sependapat agar kegiatan dapat berjalan dan dapat dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami. Namun dibalik itu, Kami dihadapkan pada keadaan utamanya, sumberdaya yang harus Kami persiapkan, atau barangkali pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, persoalan sarana, prasarana, dan dana bagi Kami tidak menjadi persoalan. dan ternyata walaupun, strategi telah dirancang, dana tersedia untuk mengoperasikan kebijakan ini, upaya tersebut sia-sia dan kandas di tengah jalan, karena Kami belum memiliki SDM yang mumpuni dan yang diandalkan untuk menangani persoalan itu. (Wawancara dengan IF.3.3. Jum'at, 29 Juni 2018).

4) Aspek kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Kekuatan organisasi dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI La Tansa Mashiro, dapat dikatakan sebagai PTKIS yang potensial dalam masalah pendanaan, Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI La Tansa Mashiro, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa

saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI La Tansa Mashiro, sebagai berikut:

"..., sebagaimana telah disampaikan sebelumnya menyakut persoalan dana untuk mengoperasionalkan program SKPI, sampai pada tangan alumni, bagi Kami hal itu bukan berarti Kami "memamerkan kesombongan" Namun yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan, pertama; menyangkut kesiapan individu, sikap dan pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. keterampilan, dalam memperoleh dan menggali informasi (kreatifitas) dalam menyikapi kebijakan yang segera dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.3.4. Jum'at, 29 Juni 2018).

Pada prinsipnya STAI La Tansa Mashiro, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun dan kondisi keterbatasan SDM yang memaksa mereka belum siap melaksanakan kebijakan tersebut.

d. STAI Fatahillah Serpong (LP-4)

STAI Fatahillah Serpong merupakan salah satu PTKIS yang berbentuk Sekolah Tinggi, dikelola oleh Kementerian Agama dan termasuk kedalam kopertis wilayah II Jabar Banten/Ditjen Pendidikan Islam. Kampus ini terdiri dari 2 program Studi PAI dan muamalah, tahun ini membina mahasiswa tidak kurang dari 465 mahasiswa, dibina dan dikembangkan oleh 38 Dosen dan 38 tenaga administrasi.

Berdasar pada hasil observasi tanggal 21 April 2018, sampai saat ini, STAI Fatahillah Serpong, belum menerbitkan SKPI. Persoalannya, bagaimana STAI Fatahillah Serpong, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan penerapan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 25 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya, bagaimana pihak STAI Fatahillah Serpong menafsirkan kebijakan

SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka. Berikut, penuturan para informan STAI Fatahilah Serpong, sebagai berikut:

"...Kami sangat memahami dan setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dalam hal ini, Kami sedang memprioritaskan kegiatan yang lebih yang jelas sanksinya seperti pengalaman Kami harus menghentikan kelas jauh, Akreditasi prodi dan Institusi Perguruan Tinggi; apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi"ditutup atau merger. Hal ini bukan berarti Kami bukan menomor duakan kebijakan SKPI, tidak penting".(Wawancara dengan IF.4.1. Senin, 25 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Diketahui bahwa pengembangan kapasitas menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Fatahilah Serpong sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal I kewajibannya melekat pada mereka. Untuk alasan hal itu, bagaimana penuturan Wakil ketua I STAI Fatahilah, sebagai berikut:

"... Kami sepakat bahwa pengembangan kapasitas sangat berguna bagi peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku. Kami menyadari pula bahwa terlaksana dan tidaknya suatu kebijakan sangat bergantung pada keseriusan, kepedulian dan kualitas SDM. Untuk mengatasi permasalahan hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh adalah disadarinya adanya kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan berujung pada hasil. Namun hal itu, Kami belum memilikinya, itulah kemudian kewajiban Kami untuk melaksanakan kebijakan SKPI, belum terwujud" (Wawancara dengan IF.4.2. Senin, 25 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian kebijakan SKPI, menuntut adanya perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya, hal itu beralaku untuk kebijakan lainnya pula; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Fatahilah sampai saat ini, belum ada

tanda-tanda mendesain strategi operasional kebijakan SKPI, yang padahal 1 kegiatan itu sudah lazim dilaksanakan untuk menyikapi kebijakan manapun. Berikut, penuturan alasan Ketua prodi PAI, STAI Fatahilah, sebagai berikut:

"...Kami menyadari bahwa: "...strategi operasi dibuat dan dilakukan agar pengoperasian program kegiatan SKPI berjalan mulai dari peneriaan informasi sampai ke tahap pencapaian. Namun demikian, hal itu terbentur oleh keadaan yang memaksa, diantaranya; waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, bagi Kami hal itu belum tercapai. (Wawancara dengan IF.4.3. Senin, 25 Juni 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Tidak saja dalam proses implementasi kebijakan SKPI, dalam realitas lain juga ditemukan walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan kompleksitas hambatan. Padahal masa lalu yang memberikan pembelajaran pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya yang pernah dialami oleh STAI Fatahilah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang syarat pengalaman, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan.

Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kesiapan melaksana kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, sebagaimana alasan dipaparkan oleh Waket III STAI Fatahilah; Penuturannya, sebagai berikut:

"...Kami menyadari bahwa: Lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 2000 an, bahkan telah meluluskan alumni lebih dari seribuan. Namun kondisi yang memaksa seperti halnya, pada tahun Akademik 2017/2018, ini, Kami membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 465 mahasiswa, dibina dan dikembangkan oleh 38 Dosen dan 38 tenaga administrasi, yang notebe mereka kebanyakan tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa" (Wawancara dengan IF.4.4. Senin, 25 Juni 2018).

Pada prinsipnya STAI Fatahilah; memahami, dan mendukung pentingnya kebijakan penerapan SKPI, namun lagi-lagi keterbatasan dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan kebijakan tersebut.

e. STAI Al-Karimiyah (LP-5)

STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok Salah satu PTKIS di Jawa Barat dan termasuk pada wilayah kerja Kopertais II Jabar-Banten. Memiliki dua program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, tahun Akademik 2017/2018 STAI ini, memiliki 411 mahasiswa dan alumni diwidyaiswara tahun ini, sebanyak 76 sarjana S-1, dibina dan dikembangkan oleh 28 dosen, dan 9 tenaga administrasi (observasi tanggal 21 April 2018).

Berdasar pada hasil observasi tanggal 21 April 2018, itu pula, ditemukan informasi, bahwa sampai saat ini, STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok, belum menerbitkan SKPI untuk alumninya. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Al-Karimiyah, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplementasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara dengan informan STAI Al-Karimiyah tanggal 26 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Interpretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan interpretasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Al-Karimiyah, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal kegiatan itu, merupakan kewajibannya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan STAI Al-

Karimiyah, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Izajah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.5.1. Selasa, 26 Juni 2018).

Untuk itu, Dekan Fak Tarbiyah, menambahkan: "... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun terlepas dari itu, Kami sedang fokus pada kegiatan prioritas yang lebih jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/ PP.00.9/ 761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019, apabila tidak melakukannya Kami kena sanksi"ditutup atau merger". (Wawancara dengan IF.5.2. Selasa, 26 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, berguna untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian kebijakan, serta adanya proses kaderisasi. Apabila hal tersebut dilakukan berdampak pada roses penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan tdak hanya berlaku untuk kebijakan SKPI. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka sebagai pengemban PT. Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua II, STAI Al-Karimiyah, sebagai berikut:

"... Kami sependapat bahwa pentingnya pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI sampai ke tangan alumni. Namun kenyataannya, tingkat permasalahan hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh dari itu berupa disadarinya adanya kekurangan dan ketidaksiapan, kemudian penentuan

langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana” (Wawancara dengan IF.5.3. Selasa, 26 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Al-Karimiyah sampai saat ini, belum merancang strategi operasi kebijakan SKPI, yang kewajiban itu melekat pada tupoksi mereka, Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi PAI STAI Al-Karimiyah, sebagai berikut:

“...Kami menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa: “.strategi pengoperasian/pengembangan kapasitas, kegiatan ini sungguh memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami terbentur pada keadaan yang memaksa, diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, serta barangkali pengetahuan yang Kami miliki oleh setiap individu sangat terbatas karena keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.5.4, Selasa, 26 Juni 2018).

4) Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Sejarah ke belakang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya tetlebih, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Al-Karimiyah, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Al-Karimiyah, sebagai berikut:

“...walaupun, lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1999, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan ini, mungkin sama dan sepakat dengan

teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosektwensi./lancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami , yaitu saat tahun Akademik 2017/2018 STAI ini, memiliki 411 mahasiswa dan alumni diwidusa tahun ini, sebanyak 76 sarjana S-1, dibina dan dikembangkan oleh 28 dosen, dan 9 tenaga administrasi (observasi tanggal 21 April 2018), yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini" (Wawancara dengan IF.5.2.2 Selasa, 26 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Al-Karimiyah, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan kebijakan tersebut.

f. FPSI Univ Juanda (LP-6)

Fakultas Pendidikan dan Studi Islam FPSI-Universitas Djuanda Bogor adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor berada dibawah naungan Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1987. Apabila dilihat dari pendiriannya FPSI-UNIDA Bogor, merupakan PTKIS terpandang di wilayah kerja Kopertais Wil II Jabar Banten, maka pantas FPSI-UNIDA Bogor merupaka PTKIS pertama yang sudah merealisasikan kebijakan SKPI berdasarkan PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Berdasar pada hasil observasi tanggal 21 April 2018, sampai saat ini, FPSI-UNIDA Bogor telah menerbitkan SKPI, sejak Desember 2016, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana FPSI-UNIDA Bogor, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 29 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa FPSI-UNIDA Bogor, sudah bisa menafsirkan kebijakan SKPI, padahal PTKIS lain, bermasalah (FPSI-UNIDA ko bisa); Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"....Kami memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplemen tasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, yaitu: pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini, respon terhadap Kebijakan SKPI, dan Harapan dari program kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.6.1. Jum'atn, 26 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak mengapa FPSI-UNIDA Bogor, telah dapat mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Dekan I FPSI-UNIDA, sebagai berikut:

"...pada dasarnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun kenyataannya, tingkat persoalan hingga bias tercapai dan terwujud, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Hikmah yang diperoleh adalah

teridentifikasinya suatu kelemahan dan kekurangan, yang kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada tahap pelaksanaan tercapainya hasil yang diinginkan. Itulah barangkali menjadi kelemahan sehingga implementasi kebijakan SKPI belum bisa diterapkan. Resep Kami , untuk merealisasikan kebijakan dalam hal ini penenerapkan SKPI, diperlukan (1) desain dan struktur organisasi; (2) pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; (3) integrasi dan koordinasi; (4) perekrutan dan penempatan sumber daya manusia, (5) hak, wewenang dan kewajiban, (6) pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi), (7) pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, dan (8) budaya organisasi” (Wawancara dengan IF.6.2. Jum’atn, 26 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak mengapa FPSI-UNIDA Bogor dapat menyusun strategi ini, padahal bagi PTKIS lain sampai saat ini belum menyiapkannya, yang kewajiban itu melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Wakil Dekan II FPSI-UNIDA, sebagai berikut:

“...Kami memahami bahwa, .strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami , namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, kalou tidak strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” Resep Kami menyikapi hal ini, antara lain: (1) menyusun struktur dengan strategi; (2) melembagakan strategi; (3) mengoperasikan strategi; (2) menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi” (Wawancara dengan IF.6.3.1. Jum’atn, 26 Juni 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya FPSI-UNIDA, sebagai PTKIS, terdepan

di wilayahnya, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1987, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya bagi FPSI-UNIDA, sehingga dapat melaksanakan Kebijakan SKPI dengan mulus?. Terkait dengan itu, berikut penuturan Wakil Dekan II FPSI-UNIDA, sebagai berikut:

"...seperti dipahami bersama, bahwa adanya kebijakan karena adanya masalah, dan setiap kehidupan, apalagi hal ini menyangkut nasib bangsa ke depan, sudah barang tentu akan berhadapan dengan permasalahan, akan tetapi bukan sebaliknya "mengatasi masalah dengan masalah", Kuncinya masalah bukan di tinggalkan, akan tetapi harus didekati dan dihadapi ".....dalam mengatasi masalah kebijakan SKPI ini, langkah Kami yang dilakukan: pertama; menyiapkan Individu muali dari kondisi fisik, mental dan emosional, kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari, Keterampilan. Apabila, empat kompon itu tidak terpenuhi, maka bukan lagi masalah yang ditemukan, tapi kegagalan dapat menimpa, maka dari itu hal ini bagi Kami menjadi prioritas utama, bukan berarti yang lain tidak penting dan bukan berarti hal ini tidak mendapat rintangan dan masalah; Kedua; mencitakan kondisi Organisasi yang stabil: mulai dari mengatasi rendahnya kinerja, kurang profesional, dan kurang komitmen terhadap kebijakan rendahnya kesadaran, dan keerlibatan staf, karena kurang mendapat motivasi dari pimpinan; atasan kurang memahami, memiliki pengetahuan, dan komitmen terhadap peubahan; setelah itu, baru yang terakhir memmahami Implementasi Kebijakan supaya tidak bermasalah, mulai dari persoalan komunikasi, sumberdaya, disposisi, kemudian mengatasi struktur birokrasi" (Wawancara dengan IF.6.3.2. Jum'atn, 26 Juni 2018).

Pada prinsipnya FPSI-UNIDA, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun bukan berarti telah melaksanakan kebijakan SKPI tidak bermasalah bagi mereka, hal itu mereka menganggap wajar, justru keterbatas dan kondisilah yang memaksa kesiapan mereka dapat melaksanakan kebijakan SKPI.

g. IAIN Laroiba (LP-7)

Institut Agama Islam Nasional Laroiba, selanjutnya disebut IAIN Laa Roiba Bogor, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 22 Oktober 1995, kampus ini beralamat di Jl. Kampung Setu Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor 16640, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

yang berbasis research, berkomitmen untuk terus mencetak para sarjana yang siap pakai. Kampus Laa Roiba terdiri dari tiga kampus, kampus I di Leuwiliang, kampus II di Cibinong dan kampus III di Parung Panjang.

Tahun Akademik 2017/2018 mengembangkan 6 jurusan/program sutdi S-1 5 prodi dan S-2 1 prodi, dengan jumlah mahasiswa tidak kurang dari 964 mahasiswa dibina oleh 88 dosen dan tahun ini meluskan sarjana S-1 68 dan S-2 . 19 Magiter, (profil IAIN Laroiba Tahun 2018). Sejumlah alumni tersebut sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain Ijazah, Transkrip Nilai, berdasarkan PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Berdasar pada hasil observasi tanggal 24 April 2018, sampai saat ini, IAIB, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana IAIN Laa Roiba Bogor, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 30 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak IAIN Laa Roiba Bogor, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal l kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di IAIN Laa Roiba Bogor,

setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Ijazah dan transkrip nilai” (Wawancara dengan IF.7.1. Sabtu, 29 Juni 2018).

Untuk itu, Dekan Fak Tarbiyah, menambahkan: “... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami dalam memprioritaskan kegiatan lebih pada mendahulukan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi”ditutup atau bubar tegas/lugas” (Wawancara dengan IF.7.2. Sabtu, 29 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak IAIN Laa Roiba Bogor, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Rektor II, sebagai berikut:

“...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat permasalahan dan rumitnya persoalan yang harus dihadapi hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh dari itu berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan

masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana” (Wawancara dengan IF.7.3. Selasa, 26 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak IAIN Laa Roiba Bogor, sampai saat ini, belum merancang strategi operasi kebijakan SKPI, yang kewajiban itu melekat pada tupoksi mereka, Berikut, penuturan alasan Dekan Fakultas Syariah IAIB, sebagai berikut:

“...Kami memahami bahwa: “strategi pelaksanaan kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam menerapkan kebijakan SKPI dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami , namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami , karena Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki sangat terbatas karena keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.7.4. Selasa, 26 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pembelajaran dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya IAIN Laa Roiba Bogor, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1978, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa IAIN Laa Roiba Bogor, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Werek II IAIN Laa Roiba Bogor, sebagai berikut:

“...sebenarnya, lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1978, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan ini, mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain; (1)biasanya apabila kebijakan baru diturunkan

dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); (2) biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi./ancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), (3) biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami , yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 521 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 211, dibina dan dikembangkan oleh 109 tenaga Dosen, dan 21 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini" (Wawancara dengan IF.7.3.2 Selasa, 25 Juli 2018).

Pada prinsipnya IAIN Laa Roiba Bogor, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

h. STAI Karisma (LP-8)

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kharisma STAI Kharisma berdiri 30 Agustus 1995, ia, merupakan salah satu PTKS, yang sudah terakreditasi instiusinya. di lingkungan Kopertais II Jawa Barat dan. Saat ini STAI Kharisma memiliki dua jurusan, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saat ini STAI Kharisma memiliki dua jurusan, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiwa tidak kurang dari 465 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 6 orang tenaga adminstrasi, dan tahun ini meluluskan 122 mahasiswa.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Bedasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 24 April 2018, sampai saat ini, STAI Kharisma belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Kharisma, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 30 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu Kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Kharisma, belum menafsirkan Kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal 1 Kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2016, maka sejak itulah STAI Kharisma memiliki kewajiban untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Kharisma, belum menafsirkan kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal 1 kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2016, maka sejak itulah STAI Kharisma memiliki kewajiban untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...pada dasarnya Kami memahami bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, pertanyaan Kami, bahkan mungkin sama dengan teman-teman PTKIS, lain, mengapa kebijakan itu tidak operasional/ kewajibannya bersamaan dengan gencarnya ketika izajah, padahal, setelah Kami kaji pasal demi pasal kewajiban PTKIS, tentanng itu, tidak terpisahkan. Bagi Kami PTKIS kecil boleh dibilang sebagai pendatang baru, biasanya Kami manut mengikuti ramenya pasar dalam istilah bahasa ekonominya. Atas dasar itulah sehingga "anggapan sementara" tentang SKPI dianggap tidak penting. Tidak sepenting blanko ijazah, NIRL, dan sejenisnya" (Wawancara dengan IF.8.1. Sabtu, 30 Juni 2018).

Wakil Ketua I, menambahkan: Lazimnya sebuah kebijakan baru ketika hendak diberlakukan dilengkapi dengan informasi lengkap (juklak/juknis); sebuah kebijakan dilengkapi pula dengan adanya ancaman (bagi izajah yang di tanda tangani oleh Rektor/dekan/ketua STAI/ketua prodi yang tidak ber NIDN, dianggap tidak syah, apalagi prodinya tidak ter akreditasi), biasanya kebijakan baru bagi PTKIS, begitu akan atau harus dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling

mendasar bagi Kami . Sehingga dalam hal ini, bukan berarti “Kami tidak siap” untuk mengimplementasikan/menerapkan kebijakan SKPI, yang menjadi kewajiban Kami ” (Wawancara dengan IF.8.2. Sabtu, 30 Juni 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas, untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Kharisma, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua III, sebagai berikut:

“....pada prinsipnya, Kami sepakat bahwa pengembangan kapasitas dalam menyikapi kebijakan KMA no.1/2016, menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, Pelajaran yang diperoleh dari itu berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan sampainya pada tujuan/hasil yang optimal, memang hal itu tidak mudah, karena hal itu memerlukan pemikiran yang dinamis, hal itu bagi Kami belum memiliki. Itulah barangkali menjadi kelemahan Kami, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana”(Wawancara dengan IF.8.3. Sabtu, 30 Juni 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa sekelas STAI Kharisma, sampai saat ini, belum memiliki strategi nerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Kaprodi PAI, sebagai berikut:

“...pada dasarnya Kami memahami bahwa: “strategi pengoperasian kegiatan memerlukan beberapa pertimbangan agar program atau kebijakan bisa terlaksana, dalam hal ini dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, Kami sependapat agar kegiatan dapat berjalan dan dapat dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan

Kami . Namun dibalik itu, bagi Kami Kami dihadapkan dengan keadaan utamanya, sumberdaya yang harus Kami persiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, persoalan sarana, prasarana, dan dana bagi Kami tidak menjadi persoalan. Dan ternyata walupun, strategi telah dirancang, dana tersedia untuk mengoperasikan kebijakan ini, upaya tersebut sia-sia dan kandas di tengah jalan, karena Kami belum memiliki SDM yang mumpuni dan yang diandalkan untuk menangani persoalan itu ” (Wawancara dengan IF.8.4. Sabtu, 30 Juni 2018).

4) Aspek kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Kekuatan organisasi dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Kharisma, dapat dikatakan sebagai PTKIS yang potensial dalam masalah pendanaan, Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Kharisma, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI La Tansa Mashiro, sebagai berikut:

“ ..., sebagaimana telah disampaikan sebelumnya menyakut persoalan dana untuk mengoperasionalkan program SKPI, sampai pada tangan alumni, bagi Kami hal itu bukan berarti Kami “memamerkan kesombongan” Namun yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi erbentur pada persoalan, pertama; menyangkut kesiapan individu, sikap dan pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. keterampilan, dalam memperoleh dan menggali informasi (kreatifitas) dalam menyikapi kebijakan yang segera dilaksanakan” (Wawancara dengan IF.8.5. Sabtu, 30 Juni 2018).

Pada prinsipnya STAI Kharisma, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun dan kondisi keterbatasan SDM yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

i. STAI Sukabumi (LP-9)

STAI Sukabumi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 26 September 1991, kampus ini beralamat di Jl. Lio Balandongan Sirnagalih No. 74 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabum, Sukabumi, Jawa

Barat, Indonesia. STAI ini, memiliki jurusan/program sudi, yakni S1 5 prodi dan S2 1 prodi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 465 mahasiswa dibina oleh 88 Dosen dan 19 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 128 lulusan, terdiri 89 Sarjan S-1 dan S-2, 49 Magister.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 24 April 2018, sampai saat ini, STAI Sukabumi belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Sukabumi dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 30 Juni 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Sukabumi, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal l kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

“...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan STAI Sukabumi, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan

Izajah dan transkrip nilai” (Wawancara dengan IF.9.1. Sabtu, 30 Juni 2018).

Untuk itu, Waket I, menambahkan: “... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua Kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya Kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami dalam memprioritaskan kegiatan lebih pada mendahulukan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi”ditutup atau merger. (Wawancara dengan IF.9.2. Sabtu, 30 Jun 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian Kebijakan, (Kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan Kebijakan, hal ini berlaku pada semua Kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Sukabumi, sampai saat ini, belum mengorganisasikan Kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Rektor II, sebagai berikut:

“...hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami memprioritaskan kegiatan yang lebih jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi”ditutup atau merger (Wawancara dengan IF.9.3.1 Sabtu, 30 Jun 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Sukabumi, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Rektor II, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, rumitnya tingkat permasalahan hingga bisa sampai ke tujuan yang ingin dicapai, nampaklah suatu pemisah antara idealita dan realita. Hasilnya erupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.9.4. Sabtu, 30 Jun 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Sukabumi, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Sukabumi, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Sukabumi, sebagai berikut:

“...betul, lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1999, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan yang mungkin sama dan sepekat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi.lancam (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami , yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 456 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 128, dibina dan dikembangkan oleh 88 tenaga Dosen, dan 19 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga” dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini” (Wawancara dengan IF.9.3.2. Sabtu, 30 Jun 2018).

Pada prinsipnya STAI Sukabumi, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

j. STAI Nurul Hikmah (LP-10)

STAI Nurul Hikmah, salah satu PTKIS di Jawa Barat dan termasuk pada wilayah kerja Kopertais II Jabar-Banten. Memiliki 1 program studi Pendidikan Agama Islam, tahun Akademik 2017/2018 STAI ini, memiliki 167 mahasiswa dibina dan dikembangkan oleh 15 dosen, dan 3 tenaga administrasi, Tahun ini meluluskan 53 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 26 April 2018, sampai saat ini, STAI Nurul Hikmah belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Al-Karimiyah, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 3 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Al-Karimiyah, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal kegiatan itu, merupakan kewajibannya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan STAI Al-Karimiyah, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Ijazah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.10.1. Sabtu, 3 Juli 2018).

Untuk itu, Kaprodi PAI, menambahkan: *"... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti tidak mengindahkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami sedang memprioritaskan kegiatan yang lebih mendahulukan kegiatan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/ 761a/ 2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019, apabila tidak melakukannya Kami kena sanksi"* ditutup atau merger.. (Wawancara dengan IF.10.2. Sabtu, 3 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya

pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, berguna untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian kebijakan, serta adanya proses kaderisasi. Apabila hal tersebut dilakukan berdampak pada proses penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan tdak hanya berlaku untuk kebijakan SKPI. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Nurul Hikmah, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka sebagai pengemban PT. Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua II, STAI Nurul Hikmah, sebagai berikut:

"... Kami sependapat bahwa pentingnya pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan hingga bisa sampai ke tujuan yang ingin dicapai, ditemukan adanya suatu pemisah antara cita-cita ideal dan realita. Pelajaran yang didapatkan dari hal itu adalah pengidentifikasian adanya kelemahan, kemudian dari langkah tersebut dapat dilakukan penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.10.3.1. Sabtu, 3 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Nurul Hikmah sampai saat ini, belum mampu merancang strategi operasi unuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka, Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi PAI STAI Nurul Hikmah sebagai berikut:

"...Kami memahami sepenuhnya bahwa .strategi pengoperasian/ pengembangan kapasitas, kegiatan ini sungguh memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami , namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan yang mendesak, diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan bahkan barangkali bisa jadi pengetahuan yang Kami miliki sangatlah terbatas karena suatu keadaan, sehingga, strategi

yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.10.4. Sabtu, 3 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Sejarah ke belakang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya tetlebih, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Nurul Hikmah, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Nurul Hikmah, sebagai

“...memang benar adanya, bahwa lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1999, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan ini, mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwens./ ancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami, yaitu saat tahun Akademik 2017/2018 STAI ini, meiliki 411 mahasiswa dan alumni diwidusa tahun ini, sebanyak 76 sarjana S-1, dibina dan dikembangkan oleh 28 dosen, dan 9 tenaga administrasi (observasi tanggal 21 April 2018), yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga” dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan hanya dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini” (Wawancara dengan IF.10.3.2. Selasa, 26 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Nurul Hikmah memehami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

k. STAI Agus Salim (LP-11)

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 5 November 2003, ia, merupakan salah satu di lingkungan Kopertais II Jawa Barat dan. Saat ini STAI Haji Agus Salim memiliki dua jurusan/prodi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 463 mahasiswa dibina oleh 36 Dosen dan 6 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 121 Sarjana S-1..

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 26 April 2018, sampai saat ini, STAI Haji Agus Salim belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Haji Agus Salim, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 2 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Haji Agus Salim, belum menafsirkan kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal 1 kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januri 2016, maka sejak itulah STAI Haji Agus Salim, memiliki kewajiban untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...pada dasarnya Kami memahami bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, pertanyaan Kami, bahkan mungkin sama dengan teman-teman PTKIS, lain, mengapa kebijakan itu

tidak operasional/ kewajibannya bersamaan dengan gencarnya ketika izajah, padahal 1 setelah Kami kaji pasal demi pasal kewajiban PTKIS, tentanng itu, tidak terpisahkan. Bagi Kami PTKIS kecil boleh dibilang sebagai pendatang baru, biasanya Kami manut mengikuti ramennya pasar dalam istilah bahasa ekonominya. Atas dasar itulah sehingga “anggapan sementara” tentang SKPI dianggap tidak penting. Tidak sepentingnya blanko izajah, NIRL, dan sejenisnya” (Wawancara dengan IF.11.1. Senin, 2 Juli 2018).

Wakil Ketua I, menabahkan: Lazimnya sebuah kebijakan baru ketika hendak diberlakukan dilengkapi dengan informasi lengkap (juklak/juknis); sebuah kebijakan dilengkapi pula dengan adanya ancaman (bagi izajah yang ditandatangani oleh Rektor/dekan/ketua STAI/ketua prodi yang tidak ber NIDN, dianggap tidak syah, apalagi prodinya tidak terakreditasi), biasanya kebijakan baru bagi PTKIS, begitu akan atau harus dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami . Sehingga dalam hal ini, bukan berarti “Kami tidak siap” untuk mengimplementasikan /menerapkan kebijakan SKPI, yang menjadi kewajiban Kami ” (Wawancara dengan IF.11.2. Senin, 2 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Haji Agus Salim,, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua III, sebagai berikut:

“...pada prinsipnya, Kami sepakat bahwa pengembangan kapasitas dalam menyikapi kebijakan KMA no.1/2016, menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, Pelajaran yang diperoleh adalah teridentifikasinya suatu kelemahan dan kekurangan, yang kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada tahap pelaksanaan tercapainya hasil yang diinginkan. Itulah barangkali menjadi

kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana” (Wawancara dengan IF.11.3. Senin, 2 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa sekelas STAI Haji Agus Salim, sampai saat ini, belum mampu merancang strategi operasi untuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Kaprodi PAI, sebagai berikut:

“...Kami memahami bahwa: strategi pengoperasian kegiatan memerlukan beberapa pertimbangan agar program atau kebijakan bisa terlaksana, dalam hal ini dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, Kami sependapat agar kegiatan dapat berjalan dan dapat dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami. Namun dibalik itu, bagi Kami. Kami dihadapkan pada keadaan utamanya, yaitu sumberdaya yang harus Kami persiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat terbatas karena keadaan, mengenai sarana, prasarana, dan dana bagi Kami tidak menjadi persoalan. Dan ternyata walaupun, strategi telah dirancang, dana tersedia untuk mengoperasikan kebijakan ini, upaya tersebut sia-sia dan kandas di tengah jalan, karena Kami belum memiliki SDM yang mumpuni dan bisa diandalkan untuk menangani persoalan itu” (Wawancara dengan IF.11.4. Senin, 2 Juli 2018).

4) Aspek kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Kekuatan organisasi dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Haji Agus Salim, dapat dikatakan sebagai PTKIS yang potensial dalam masalah pendanaan, Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Haji Agus Salim, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Haji Agus Salim, sebagai berikut:

“... sebagaimana telah disampaikan sebelumnya menyakut persoalan dana untuk mengoperasionalkan program SKPI, sampai pada tangan alumni, bagi Kami hal itu bukan berarti Kami “memamerkan kesombongan”

Namun yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan, pertama; menyangkut kesiapan individu, sikap dan pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. keterampilan, dalam memperoleh dan menggali informasi (kreatifitas) dalam menyikapi kebijakan yang segera dilaksanakan” (Wawancara dengan IF.11.4 Senin, 2 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Haji Agus Salim, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun dan kondisi keterbatasan SDM yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

1. STAI As Siddiqiyah (LP-12)

STAI Asshiddiqiyah Karawang, salah satu PTKIS di Jawa Barat dan termasuk pada wilayah kerja Kopertais II Jabar-Banten, berdiri sejak tahun 2014. Memiliki 1 program studi Manajemen Pendidikan Agama Islam, tahun Akademik 2017/2018 STAI ini, memiliki 294 mahasiswa dibina dan dikembangkan oleh 13 dosen, dan 3 tenaga administrasi, Tahun ini rencana meluluskan 61 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah sudah dipersiapkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 26 April 2018, sampai saat ini, STAI Asshiddiqiyah Karawang, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Asshiddiqiyah Karawang, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 3 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Asshiddiqiyah Karawang, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal 1 kegiatan itu,

merupakan kewajibannya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, karena kebijakan penerapan SKPI sebetulnya bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan STAI Asshiddiqiyah Karawang, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Ijazah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.12.1. Selasa, 3 Juli 2018).

Untuk itu, Kajar MPI, menambahkan: *"... kebijakan itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera terlaksana, namun dibalik itu: Kami sedang memprioritaskan untuk mendahulukan kegiatan yang lebih jelas sanksinya, seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019, apabila tidak melakukannya Kami kena sanksi "ditutup atau merger"* (Wawancara dengan IF.12.2. Selasa, 3 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, berguna untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian kebijakan, serta adanya proses kaderisasi. Apabila hal tersebut dilakukan berdampak pada proses penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan tidak hanya berlaku untuk kebijakan SKPI. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Asshiddiqiyah Karawang, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka sebagai pengembangan PT. Berikut, penuturan

alasan dikemukakan Wakil Ketua II, STAI Asshiddiqiyah Karawang, sebagai berikut:

"... Kami sadar dan sependapat bahwa pentingnya pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajarannya yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat permasalahan untuk mewujudkan dan tahap pencapaiannya yang rumit, terdapat pemisah antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh dari itu adalah disadarinya kekurangan dan kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan pencapaian. Kenyataan di atas itulah barangkali yang menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasian kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.12.3.1 Selasa, 3 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Asshiddiqiyah Karawang, belum mampu merancang strategi operasi untuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi MPI STAI Asshiddiqiyah Karawang, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa: ".strategi pengoperasian/pengembangan kapasitas, kegiatan ini sungguh memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan yang tidak memungkinkan, diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan bahkan bisa jadi pengetahuan yang Kami miliki sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan"(Wawancara dengan IF.12.4. Selasa, 3 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Sejarah ke belakang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya tetlebih, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2014, sudah barang tentu, untuk

menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Asshiddiqiyah Karawang, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Asshiddiqiyah Karawang, sebagai berikut:

"...betul, lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 2014, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan ini, mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi./ancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami, yaitu saat tahun Akademik 2017/2018 STAI ini, memiliki 294 mahasiswa dan rencana diwidusa tahun ini, sebanyak 61 sarjana S-1, dibina dan dikembangkan oleh 13 dosen, dan 3 tenaga administrasi (observasi tanggal 21 April 2018), yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini (Wawancara dengan IF.12.3.2. Selasa, 3 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Asshiddiqiyah Karawang, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

m. STAI DR. KHE Z Muttaqin (LP-13)

STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 1 Juli 1987, STAI ini, memiliki 7 jurusan/program sudi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiwa tidak kurang dari 1143 mahasiswa dibina oleh 99 Dosen dan 21 orang tenaga adminstrasi, dan tahun ini meluluskan 136 lulusan.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Bedasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 28 April 2018, sampai saat ini, STAI Dr. KH. EZ.

Muttaqien belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 6 Jul 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal 1 kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI perlu pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, karena kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan baru bagi Kami khususnya di STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Izajah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.13.1.Jum'at, 6 Juli 2018).

Untuk itu, Ketua Prodi PAI, menambahkan: "... kebijakan penerapan SKPI belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami lebih memprioritaskan kegiatan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019.,

apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi"ditutup" (Wawancara dengan IF.13.2. Jum'at, 6 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua II, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat permasalahan yang harus dilewati dan ditempuh untuk mencapainya sangatlah rumit, ketika adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh dari itu berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan pencapaian hasil. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.13.3.1 Jum'at, 6 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien sampai saat ini, belum mampu merancang strategi operasi unuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi PAI STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, sebagai berikut:

"...Kami memahami bahwa: ".strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami , namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami , karena

Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan bahkan bisa jadi pengetahuan yang Kami miliki sangat terbatas, sehingga strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.13.4. Jum’at, 6 Juli 2018).

4) Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa IAIB, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien sebagai berikut:

“...betul adanya, bahwa lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1999, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan yang mungkin sama dan sepadat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi./lancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami, yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 456 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 128, dibina dan dikembangkan oleh 88 tenaga Dosen, dan 19 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga” dari sisi lain semua biaya operasional bergantung pada SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini” (Wawancara dengan IF.13.2.2. Jum’at, 6 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

n. STAI Riyadul Jannah (LP-14)

STAI Riyadhul Jannah Subang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah berdiri sejak 30 Juni 2000, ia, merupakan salah satu di lingkungan Kopertais II Jawa Barat dan. Saat ini STAI Riyadhul Jannah memiliki 3 jurusan/prodi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan Pendidikan Guru MI. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 565 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 6 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 53 Sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 28 April 2018, sampai saat ini, STAI Riyadhul Jannah belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Riyadhul Jannah, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 7 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu Kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Riyadhul Jannah, belum menafsirkan Kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal 1 Kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januri 2016, maka sejak itulah STAI Riyadhul Jannah, memiliki kewajiban untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....pada dasarnya Kami memahami bahwa Kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. Namun apabila sebuah Kebijakan baru ketika mmm mau diberlakukan dilengkapi dengan informasi lengkap (juklak/juknis); sebuah Kebijakan dilengkapi pula dengan adanya ancaman

(bagi ijazah yang di tanda tangani oleh Rektor/dekan/ketua STAI/ketua prodi yang tidak ber NIDN, dianggap tidak syah, apalagi prodinya tidak ter akreditasi), biasanya Kebijakan baru bagi PTKIS, begitu akan atau harus dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami . Sehingga dalam hal ini, bukan berarti “Kami tidak siap” untuk mengimplementasikan/ menerapkan Kebijakan SKPI, yang menjadi kewajiban Kami ” (Wawancara dengan IF.14.1. Sabtu, 7 Juli 2018).

Wakil Ketua I, menabahkan: Kamisepndapat dengan Pak Ketua..pada dasarnya Kami memahami bahwa Kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik k, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, pertanyaan Kami , bahkan mungkin sama dengan teman-teman PTKIS, lain, mengapa Kebijakan itu tidak operasional/ kewajibannya bersamaan dengan gencarnya ketika ijazah, padahal l setelah Kami kaji pasal demi pasal kewajiban PTKIS, tentang itu, tidak terpisahkan. Bagi Kami PTKIS kecil boleh dibilang sebagai pendatang baru, biasanya Kami manut mengikuti ramennya pasar dalam istilah bahasa ekonominya. Atas dasar itulah sehingga “anggapan sementara” tentang SKPI dianggap tidak penting. Tidak sepentingnya blanko ijazah, NIRL, dan sejenisnya” (Wawancara dengan IF.14.2. Sabtu, 7 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Kegiatan intrepresiasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Riyadhul Jannah, belum menafsirkan kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal l kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2016, maka sejak itulah STAI Riyadhul Jannah, memiliki kewajiban untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

“.....sesungguhnya Kami memahami bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. Namun apabila sebuah kebijakan baru ketika hendak diberlakukan dilengkapi dengan informasi lengkap (juklak/juknis); sebuah kebijakan dilengkapi pula dengan adanya ancaman (bagi ijazah yang di tanda tangani oleh Rektor/dekan/ketua STAI/ketua prodi yang tidak ber NIDN, dianggap tidak syah, apalagi prodinya tidak ter akreditasi), biasanya kebijakan baru bagi PTKIS, begitu akan atau harus dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling

mendasar bagi Kami. Sehingga dalam hal ini, bukan berarti "Kami tidak siap" untuk mengimplementasikan/ menerapkan kebijakan SKPI, yang menjadi kewajiban Kami " (Wawancara dengan IF.14.3. Sabtu, 7 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa sekelas STAI Riyadhul Jannah, sampai saat ini, belum memiliki strategi nerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Kaprodi PAI, sebagai berikut:

"...pada dasarnya Kami memahami bahwa: "strategi pengoperasian kegiatan memerlukan beberapa pertimbangan agar program atau kebijakan bisa terlaksana, dalam hal ini dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, Kami sependapat agar kegiatan dapat berjalan dan dapat dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami. Namun dibalik itu, bagi Kami. Kami dihadapkan dengan keadaan utamanya, yaitu sumberdaya yang harus Kami persiapkan, dan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Walaupun persoalan sarana, prasarana, dan dana bagi Kami tidak menjadi kendala. Sekalipun strategi telah dirancang dan dana tersedia untuk mengoperasikan kebijakan ini, namun upaya tersebut sia-sia dan kandas di tengah jalan, karena Kami belum memiliki SDM yang mumpuni dan bisa diandalkan untuk menangani persoalan itu "(Wawancara dengan IF.14.4. Sabtu, 7 Juli 2018).

4) Aspek kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Kekuatan organisasi dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Riyadhul Jannah, dapat dikatakan sebagai PTKIS yang potensial dalam masalah pendanaan, Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, STAI Riyadhul Jannah,, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Riyadhul Jannah, sebagai berikut:

"..., sebagaimana telah disampaikan sebelumnya menyakut persoalan dana untuk mengoperasionalkan program SKPI, sampai pada tangan

alumni, bagi Kami hal itu bukan berarti Kami “memamerkan kesombongan” Namun yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan, pertama; menyangkut kesiapan individu, sikap dan pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. keterampilan, dalam memperoleh dan menggali informasi (kreatifitas) dalam menyikapi kebijakan yang segera dilaksanakan” (Wawancara dengan IF.14.5 Sabtu, 7 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Riyadhul Jannah, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun dan kondisi keterbatasan SDM yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

o. STAIS Dharma (LP-15)

STAI Pangeran Dharma Kusuma Segaran merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak 1 Juli 1987, STAI ini, memiliki 3 jurusan/program studi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 565 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 9 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 136 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 28 April 2018, sampai saat ini, STAI Pangeran Dharma Kusuma belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Pangeran Dharma Kusuma, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 6 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Pangeran Dharma Kusuma, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal 1 kegiatan itu,

merupakan kewajibannya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

“...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman dan langkah khusus dalam mengimplementasikannya, karena kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan kebijakan yang baru bagi Kami, khususnya di lingkungan STAI Pangeran Dharma Kusuma, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimple mentasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Sehingga untuk sementara Kami menganggap bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Ijazah dan transkrip nilai” (Wawancara dengan IF.15.1.Jum’at, 6 Juli 2018).

Untuk itu, Ketua Prodi PAI, menambahkan: “... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti tidak menaati dan patuh terhadap kewajiban. Pada dasarnya Kami setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi Kami, hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: kegiatan yang jelas sanksinya adalah program yang menjadi prioritas bagi Kami , seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus menempuh Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi”ditutup”.. (Wawancara dengan IF.15.2. Jum’at, 6 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Pangeran Dharma Kusuma, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua II, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun kenyataannya, banyaknya persoalan dan hambatan untuk mencapainya serta adanya suatu pemisah antara idealita dan realita, telah menampakkan adanya kelemahan dan barangkali hal itu lah yang menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.15.3.1 Jum'at, 6 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Pangeran Dharma Kusuma sampai saat ini, belum mampu merancang strategi operasi unuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi PAI STAI Pangeran Dharma Kusuma, sebagai berikut:

"...Kami memahami bahwa: ".strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan dan barangkali keterbatasan pengetahuan yang Kami miliki dikarenakan suatu keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan" (Wawancara dengan IF.15.4. Jum'at, 6 Juli 2018).

4) Aspek: Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Pangeran Dharma Kusuma, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa IAIB, belum siap

melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Pangeran Dharma Kusuma sebagai berikut:

"...memang benar adanya bahwa lembaga Kami berdiri sejak tahun 1999, akan tetapi, Kami menghadapi persoalan ini, tentulah sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwens./ ancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami, yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 456 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 565, dibina dan dikembangkan oleh 38 tenaga Dosen, dan 9 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu hanya mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini" (Wawancara dengan IF.15.3.2. Jum'at, 6 Juni 2018).

Pada prinsipnya STAI Pangeran Dharma Kusuma, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

p. STAIC Cirebon (LP-16)

STAI Cirebon merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak 27 Mei 1989, STAI ini, memiliki 3 jurusan/program studi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 561 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 9 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 136 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 28 April 2018, sampai saat ini, STAI Cirebon belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Cirebon, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi

kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 7 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa STAI Cirebon, belum bisa menafsirkan kebijakan SKPI, padahal PTKIS lain, bisa; Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplemen tasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, yaitu: pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini, respon terhadap Kebijakan SKPI, dan Harapan dari program kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.16.1. Sabtu 7 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak mengapa STAI Cirebon, belum siap mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua I STAI Cirebon, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, banyaknya

permasalahan hingga bisa sampai ke tahap pelaksanaan, nampaklah adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Artinya Pelajaran yang diperoleh dari itu berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas. Itulah barangkali menjadi kelemahan, hal itu Kami belum memilikinya” (Wawancara dengan IF.16.2. Sabtu 7 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak mengapa STAI Cirebon, belum menyusun strategi ini, padahal bagi PTKIS mempunyai kewajiban untuk itu, yang kewajiban itu melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Wakil Ketua II STAI Cirebon, sebagai berikut:

“...Kami memahami bahwa: “.strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami , namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami , karena Kami dihadapkan pada berbagai keadaan, diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, bahkan bisa jadi pengetahuan yang Kami miliki sangatlah terbatas, sehingga strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” Resep Kami menyikapi hal ini, antara lain: (1) menyusun struktur dengan strategi; (2) melembagakan strategi; (3) mengoperasikan strategi; (2) menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi” (Wawancara dengan IF.16.3.1. Sabtu 7 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Cirebon, sebagai PTKIS, terdepan di wilayahnya, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1987, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya bagi STAI

Cirebon, sehingga belum menyiapkan Kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, berikut penuturan Wakil Ketua II STAI Cirebon, sebagai berikut:

“...sebagaimana diketahui bersama, bahwa adanya kebijakan karena adanya masalah, dan setiap kehidupan, apalagi hal ini menyangkut nasib bangsa ke depan, sudah barang tentu akan berhadapan dengan permasalahan, akan tetapi bukan sebaliknya “mengatasi masalah dengan masalah”, Kuncinya masalah bukan di tinggalkan, akan tetapi harus diselesaikan dan dihadapi “.....mendekati dan menghadapi itulah yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan pokok, Kami belum mampu mengali dan megolah informasi menjadi program, sumberdaya Kami terbatas, baik dari segi SDM, maupun dari segi finansial, dalam mengatasi masalah kebijakan SKPI ini, dan komitmen terhadap peubahan masih kurang; (Wawancara dengan IF.16.3.2. Sabtu 7 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Cirebon, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun bukan berarti telah melaksanakan Kebijakan SKPI tidak bermasalah, hal itu mereka menganggap wajar, justru keterbatasan dan kondisinya yang memaksa kesiapan mereka dapat melaksanakan Kebijakan SKPI.

q. FKIS UNSIA Kuningan (LP-17)

Fakultas Keagamaan Islam Universitas Al-Ihya, (FKAI-UNSIA), Kuningan dahulu STAI Al-Ihya Kuningan, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak 27 Mei 1989, STAI ini, memiliki 5 jurusan/program studi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 853 mahasiswa dibina oleh 83 Dosen dan 19 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 118 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 2 Mei 2018, sampai saat ini, FKAI-UNSIA Kuningan, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, mengapa FKAI-UNSIA Kuningan, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa

saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 9 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak FKAI-UNSIA), Kuningan, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal l kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI merupakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan FKAI-UNSIA Kuningan, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Izazah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.17.1.Senin, 9 Juli 2018).

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak FKAI-UNSIA), Kuningan, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal l kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI

merupakan kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan FKAI-UNSIK Kuningan, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Izajah dan transkrip nilai” (Wawancara dengan IF.17.2.Senin, 9 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak FKAI-UNSIK), Kuningan, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua II, sebagai berikut:

“...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Akan tetapi kenyataannya, rumitnya persoalan dalam tahap perencanaan hingga pada tahap pencapaian dan pelaksanaan nampaklah kekurangan Kami yang tidak memungkinkan untuk dapat menempuh dan mencapainya, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana”(Wawancara dengan IF.17.3.1 Senin, 9 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak FKAI-UNSIK), Kuningan sampai saat ini, belum mampu merancang strategi operasi unuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi PAI FKAI-UNSIK), Ketua Prodi PAI FKAI-UNSIK), Kuningan, sebagai berikut:

“...Kami memahami bahwa: “.strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan,

terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.17.4. Senin, 9 Juli 2018).

4) Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya FKAI-UNSI(A), Kuningan, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa IAIB, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II FKAI-UNSI(A), Kuningan sebagai berikut:

“...memang benar bahwa lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1999, Kami menghadapi persoalan yang tidak memungkinkan untuk menerapkan dan mengoperasikan kebijakan SKPI, mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi.lancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami,, yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 456 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 565, dibina dan dikembangkan oleh 38 tenaga Dosen, dan 9 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga” dari sisi lain semua biaya itu hanya mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini” (Wawancara dengan IF.17.3.1. Senin, 9 Juli 2018).

Pada prinsipnya FKAI-UNSI), Kuningan, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatasan dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

r. STAI Putra Galuh (LP-18)

STAI Putra Galuh Ciamis merupakan salah satu, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak 17 Desember 2007, STAI ini, memiliki 3 jurusan/program sudi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 565 mahasiswa dibina oleh 83 Dosen dan 9 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 53 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 2 Mei 2018, sampai saat ini, STAI Putra Galuh Ciamis, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, mengapa STAI Putra Galuh Ciamis, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 10 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Putra Galuh Ciamis, belum menafsirkan kebijakan SKPI, KMA no 1 tahun 2016, padahal 1 kebijakan itu, telah diberlakukan sejak tanggal 12 Januri 2016, maka sejak itulah STAI Putra Galuh Ciamis, memiliki kewajiban untuk melaksakannya. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....pada dasarnya Kami memahami bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. Namun apabila sebuah kebijakan baru

ketika hendak diberlakukan dilengkapi dengan informasi lengkap (juklak/juknis); sebuah kebijakan dilengkapi pula dengan adanya ancaman (bagi ijazah yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Ketua STAI/ketua prodi yang tidak ber NIDN, dianggap tidak syah, apalagi prodinya tidak terakreditasi), biasanya kebijakan baru bagi PTKIS, begitu akan atau harus dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami. Sehingga dalam hal ini, bukan berarti "Kami tidak siap" untuk mengimplementasikan/ menerapkan kebijakan SKPI, yang menjadi kewajiban Kami " (Wawancara dengan IF.18.1. Selasa, 10 Juli 2018).

Wakil Ketua I, menabahkan: Kami sependapat dengan Pak Ketua..pada dasarnya Kami memahami bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, pertanyaan Kami, bahkan mungkin sama dengan teman-teman PTKIS, lain, mengapa kebijakan itu tidak operasional/ kewajibannya bersamaan dengan gencarnya ketika ijazah, padahal l setelah Kami kaji pasal demi pasal kewajiban PTKIS, tentanng itu, tidak terpisahkan. Bagi Kami PTKIS kecil boleh dibilang sebagai pendatang baru, biasanya Kami manut mengikuti ramennya pasar dalam istilah bahasa ekonominya. Atas dasar itulah sehingga "anggapan sementara" tentang SKPI dianggap tidak penting. Tidak sepentingnya blanko ijazah, NIRL, dan sejenisnya" (Wawancara dengan IF.18.2. Selasa, 10 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, untuk menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Putra Galuh Ciamis, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua III, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sepakat bahwa pengembangan kapasitas dalam menyikapi kebijakan KMA no.1/2016, menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, nampaknya kelemahan,

kemudian penentuan langkah strategis pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan sampainya pada tujuan/hasil yang optimal, memang hal itu tidak mudah, karena hal itu memerlukan pemikiran yang dinamis, hal itu bagi Kami belum memiliki. Itulah barangkali menjadi kelemahan Kami, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana” (Wawancara dengan IF.18.3. Selasa, 10 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa sekelas STAI Putra Galuh Ciamis, sampai saat ini, belum memiliki strategi untuk nerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Kaprodi PAI, sebagai berikut:

“...pada dasarnya Kamimemahami bahwa: “strategi pengoperasian kegiatan memerlukan beberapa pertimbangan agar program atau kebijakan bisa terlaksana, dalam hal ini dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, Kami sependapat agar kegiatan dapat berjalan dan dapat dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami . Namun dibalik itu, bagi Kami Kami dihadapkan pada keadaan utamanya, yaitu sumberdaya yang harus Kami siapkan, keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dikarenakan suatu keadaan, sekalipun persoalan sarana, prasarana, dan dana bagi Kami tidak menjadi kendala, dan ternyata walupun, strategi telah dirancang, dana tersedia untuk mengoperasikan kebijakan ini, akan tetapi upaya tersebut sia-sia dan kandas di tengah jalan, karena Kami belum memiliki SDM yang mumpuni dan yang dapat diandalkan untuk menangani persoalan itu” (Wawancara dengan IF.18.3. Selasa, 10 Juli 2018).

4) Aspek kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Kekuatan organisasi dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Putra Galuh Ciamis, dapat dikatakan sebagai PTKIS yang potensial dalam masalah pendanaan, Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, STAI Putra Galuh Ciamis, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang

dipaparkan oleh Waket II STAI Riyadhul Jannah, sebagai berikut:

“..., sebagaimana telah disampaikan sebelumnya menyakut persoalan dana untuk mengoperasionalkan program SKPI, sampai pada tangan alumni, bagi Kami hal itu bukan berarti Kami “memamerkan kesombongan” Namun yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan, pertama; menyangkut kesiapan individu, sikap dan pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. keterampilan, dalam memperoleh dan menggali informasi (kreatifitas) dalam menyikapi kebijakan yang segera dilaksanakan” (Wawancara dengan IF.18.5. Selasa, 10 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Putra Galuh Ciamis, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun dan kondisi keterbatasan SDM yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

s. STAIMA Banjar (LP-19)

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, merupakan salah satu PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah beridiri sejak 1 Mei 2003, STAI ini, memiliki 3 jurusan/program sudi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiwa tidak kurang dari 651 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 9 orang tenaga adminstrasi, dan tahun ini meluluskan 74 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 2 Mei 2018, sampai saat ini, STAI Cirebon belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAIMA Kota Banjar, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 9 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan

yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa STAIMA Kota Banjar, belum bisa menafsirkan kebijakan SKPI, padahal PTKIS lain, bisa; Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplemen tasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, yaitu: pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini, respon terhadap Kebijakan SKPI, dan Harapan dari program kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.19.1. Senin 9 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak mengapa STAIMA Kota Banjar, belum siap mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua I STAIMA Kota Banjar, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Akan tetapi pada kenyataannya, tingkat permasalahan yang dihadapi hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Dari hal itu nampaklah adanya kelemahan yang kemudian tidak memungkinkannya untuk direalisasikan dan diwujudkan. Itulah barangkali yang menjadi kelemahan, dan Kami belum bisa menempuhnya" (Wawancara dengan IF.19.2. Senin 9 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak mengapa STAIMA Kota Banjar, belum menyusun strategi ini, padahal bagi PTKIS mempunyai kewajiban untuk itu, yang kewajiban itu melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Wakil Ketua II STAI Cirebon, sebagai berikut:

"...Kami memahami betul bahwa strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari ketersediaan sumberdaya, keterbatasan pengetahuan dan kurangnya kesanggupan, sehingga munculnya kekhawatiran bahwa strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan" untuk itulah Kami menyikapi hal ini" (Wawancara dengan IF.19.3. Senin 9 Juli 2018).

4) Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAIMA Kota Banjar sebagai PTKIS, terdepan di wilayahnya, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2003, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya bagi STAIMA Kota Banjar, sehingga belum menyiapkan Kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, berikut penuturan Wakil Ketua II STAI Cirebon, sebagai berikut Wakil Ketua II STAI Cirebon, sebagai berikut:

"...seperti dipahami bersama, bahwa adanya kebijakan karena adanya masalah, dan setiap kehidupan, apalagi hal ini menyangkut nasib bangsa ke depan, sudah barang tentu akan berhadapan dengan permasalahan, akan tetapi bukan sebaliknya "mengatasi masalah dengan masalah", Kuncinya masalah bukan di tinggalkan, akan tetapi harus didekati dan dihadapi

".....mendekati dan menghadapi itulah yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan pokok, Kami belum mampu menggali dan mengolah informasi menjadi program, sumberdaya Kami terbatas, baik dari segi SDM maupun dari segi finansial, dalam mengatasi masalah kebijakan SKPI ini, dan komitmen terhadap perubahan masih kurang; (Wawancara dengan IF.19.3.1. Senin 9 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAIMA Kota Banjar, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun bukan berarti telah melaksanakan Kebijakan SKPI tidak bermasalah, hal itu mereka menganggap wajar, justru keterbatasan dan kondisinya yang memaksa kesiapan mereka dapat melaksanakan Kebijakan SKPI.

t. STAINU Tasikmalaya (LP-20)

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya merupakan satu dari sekian PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak 4 September 2008, STAI ini, memiliki 3 jurusan/program studi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 565 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 9 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 53 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 2 Mei 2018, sampai saat ini, STAINU Tasikmalaya belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAINU Tasikmalaya, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 10 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa STAINU Tasikmalaya, belum bisa

menafsirkan kebijakan SKPI, padahal PTKIS lain, bisa; Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplemen tasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, yaitu: pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini, respon terhadap Kebijakan SKPI, dan Harapan dari program kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.20.1. Selasa, 10 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak mengapa STAINU Tasikmalaya, belum siap mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua I STAINU Tasikmalaya, sebagai berikut:

"..pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, banyaknya dan rumitnya permasalahan yang harus ditempuh dan dilewati tentunya membuat Kami berfikir keras bagaimana cara mensiasatinya, terlebih ketika dihadapkan suatu pemisah antara idealita dan realita. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga untuk mencapai terlaksananya penerapan kebijakan tersebut, ternyata hal itu Kami belum memilikinya" (Wawancara dengan IF.20.2. Selasa, 10 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah,

dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAINU Tasikmalaya, belum menyusun strategi ini, padahal bagi PTKIS mempunyai kewajiban untuk itu, yang kewajiban itu melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Wakil Ketua II STAINU Tasikmalaya,

"...Kami faham betul bahwa: strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan pada berbagai keadaan dan kendala diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan keterbatasan pengetahuan yang Kami miliki, sehingga ditakutkan strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan, mungkin inilah kekuranganmampuan Kami ". (Wawancara dengan IF.20.3.1. Selasa, 10 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAINU Tasikmalaya, sebagai PTKIS, terdepan di wilayahnya, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1987, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya bagi STAINU Tasikmalaya, sehingga belum menyiapkan Kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, berikut penuturan Wakil Ketua II STAINU Tasikmalaya, sebagai berikut:

"...sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa adanya kebijakan karena adanya masalah, dan setiap kehidupan, apalagi hal ini menyangkut nasib bangsa ke depan, sudah barang tentu akan berhadapan dengan permasalahan, akan tetapi bukan sebaliknya "mengatasi masalah dengan masalah", Kuncinya masalah bukan di tinggalkan, akan tetapi harus didekati dan dihadapi ".....mendekati dan menghadapi itulah yang menjadi persoalan bagi Kami , lagi-lagi terbentur pada persoalan pokok, Kami belum mampu mengali dan megolah informasi menjadi program, sumberdaya Kami terbatas, baik dari segi SDM, maupun dari segi finansial, dalam mengatasi masalah kebijakan SKPI ini, dan komitmen

terhadap perubahan masih kurang;" (Wawancara dengan IF.20.3.2. Selasa, 10 Juli 2018)

Pada prinsipnya STAINU Tasikmalaya, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun bukan berarti telah melaksanakan Kebijakan SKPI tidak bermasalah, hal itu mereka menganggap wajar, justru keterbatasan dan kondisinya yang memaksa kesiapan mereka dapat melaksanakan Kebijakan SKPI.

u. IAIC Tasikmalaya (LP-21)

Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya, merupakan satu dari sekian PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak telah berdiri sejak 23 Desember 1965, Institut ini, memiliki 7 jurusan/program studi. 5 prodi S-1, dan 2 prodi S2. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 994 mahasiswa dibina oleh 93 Dosen dan 21 orang tenaga administrasi, dan tahun ini meluluskan 194. Lulusan sarjana S-1 sebanyak 165. Sarjana, dan prog S2, 39 Magister.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 5 Mei 2018, sampai saat ini, IAIC Tasikmalaya belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana IAIC Tasikmalaya, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 11 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Interpretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan interpretasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu Kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak IAIC Tasikmalaya, belum menafsirkan Kebijakan SKPI, padahal kegiatan itu, merupakan

kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami faham betul bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa Kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun, untuk menerapkan Kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan Kebijakan penerapan SKPI bisa dikatakan Kebijakan baru bagi Kami, khususnya di lingkungan IAIB, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplimentasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Ijazah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.21.1. Rabu, 11 Juli 2018).

Untuk itu, Dekan Fak Tarbiyah, menambahkan: "... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua Kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya Kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami untuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami dalam memprioritaskan kegiatan lebih pada mendahulukan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi" ditutup. (Wawancara dengan IF.21.2. Rabu, 11 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastan, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak IAIC Tasikmalaya, sampai saat ini, belum mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Rektor II, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan,

serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat permasalahan yang harus dihadapi dan adanya suatu pemisah antara idealita dan realita menjadikan kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan pencapaian hasil. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.21.3.1. Rabu, 11 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak IAIC Tasikmalaya, sampai saat ini, belum mampu merancang strategi operasi untuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Dekan Fakultas Syariah IAIC Tasikmalaya, sebagai berikut:

"...Kami memahami bahwa: ".strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan pada keadaan diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki sangat terbatas karena suatu keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan" (Wawancara dengan IF.21.4. Rabu, 11 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya IAIC Tasikmalaya, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1978, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa IAIC Tasikmalaya, belum siap melaksana kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi

kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Warek II IAIC, sebagai berikut:

"...memang benar, bahwa lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1978, akan tetapi, Kami dihadapkan pada persoalan ini, mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman PTKIS lain, pertama; biasanya apabila kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwens./ ancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu PTKIS ditutup), ketiga biasanya kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami, yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 994 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 211, dibina dan dikembangkan oleh 93 tenaga Dosen, dan 21 orag tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu hanya mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi kendala dalam mengatasi persoalan ini" (Wawancara dengan IF.21.3.2. Rabu, 11 Juli 2018).

Pada prinsipnya IAIC Tasikmalaya, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatas dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

v. STAI Siliwagi Garut (LP-22)

STAI Siliwangi Garut, merupakan satu dari sekian PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah beridiri sejak telah beridiri sejak 7 Desember 1976, Instut ini, memiliki 3 jurusan/program studi S-1. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiwa tidak kurang dari 533 mahasiswa dibina oleh 38 Dosen dan 9 orang tenaga adminstrasi, dan tahun ini meluluskan 53. sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Bedasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 5 Mei 2018, sampai saat ini, STAI Siliwangi Garut, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Siliwangi Garut, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa

saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 12 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intrepestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa STAI Siliwangi Garut, belum bisa menafsirkan kebijakan SKPI, padahal PTKIS lain, bisa; Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplemen tasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, yaitu: pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini, respon terhadap Kebijakan SKPI, dan Harapan dari program kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.22.1. Kamis, 12 Juli 2018).

2) Aspek Pengorgasiaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak mengapa STAI Siliwangi Garut, belum siap mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua I STAI Siliwangi Garut, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat

permasalahan dan rumitnya persoalan yang harus dihadapi dan dilewati sangatlah tidak memungkinkan untuk terwujudnya penerapan kebijakan tersebut. Itulah barangkali menjadi kelemahan Kami” (Wawancara dengan IF.22.2. Kamis, 12 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak mengapa STAI Siliwangi Garut, belum mampu merancang strategi operasi untuk menerapkan kebijakan SKPI, yang kewajiban itu, melekat pada tupoksi mereka. Berikut, penuturan alasan Wakil Ketua II STAI Siliwangi Garut, sebagai berikut:

“.....Kami sependapat bahwa: “.strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, kalau tidak strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” untuk itu lah kurang mampuan Kami” (Wawancara dengan IF.22.3.1. Kamis, 12 Juli 2018).

4) AspekKendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Siliwangi Garut, sebagai PTKIS, terdepan di wilayahnya, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1987, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya bagi STAI Siliwangi Garut, sehingga belum menyiapkan Kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, berikut penuturan Wakil Ketua II STAI Siliwangi Garut, sebagai berikut:

"...sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa adanya kebijakan karena adanya masalah, dan setiap kehidupan, apalagi hal ini menyangkut nasib bangsa ke depan, sudah barang tentu akan berhadapan dengan permasalahan, akan tetapi bukan sebaliknya "mengatasi masalah dengan masalah", Kuncinya masalah bukan di tinggalkan, akan tetapi harus didekati dan dihadapi ".....mendekati dan menghadapi itulah yang menjadi persoalan bagi Kami, lagi-lagi terbentur pada persoalan pokok, Kami belum mampu mengali dan megolah informasi menjadi program, sumberdaya Kami terbatas, baik dari segi SDM, maupun dari segi finansial, dalam mengatasi masalah kebijakan SKPI ini, dan komitmen terhadap peubahan masih kurang;" (Wawancara dengan IF.22.3.2 Kamis, 12 Juli 2018)

Pada prinsipnya STAI Siliwangi Garut, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun bukan berarti telah melaksanakan Kebijakan SKPI tdak bermasalah, hal itu mereka menganggap wajar, justru keterbatas dan kondisilah yang memaksa kesiapan mereka dapt melaksanakan Kebijakan SKPI.

w. STAI Al-Falah Cicalengka (LP-23)

STAI Al-Falah Cicalengka merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang telah beridiri sejak 15 Juni 1986, STAI ini, memiliki 3 jurusan/program sudi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiwa tidak kurang dari 311 mahasiswa dibina oleh 36 Dosen dan 9 orang tenaga adminstrasi, dan tahun ini meluluskan 87 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Bedasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 8 Mei 2018, sampai saat ini, STAI Al-Falah Cicalengka belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana STAI Al-Falah Cicalengka, dalam penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 11 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa STAI Al-Falah Cicalengka, belum bisa menafsirkan kebijakan SKPI, padahal PTKIS lain, bisa; Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

".....Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplemen tasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, yaitu: pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini, respon terhadap Kebijakan SKPI, dan Harapan dari program kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan" (Wawancara dengan IF.23.1. Rabu, 11 Juli 2018).

2) Aspek Pengorganisaian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian kebijakan, (kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaann yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapastas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan kebijakan, hal ini berlaku pada semua kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak mengapa STAI Al-Falah Cicalengka, belum siap mengorganisasikan kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua I STAI Al-Falah Cicalengka, sebagai berikut:

"...pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk

memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat permasalahan dan rumitnya persoalan yang harus dilewati hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh dari itu adalah nampaknya kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas itulah barangkali menjadi kelemahan, hal itu yang belum Kami miliki” (Wawancara dengan IF.23.2. Rabu, 11 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak mengapa STAI Al-Falah Cicalengka, belum menyusun strategi ini, padahal bagi PTKIS mempunyai kewajiban untuk itu, yang kewajiban itu melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Wakil Ketua II STAI Al-Falah Cicalengka, sebagai berikut:

“...Kami memahami bahwa: “.strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau kebijakan, terlebih dalam mengoperasikan penerapan kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihadapkan pada keadaan diantaranya waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, kalau tidak strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan kebijakan ini kandas di tengah jalan” untuk itu lah kurang kemampuan Kami ” (Wawancara dengan IF.23.3.1. Rabu, 11 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Al-Falah Cicalengka, sebagai PTKIS, terdepan di wilayahnya, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1987, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya

tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya bagi STAI Al-Falah Cicalengka, sehingga belum menyiapkan Kebijakan SKPI?. Terkait dengan itu, berikut penuturan Wakil Ketua II STAI Al-Falah Cicalengka, sebagai berikut:

“...seperti dipahami bersama, bahwa adanya kebijakan karena adanya masalah, dan setiap kehidupan, apalagi hal ini menyangkut nasib bangsa ke depan, sudah barang tentu akan berhadapan dengan permasalahan, akan tetapi bukan sebaliknya “mengatasi masalah dengan masalah”, Kuncinya masalah bukan di tinggalkan, akan tetapi harus didekati dan dihadapi “.....mendekati dan menghadapi itulah yang menjadi persoalan bagi Kami , lagi-lagi terbentur pada persoalan pokok, Kami belum mampu mengali dan megolah informasi menjadi program, sumberdaya Kami terbatas, baik dari segi SDM, maupun dari segi finansial, dalam mengatasi masalah kebijakan SKPI ini, dan komitmen terhadap peubahan masih kurang;” (Wawancara dengan IF.23.3.2. Rabu, 11 Juli 2018)

Pada prinsipnya STAI Al-Falah Cicalengka, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun bukan berarti telah melaksanakan Kebijakan SKPI tdak bermasalah, hal itu mereka menganggap wajar, justru keterbatas dan kondisilah yang memaksa kesiapan mereka dapt melaksanakan Kebijakan SKPI.

x. STAI Siliwangi Cimahi (LP-24)

STAI Siliwangi Cimahi, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar-Banten, ia telah berdiri sejak 22 Desember 1971. STAI ini, memiliki 4 jurusan/program sudi. Tahun akademik 2017/2018 membina dan mengembangkan mahasiwa tidak kurang dari 673 mahasiswa dibina oleh 41 Dosen dan 12 orang tenaga adminstrasi, dan tahun ini meluluskan 134 sarjana S-1.

Sejumlah alumni tersebut, sejatinya sudah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selain dari Ijazah dan Transkrip nilai. Bedasarkan KMA No. 1 Tahun 2016, yang diberlakukan sejak 12 Januari 2016. Namun, berdasar pada hasil observasi tanggal 9 Mei 2018, sampai saat ini, STAI Siliwangi Cimahi, belum menerbitkan SKPI, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana, STAI Siliwangi Cimahi, dalam

penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI,. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah dideskripsikan hasil wawancara tanggal 12 Juli 2018, sebagai berikut:

1) Aspek Intrepretasi/Penafsiran Kebijakan

Kegiatan intreprestasi/penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, menjadi prasyarat utama dalam memahami suatu kebijakan. Persoalannya dalam penelitian ini, mengapa pihak STAI Siliwangi Cimahi, belum menafsirkan kebijakan SKPI, padahal l kegiatan itu, merupaka kewajibanya melekat pada mereka. Berikut, penuturan alasan mereka, sebagai berikut:

"...Kami menyadari dan memahami bahwa PMA. No.1 tahun 2016. tentang Ijazah, Transkrip Akademik, daan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa kebijakan itu berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Namun untuk menerapkan kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI sebenarnya adalah kebijakan baru bagi Kam, khususnya di lingkungan STAI Siliwangi Cimahi, setelah Kami mencermati pasal demi pasal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 23, ternyata untuk mengimplementasikannya tidak semudah meluluskan ijazah. Untuk sementara Kami menganggap, bahwa kewajiban utama dalam menyikapi KMA no.1/2016, yang utama adalah meluluskan Izajah dan transkrip nilai" (Wawancara dengan IF.24.1. Kamis, 12 Juli 2018).

Untuk itu, Ketua Prodi PAI, menambahkan: *"... hal itu belum dioperasikan, bukan berarti mengesampingkan kewajiban. Pada prinsipnya Kami setuju bahwa semua Kebijakan wajib dilaksananak, seperti halnya Kebijakan SKPI, bagi Kami hal itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan TP, hal itu, menjadi tanggungjawab Kami unuk segera dilaksanakan, namun dibalik itu: Kami dalam memprioritaskan kegiatan lebih pada mendahulukan yang jelas sanksinya seperti pada tahun ini setiap pendidikan tinggi harus, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi; dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/761a/2014, bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi institusi paling lambat tanggal 10 Agustus 2019., apabila Kami tidak melakukannya kena sanksi"ditutup atau merger. (Wawancara dengan IF.24.2. Kamis, 12 Juli 2018).*

2) Aspek Pengorganisasian Kebijakan

Tujuan pengorganisasian Kebijakan, (Kebijakan penerapan SKPI), yaitu meningkatkan posisi tawar terhadap PTKIS, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas, menumbuhkan kondisi kritis pengorganisasian, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan Kebijakan, hal ini berlaku pada semua Kebijakan. Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, mengapa pihak STAI Siliwangi Cimahi, sampai saat ini, belum mengorganisasikan Kebijakan SKPI, padahal kewajiban itu, melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan dikemukakan Wakil Ketua II, sebagai berikut:

".....pada prinsipnya, Kami sependapat bahwa pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku, terutama pada jajaran yang terkait untuk memproses SKPI, sampai ke tangan alumni. Namun, dibalik itu, tingkat permasalahan hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu pemisah antara idealita dan realita. Pembelajaran yang diperoleh dari itu berupa pengidentifikasian kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan hasil. pengetahuan di atas. Itulah barangkali menjadi kelemahan, sehingga pengorganisasikan Kebijakan SKPI, belum terlaksana" (Wawancara dengan IF.24.3.1 Kami s, 12 Juli 2018).

3) Aspek Strategi Pengoperasian Kebijakan

Strategi pengoperasian/Penerapan Kebijakan SKPI, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Persoalan kemudian, mengapa pihak STAI Siliwangi Cimahi, sampai saat ini, belum menyusun strategi operasi Kebijakan SKPI, yang kewajiban melekat pada mereka, Berikut, penuturan alasan Ketua Prodi PAI STAI Siliwangi Cimahi, sebagai berikut:

"...Kami memahami bahwa .strategi pengoperasian kegiatan memerlukan pertimbangan yang matang agar program atau Kebijakan, terlebih

dalam mengoperasikan penerapan Kebijakan SKPI, kegiatan itu, dapat berjalan dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang optimal menjadi harapan Kami, namun hal itu tidak mudah dilakukan bagi Kami, karena Kami dihapkan dengan keadaan diantaranya waktu, sarana, sumberdaya yang harus dipersiapkan, dan atau barangkali pengetahuan yang Kami miliki oleh setiap individu sangat terbatas oleh keadaan, sehingga, strategi yang sudah dirancang untuk mengoperasikan Kebijakan ini kandas di tengah jalan” (Wawancara dengan IF.24.4. Kamis, 12 Juli 2018).

4) Aspek Kendala dalam Kesiapan dalam implementasi Kebijakan SKPI

Masa lalu telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kesiapan tiap individu terhadap masalah dihadapi. Setiap individu memiliki kesiapan dasar yang dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang dihadapi. Seperti halnya STAI Siliwangi Cimahi, sebagai PTKIS, tertua di wilayah Banten, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999, sudah barang tentu, untuk menanggulangi hal demikian, sejatinya tidak menjadi kesulitan. Akan tetapi, yang menjadi pernyataan dalam penelitian ini, mengapa STAI Siliwangi Cimahi, belum siap melaksana Kebijakan SKPI, faktor apa-apa saja yang menjadi kendalanya?. Terkait dengan itu, alasan yang dipaparkan oleh Waket II STAI Siliwangi Cimahi, sebagai berikut:

“...betul, lembaga Kami telah berdiri sejak tahun 1999, akan tetapi, Kami menghadai persoalan ini, mungkin sama dan sepakat dengan teman-teman ptkis lain, pertama; biasanya apabila Kebijakan baru diturunkan dilengkapi dengan informasi lengkap (juknis); kedua; biasanya Kebijakan baru dilengkapi dengan adanya kosekwensi./ancaman (misalnya...apabila belum melaksanakan. Batas waktu.. PTKIS ditutup), ketiga biasanya Kebijakan baru begitu akan dioperasikan, diadakan sosialisasi oleh diktis/kopertais; ketiga yang paling mendasar bagi Kami, yaitu saat ini Kami memiliki tidak kurang dari 456 mahasiswa aktif, meluluskan alumni tahun ini sebanyak 565, dibina dan dikembangkan oleh 38 tenaga Dosen, dan 9 tenaga kependidikan, yang notabene kebanyakan mereka tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga” dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa. Tidak hanya itu saja, keterbatasan SDM Kami juga menjadi

kendala dalam mengatasi persoalan ini” (Wawancara dengan IF.24.3.1. Kamis, 12 Juli 2018).

Pada prinsipnya STAI Siliwangi Cimahi, memahami, dan mendukung pentingnya terhadap penerapan SKPI, namun keterbatasan dan kondisi yang memaksa mereka belum siap melaksanakan Kebijakan tersebut.

2. Temuan Penelitian

a. Temuan Berdasarkan Situs Tunggal

Berdasar pada fokus penelitian dan hasil observasi, wawancara dan dokumen. Dalam bagian ini disajikan temuan situs, tunggal dari 24 PTKIS, berdasar pada fokus masalah penelitian yaitu: penafsiran Kebijakan SKPI; mengorganisasikan penerapan Kebijakan SKPI; merencanakan strategi Penerapan Kebijakan SKPI; dan apa kendala dalam mengimplemetasikan Kebijakan SKPI, tersebut. Untuk Hal itu, sebagai berikut:

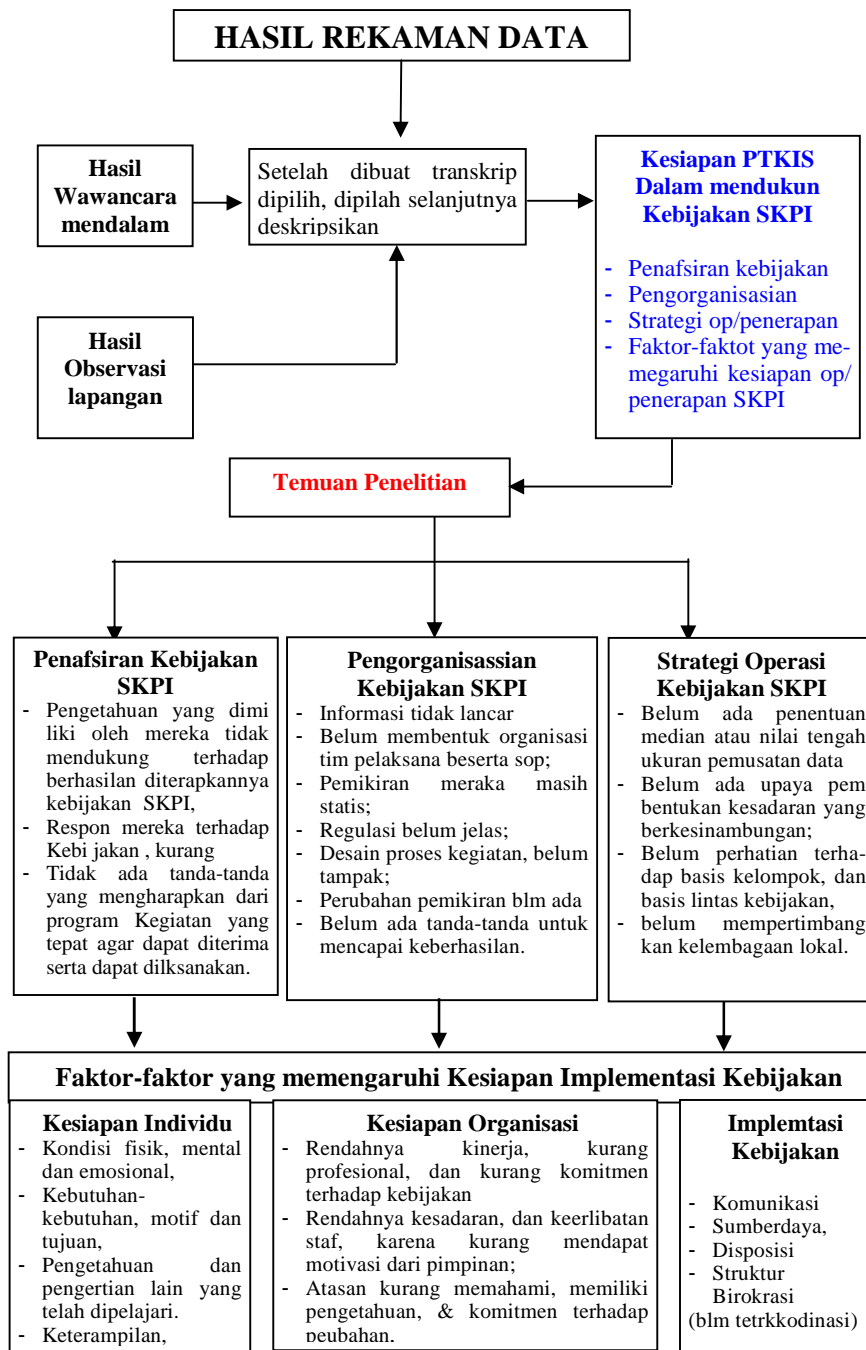
1) FAI Universitas Matlaul Anwar Pandeglang (LP-1)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 21 April 2018; wawancara (IF.1:1,2,3,.4), tanggal 25 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijaksanaan penerapan SKPI” di Fakultas Agama Islam Universitas Matlaul Anwar Pandeglang, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.

- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
 - (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Agama Islam UNMA Pandeglang, dideskripsikan pada gambar 4.2..01, berikut:



Gambar 4.2.01
Temuan data tunggal di FAI UNMA

Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..01, menunjukkan bahwa FAI UNMA, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

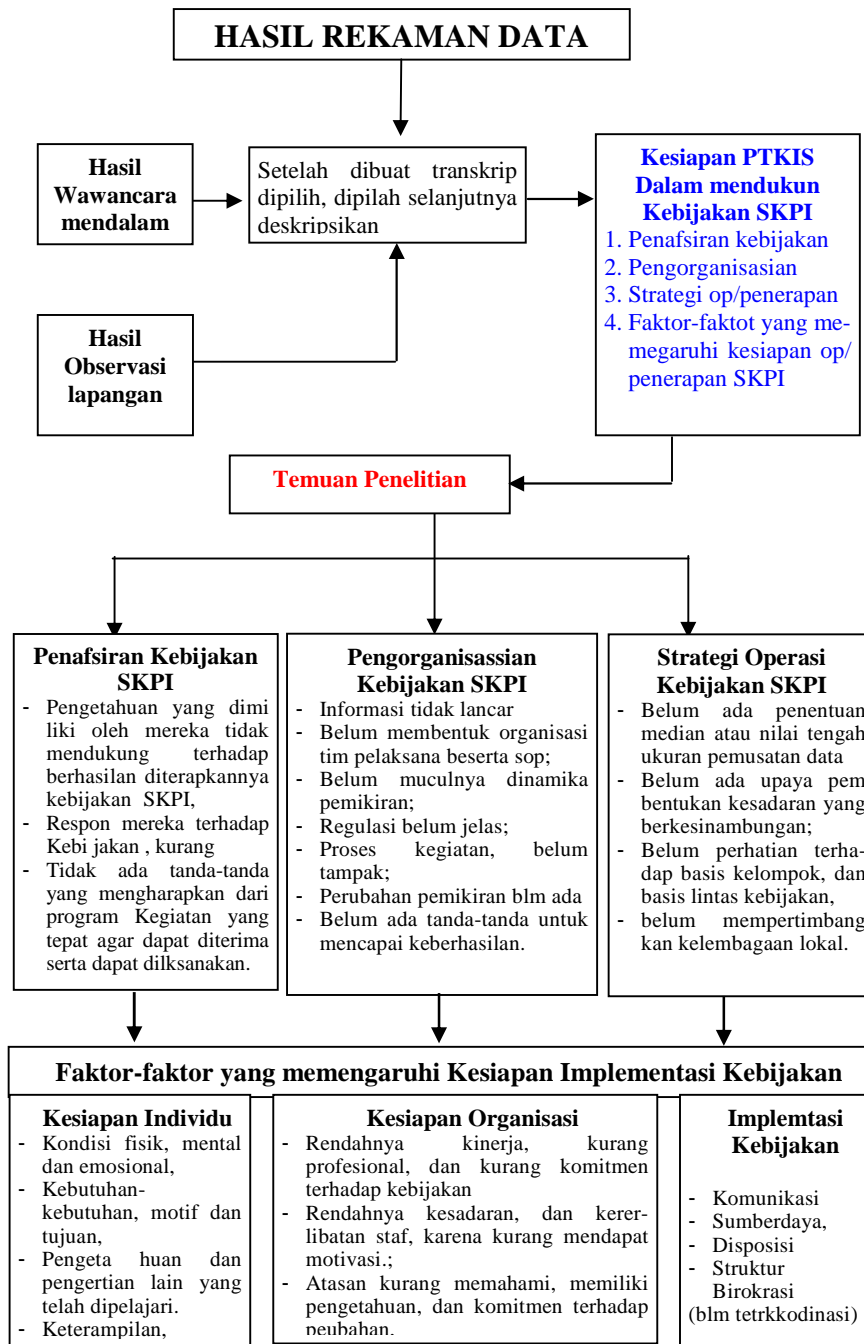
2) Insitut Agama Islam Banten Serang (LP-2)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 21 April 2018; wawancara dengan (IF.2:1,2,3,4) tanggal 26 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakanjakan penerapan SKPI” di Institut Agama Islam Banten, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran:** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) Pengetahuan mereka tentang Kebijakan SKPI KMA, nomor 1 tahun 2016, belum mendukung terhadap penerapan Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI masih kurang dan
 - (c) tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang mengarahkan program kegiatan kegiatan penerapan SKPI, dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian:** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi yang diterima mereka tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya tanda-tanda pembentukan organisasi/tim pelaksana beserta SOP;
 - (c) pemikiran mereka masih statis;
 - (d) tidak ditemukan adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan Kebijakan;
 - (e) tidak ditemukan rancangan proses belangsungnya kegiatan;
 - (f) belum adanya perubahan pemikiran kerah pelaksanaan Kebijakan,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan:** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok Kebijakan, maupun basis lintas Kebijakan, serta
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; komunikasi; sumberdaya, disposisi; struktur birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di IAIB Serang, dideskripsikan pada gambar 4.2..02, berikut:



Gambar 4.2..02
Temuan data tunggal di IAIB Serang
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..02, menunjukkan bahwa IAIB Serang, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

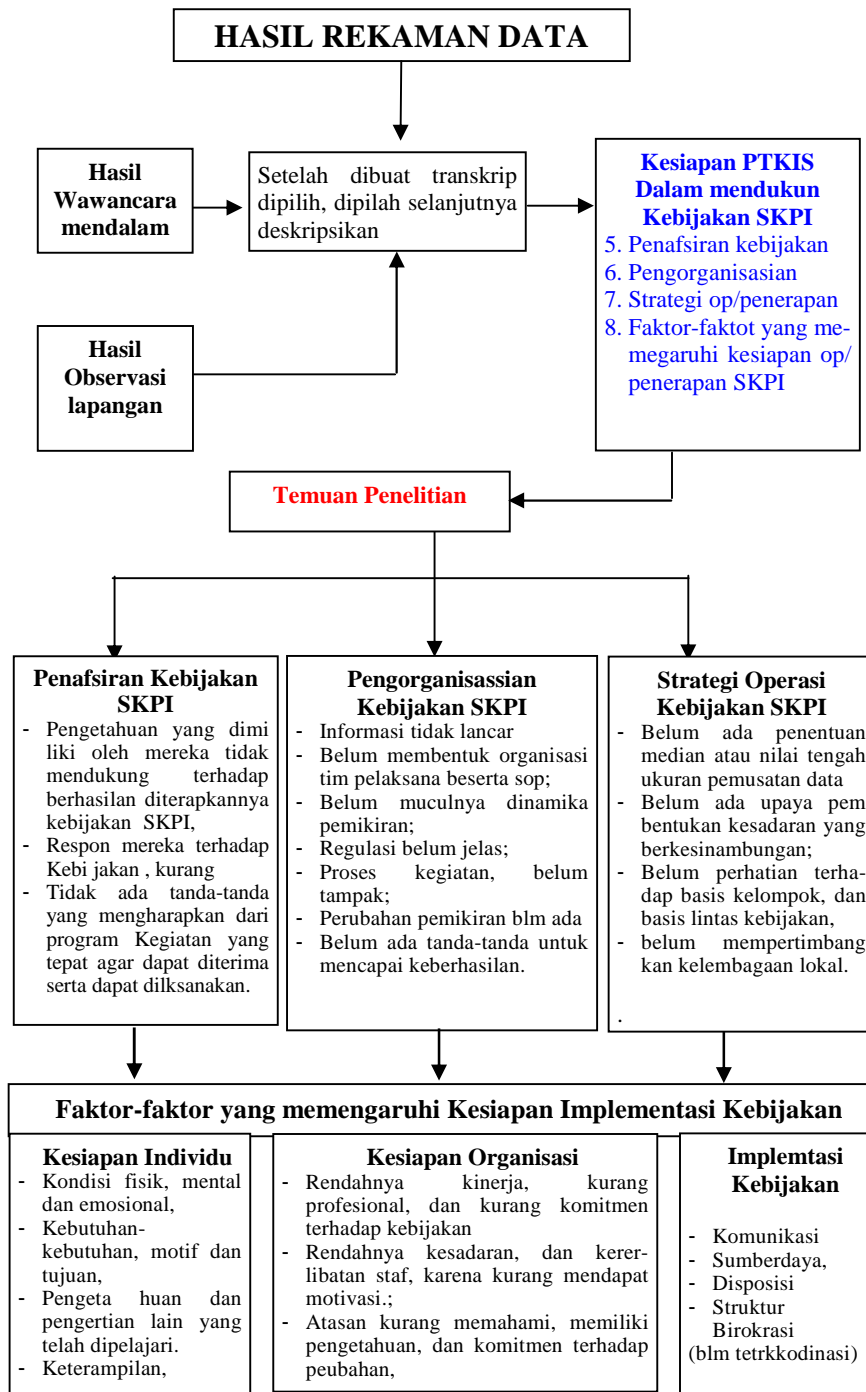
3) STAI Latansa Mashiro (LP-3)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 24 April 2018; wawancara dengan (IF.3:1,2,3,4) tanggal 29 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Latansa Mashiro, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) pengetahuan mereka tentang Kebijakan SKPI KMA, nomor 1 tahun 2016, belum mendukung terhadap penerapan Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI, menunjukkan tanda kesiapan
 - (c) adanya tanda-tanda yang mengarahkan program kegiatan kegiatan penerapan SKPI, dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian,** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi yang diterima mereka tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya tanda-tanda pembentukan organisasi/tim pelaksana beserta SOP;
 - (c) pemikiran mereka masih statis;
 - (d) tidak ditemukan adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan Kebijakan;
 - (e) tidak ditemukan rancangan proses belangsungnya kegiatan;
 - (f) belum adanya perubahan pemikiran kerah pelaksanaan Kebijakan,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok Kebijakan, maupun basis lintas Kebijakan, serta
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan;
 - (b) dalam mengorganisasikan kebijakn; regulasi belum jelas; desain proses kegiatan, belum tampak;
 - (c) dalam implematasi Kebijakan, bertumpu pada persoalan komunikasi; sumberdaya, disposisi; struktur birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Latansa Mashiro, dideskripsikan pada gambar 4.2..03, berikut:



Gambar 4.2..03

Temuan data tunggal di STAI Latansa Mashiro

Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..03, menunjukkan bahwa STAI Latansa Mashiro, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

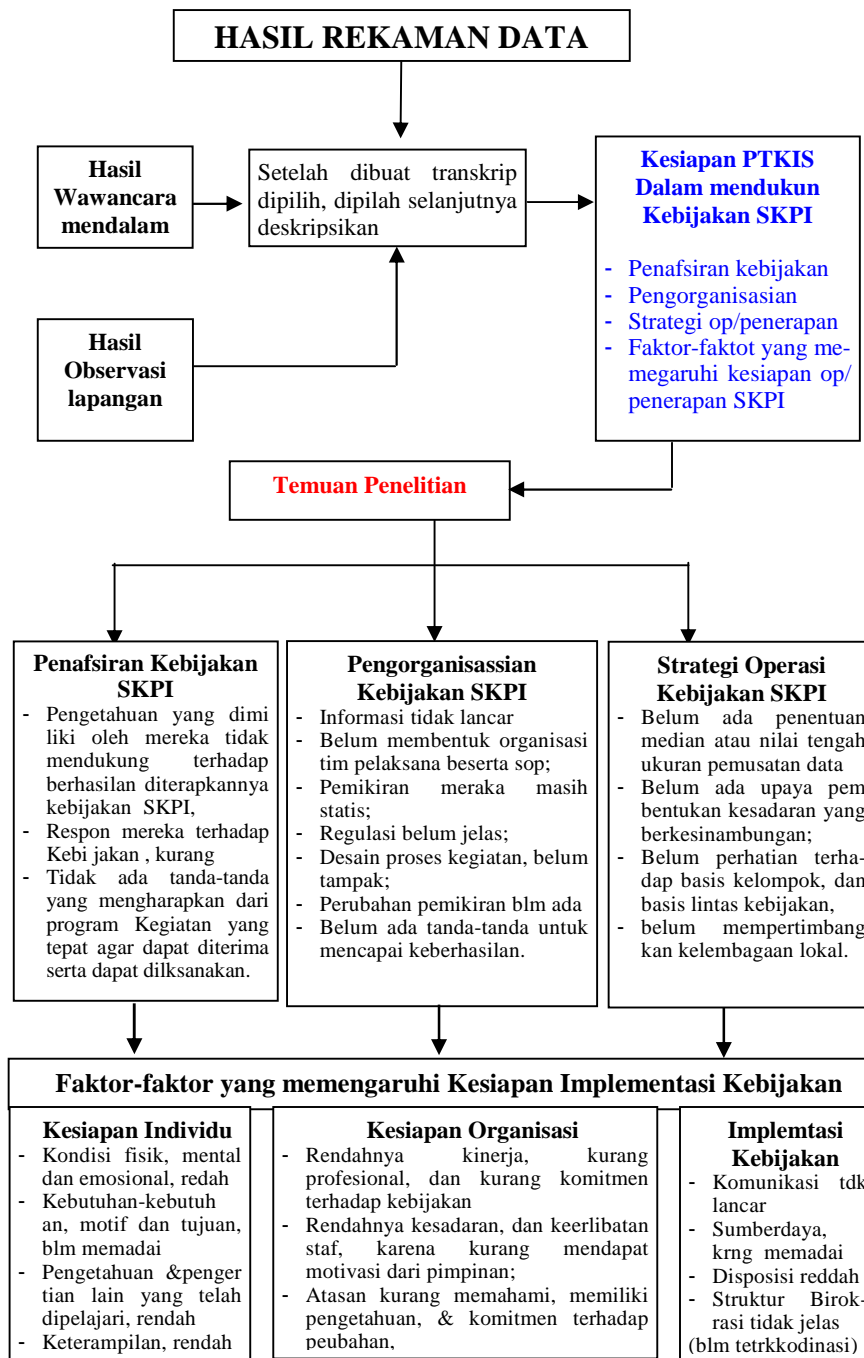
4) STAI Fatahilah (LP-4)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 21 April 2018; wawancara dengan (IF.1:1,2,3,4), tanggal 25 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Fatahilah Serpong Tangerang Selatan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Fatahilah Serpong Tangerang Selatan, dideskripsikan pada gambar 4.2..04 berikut:



Gambar 4.2..04

Temuan data tunggal di STAI Fatahilah Serpong Tangerang Selatan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..04, menunjukkan bahwa STAI Fatahilah Serpong Tangerang Selatan, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

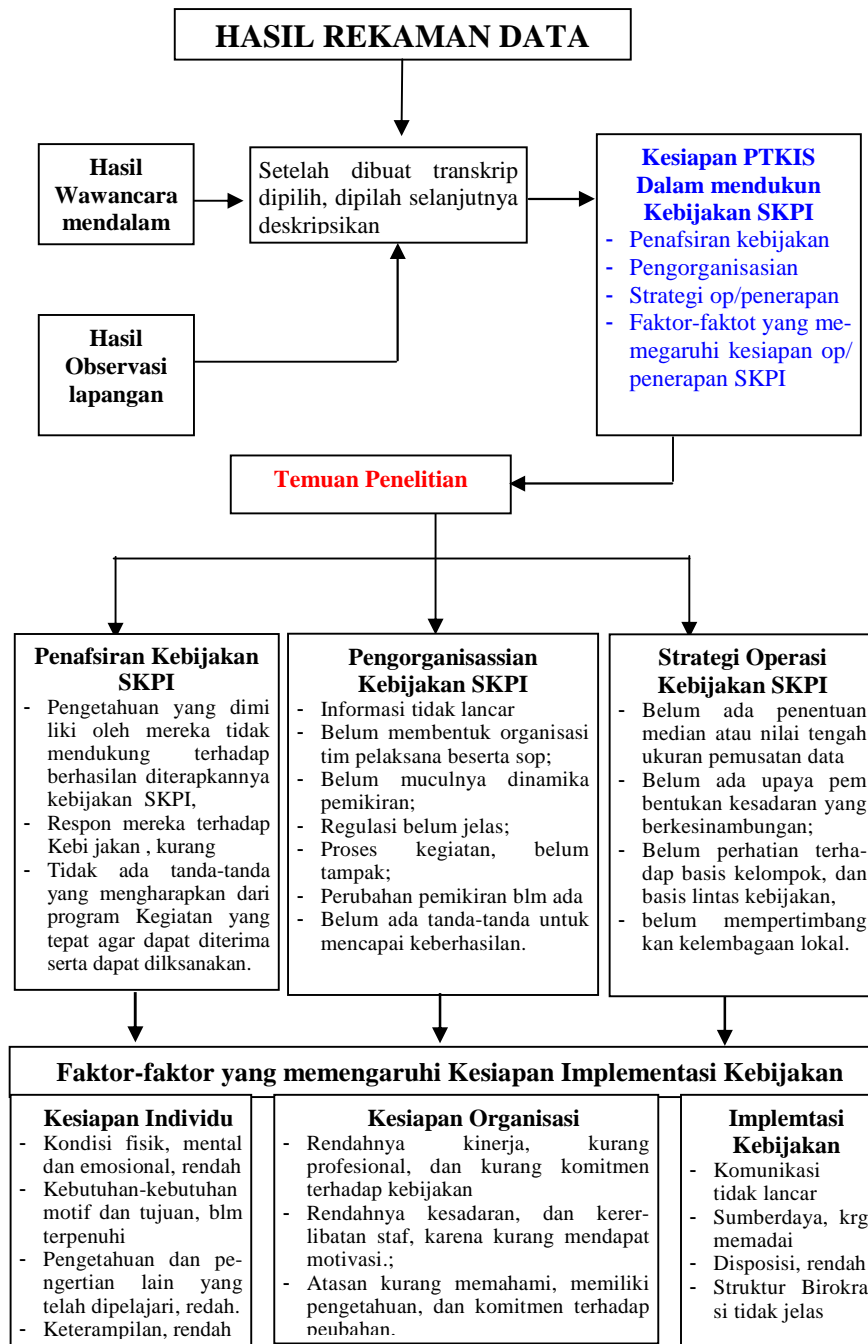
5) STAI Al-Karimiyah Depok (LP-5)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 21 April 2018; wawancara dengan (IF:5:1,2,3,4), tanggal 26 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakanjakan penerapan SKPI” di STAI Al-Karimiyah, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Al-Karimiyah, dideskripsikan pada gambar 4.2..05, berikut:



Gambar 4.2..05
Temuan data tunggal di STAI Kharisma
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..05, menunjukkan bahwa STAI Al-Karimiyah, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

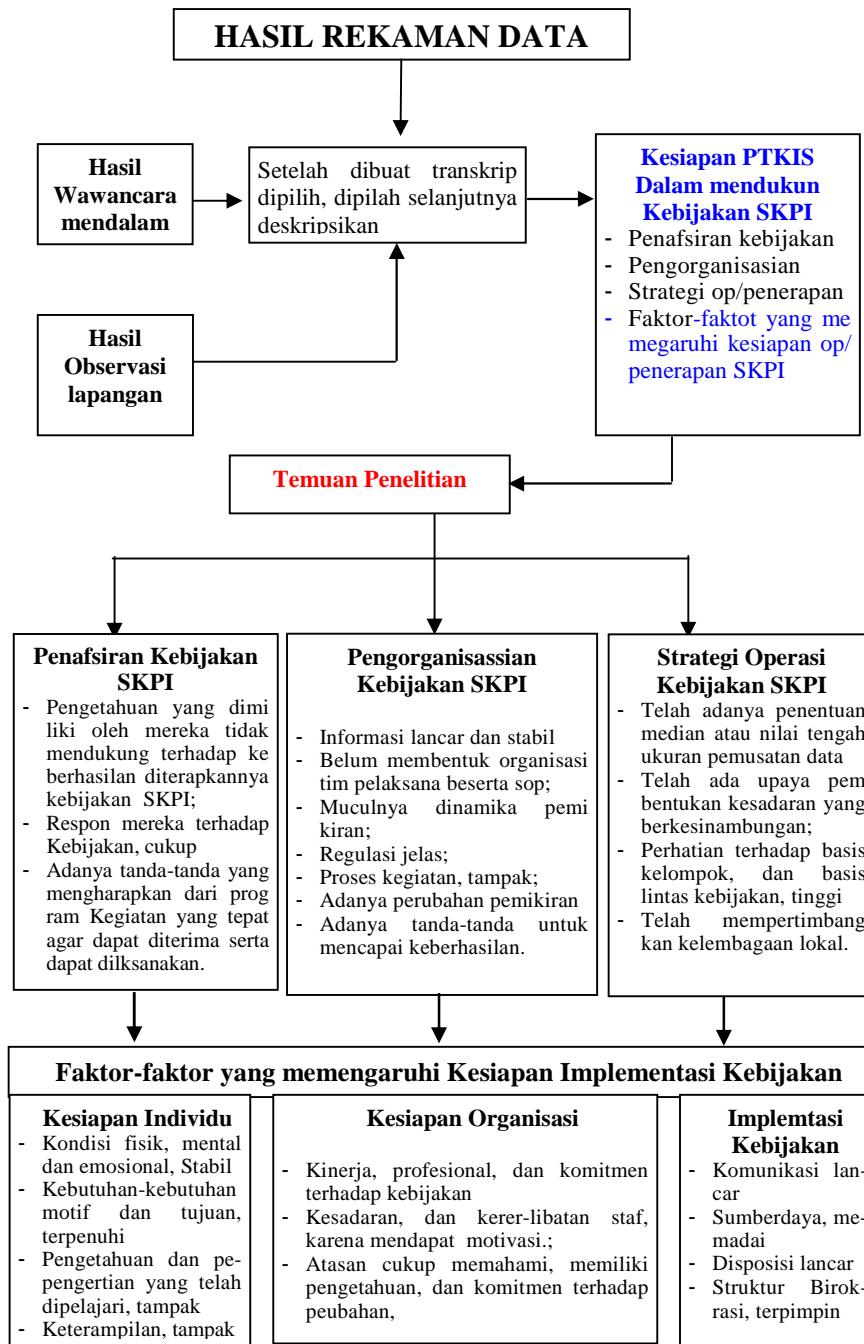
6) FAI Univ Juanda Bogor (LP-6)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 24 April 2018; wawancara dengan (IF.6:1,2,3), tanggal 29 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di Fakultas Pendidikan dan Studi Islam FPSI-Universitas Djuanda Bogor, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) pengetahuan mereka tentang Kebijakan SKPI KMA, nomor 1 tahun 2016, telah mendukung terhadap penerapan Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI cukup memadai dan
 - (c) sudah tampak adanya tanda-tanda yang mengarahkan program kegiatan kegiatan penerapan SKPI, dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi yang diterima mereka lancar dan stabil;
 - (b) sudah adanya tanda-tanda pembentukan organisasi/tim pelaksana beserta SOP;

- (c) pemikiran mereka stabil;
 - (d) adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan Kebijakan;
 - (e) rancangan proses belangsungnya kegiatan jelas;
 - (f) adanya tanda-tanda perubahan pemikiran kerah pelaksanaan Kebijakan,
 - (g) telah menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; ditemukan, bahwa:
- (a) adanya ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) telah memperhatikan basis kelompok Kebijakan, maupun basis lintas Kebijakan, serta
 - (c) telah dilengkapi dengan mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** dapat diatasi dengan mengedepankan/memprioritaskan:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, tampak; dan
 - (c) Kebijakan; komunikasi; sumberdaya, disposisi; struktur birokrasi; terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Pendidikan dan Studi Islam FPSI-Universitas Djuanda Bogor, dideskripsikan pada gambar 4.2..06, berikut:



Gambar 4.2..06
Temuan data tunggal di FPSI-Universitas Djuanda
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..06, menunjukkan bahwa Fakultas Pendidikan dan Studi Islam FPSI-Universitas Djuanda Bogor, telah mumpuni dalam meningplementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan patut menjadi rujukan.

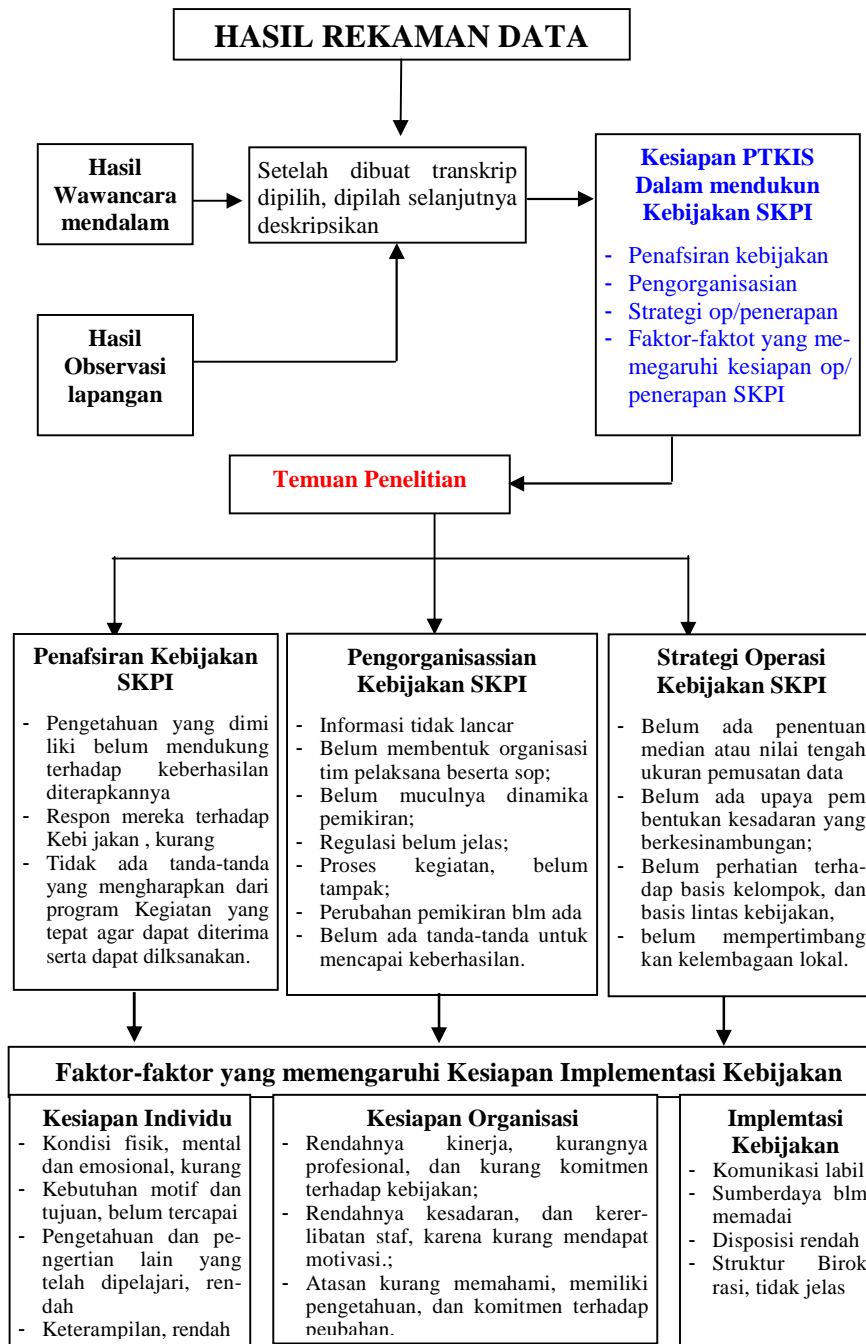
7) IAIN Laroiba Bogor (LP-7)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 24 April 2018; wawancara dengan (IF. 7:1,2,3), tanggal 30 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijaksanaan penerapan SKPI” di IAIN Laroiba, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di IAIN Laroiba, dideskripsikan pada gambar 4.2..07, berikut:



Gambar 4.2..07
Temuan data tunggal di IAIN Laroiba
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..07, menunjukkan bahwa IAIN Lariba, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

8) STAI Kharisma Sukabumi (LP-8)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 24 April 2018; wawancara dengan (IF.8:1,2,3,4,5), tanggal 30 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Kharisma ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:

(d) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,

(e) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan

(f) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.

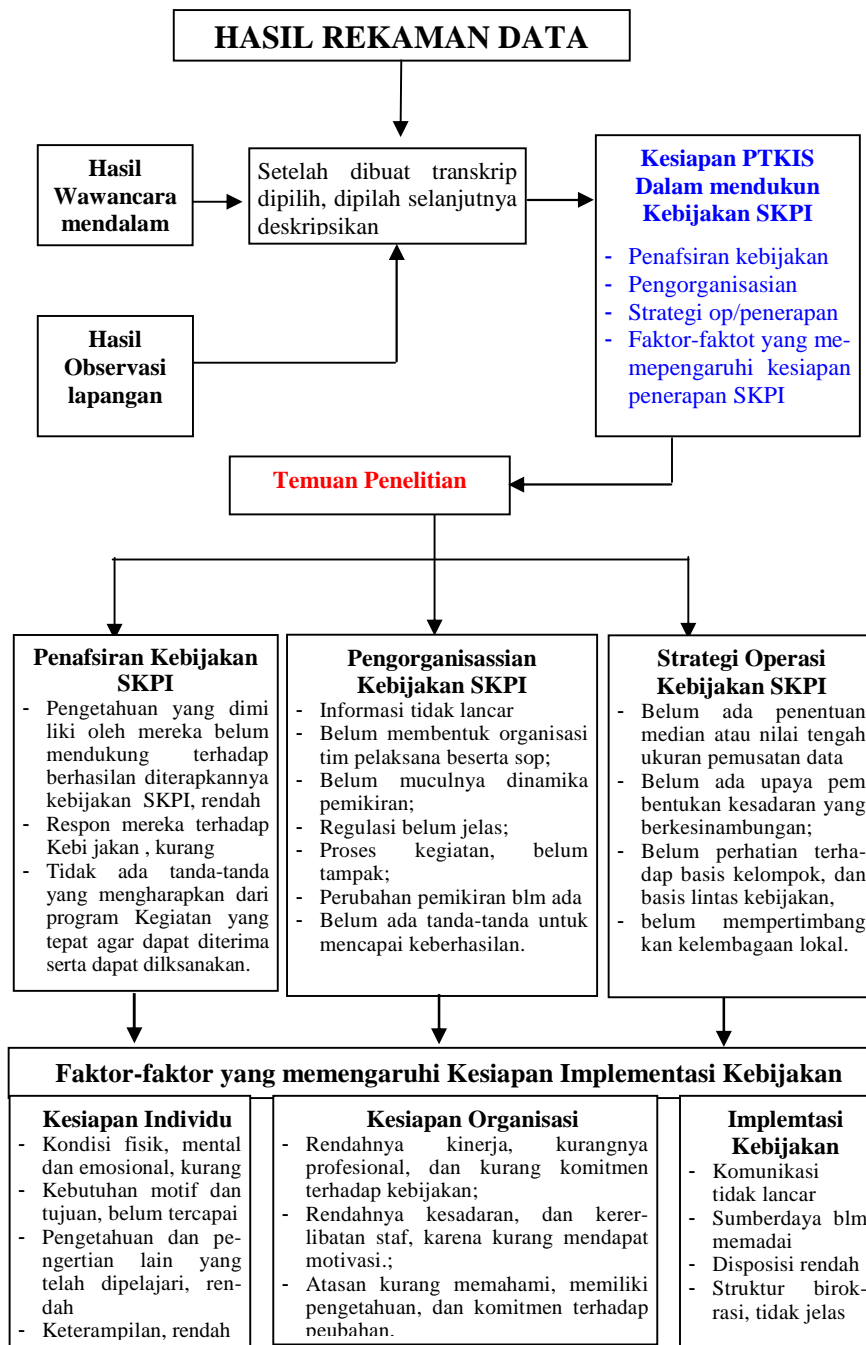
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:

(a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

(b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;

- (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di IAIN Laroiba, dideskripsikan pada gambar 4.2.,08, berikut:



Gambar 4.2..08
Temuan data tunggal di STAI Kharisma Sukabumi
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..08, menunjukkan bahwa STAI Kharisma, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

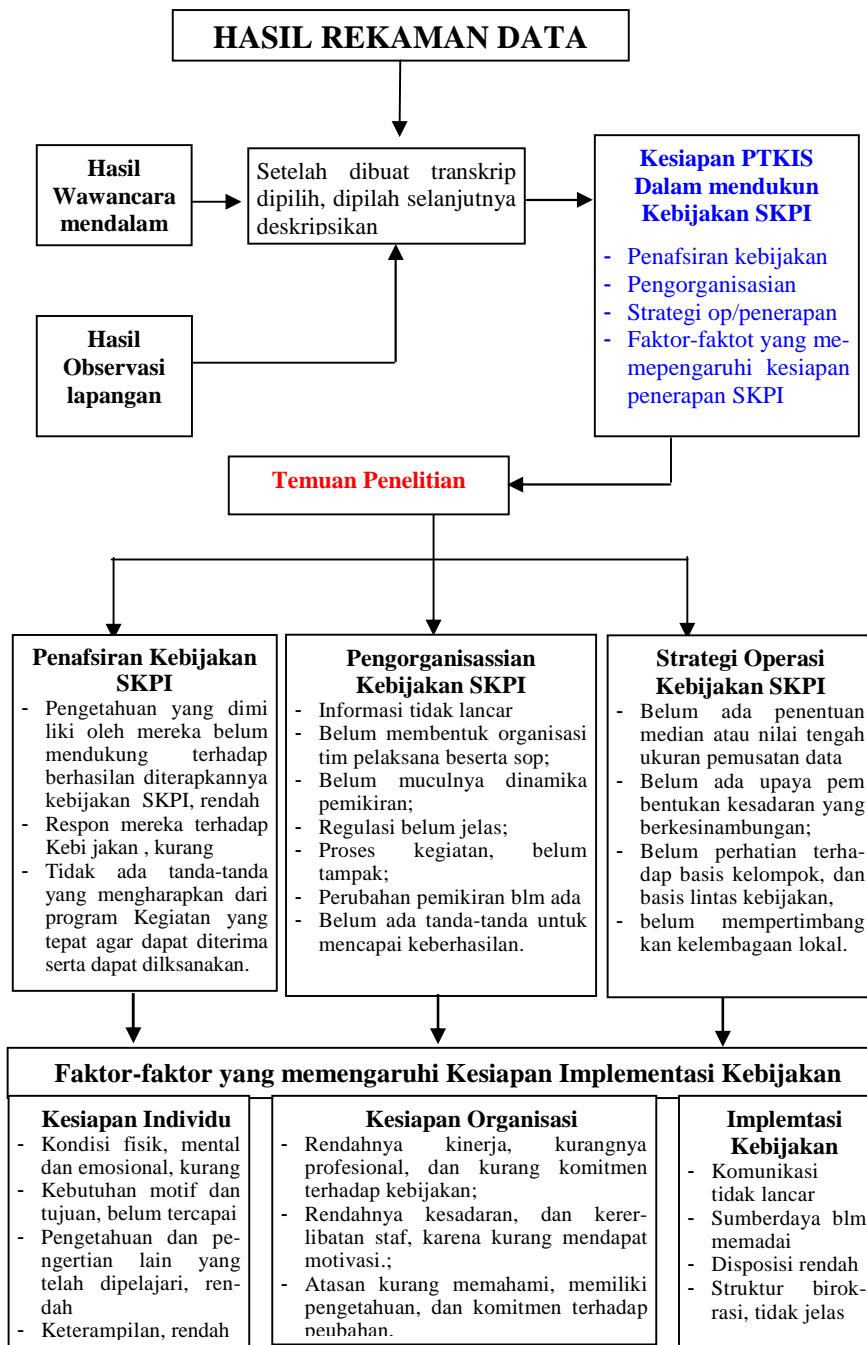
9) STAI Sukabumi Kota Sukabumi (LP-9)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 24 April 2018; wawancara dengan (IF.9: 1,2,3,4), tanggal 30 Juni 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakanjakan penerapan SKPI” di STAI Kharisma ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Sukabumi,, dideskripsikan pada gambar 4.2..09, berikut:



Gambar 4.2..09
Temuan data tunggal di STAI Sukabumi
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..09, menunjukkan bahwa STAI Sukabumi, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

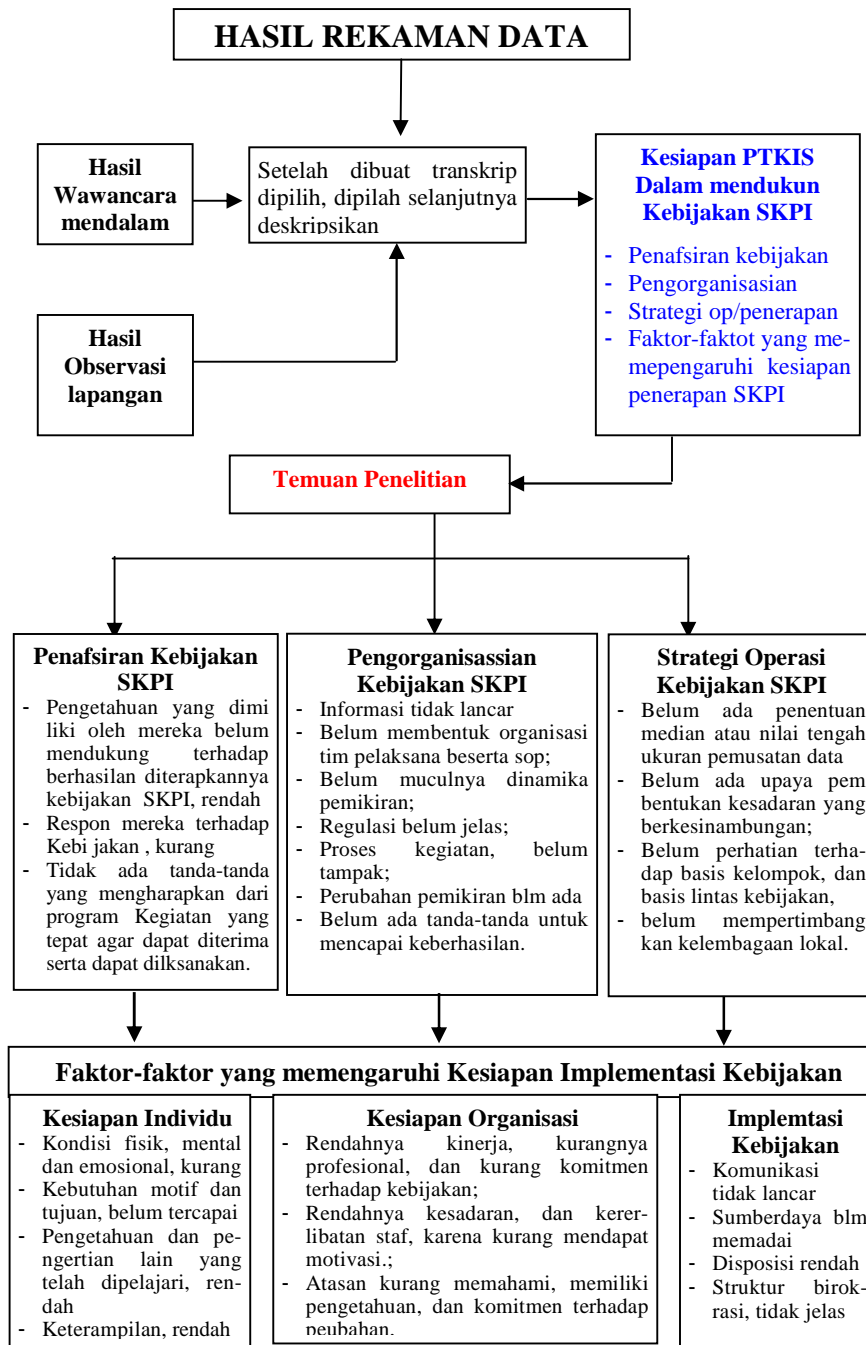
10) STAI Nurul Hikmah Cianjur (LP-10)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 26 April 2018; wawancara dengan (IF.10:1,2,3,4), tanggal 3 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Kharisma ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Nurul Hikmah, dideskripsikan pada gambar 4.2..10, berikut:



Gambar 4.2..10
Temuan data tunggal di STAI Nurul Hikmah
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..10, menunjukkan bahwa STAI Kharisma, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

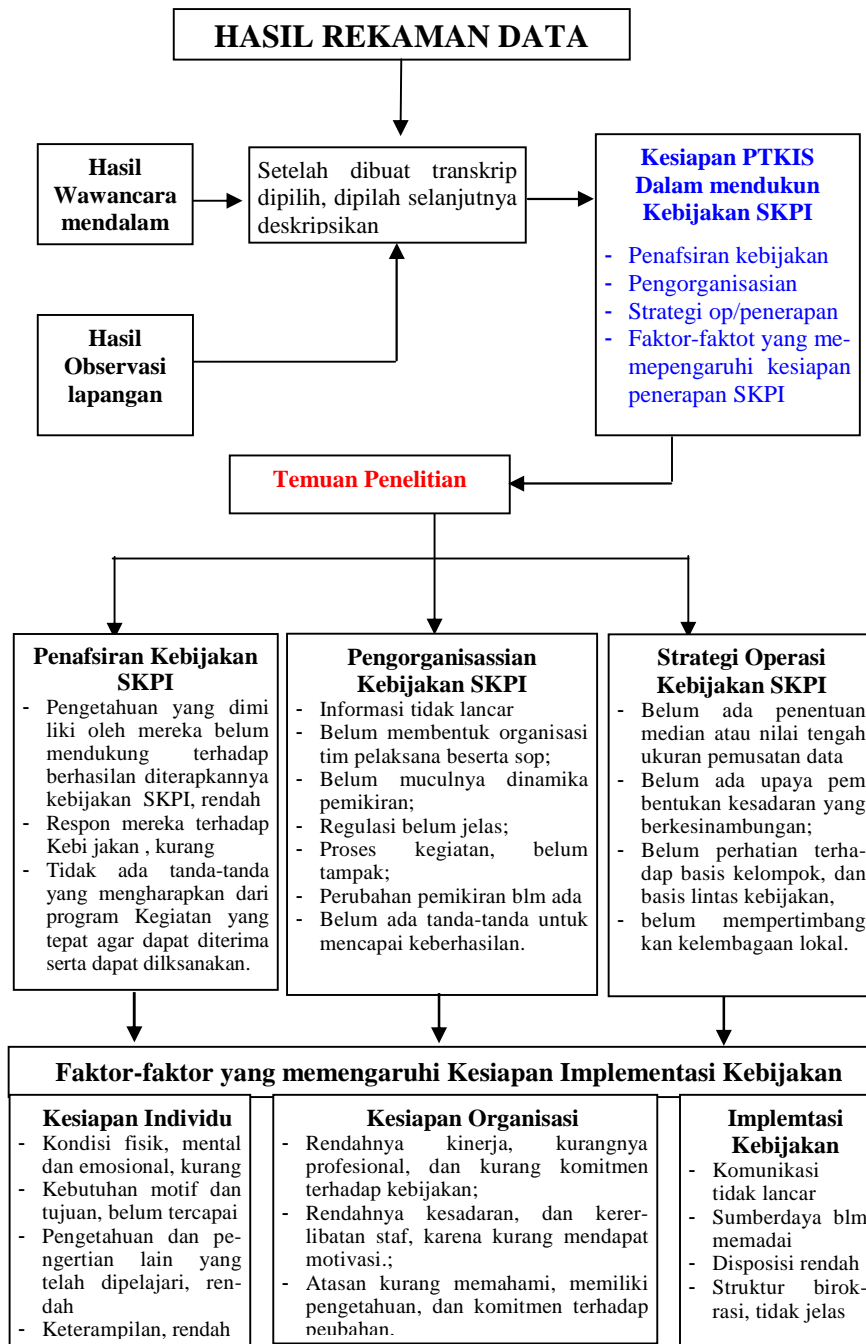
11) STAI KH. Agus Salim Bekasi (LP-11)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 26 April 2018; wawancara dengan (IF.11:1,2,3,4), tanggal 2 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI KH. Agus Salim Bekasi ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di KH. Agus Salim Bekasi, dideskripsikan pada gambar 4.2..11, berikut:



Gambar 4.2..11
Temuan data tunggal di STAI K. H. Agus Salim
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..11, menunjukkan bahwa STAI K. H. Agus Salim, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

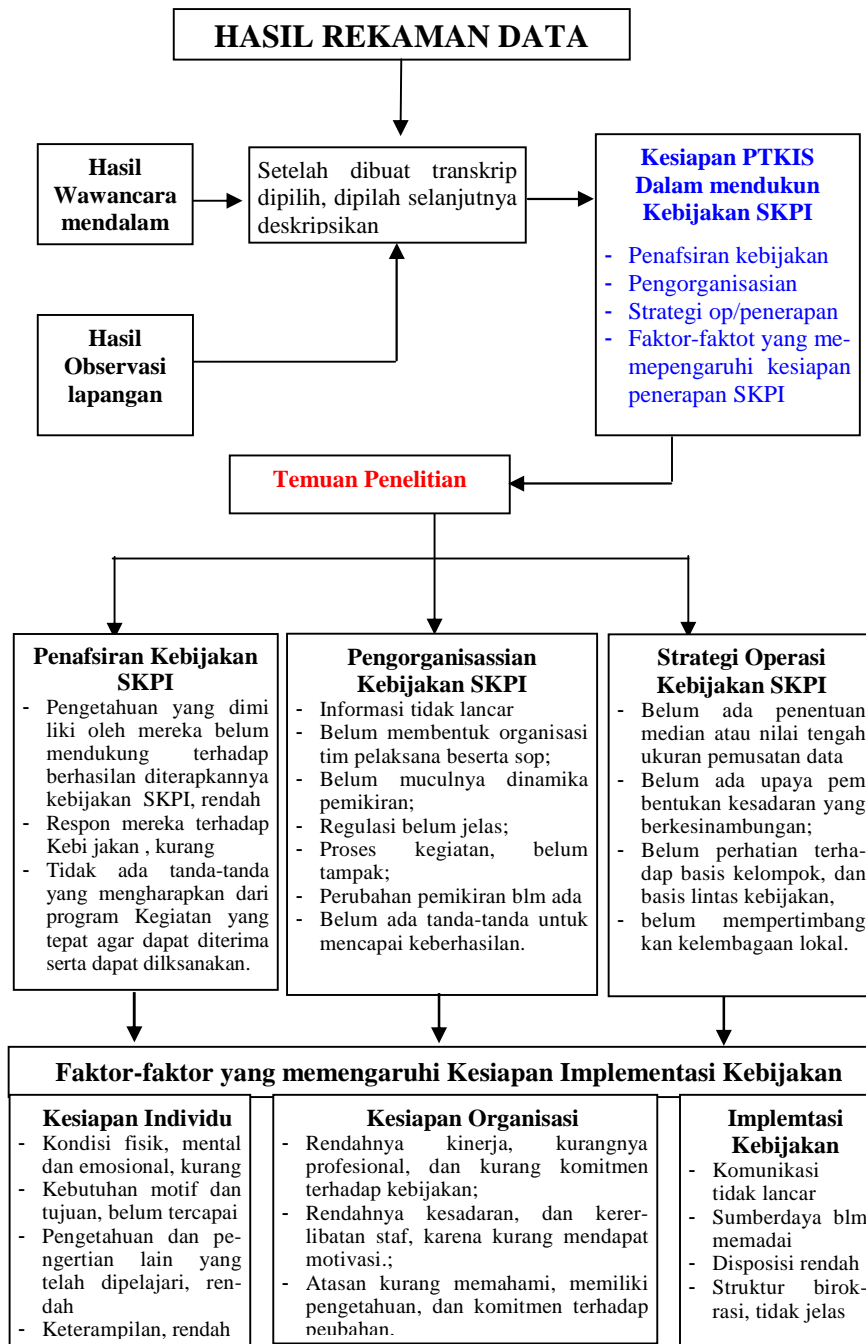
12) STAI As Sidiqiyah Karawang (LP-12)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 26 April 2018; wawancara dengan (IF. 12:1,2,3,4), tanggal 3 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI As Sidiqiyah Karawang ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;

- (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di As Sidiqiyah Karawang, dideskripsikan pada gambar 4.2..12, berikut:



Gambar 4.2..12
Temuan data tunggal di As Sidiqiyah Karawang
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..12, menunjukkan bahwa STAI As Sidiqiyah Karawang, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

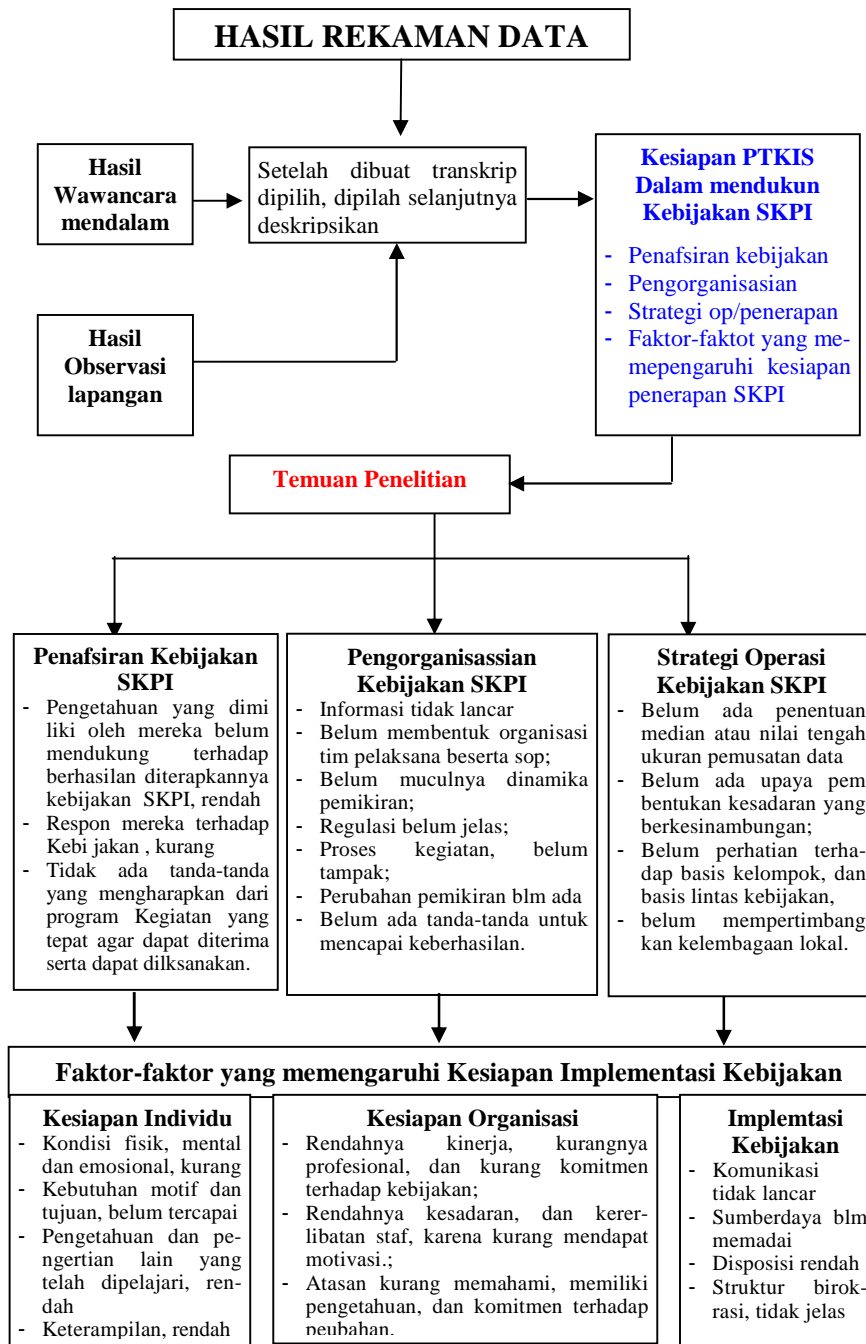
13) STAI DR. KH. E.Z. Muttaqin Purwakarta (LP-13)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 28 April 2018; wawancara dengan (IF,13:1,2,3,4), tanggal 6 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI DR. KH. E.Z. Muttaqin ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;

- (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI DR. KH. E.Z. Muttaqin, dideskripsikan pada gambar 4.2..13, berikut:



Gambar 4.2..13
Temuan data tunggal di STAI DR. KH. E.Z. Muttaqin
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..13, menunjukkan bahwa STAI DR. KH. E.Z. Muttaqin,, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

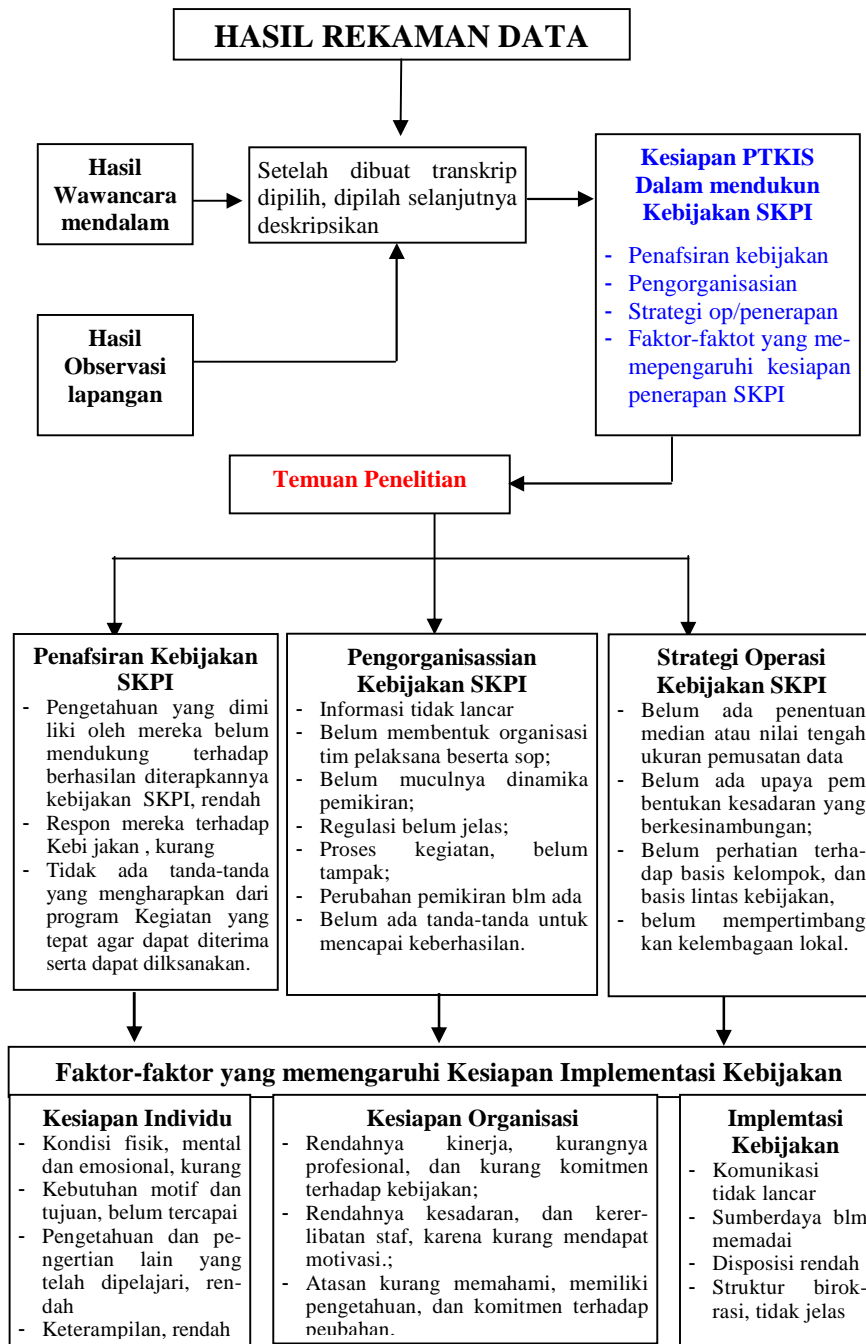
14) STAI Riyadul Jannah Subang (LP-14)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 28 April 2018; wawancara dengan (IF:14:1,2,3,4,5), tanggal 7 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakanjakan penerapan SKPI” di STAI Riyadul Jannah ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:

- (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Riyadul Jannah, dideskripsikan pada gambar 4.2..14, berikut:



Gambar 4.2..14
Temuan data tunggal di STAI Riyadul Jannah Subang
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..14, menunjukkan bahwa STAI Riyadul Jannah, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

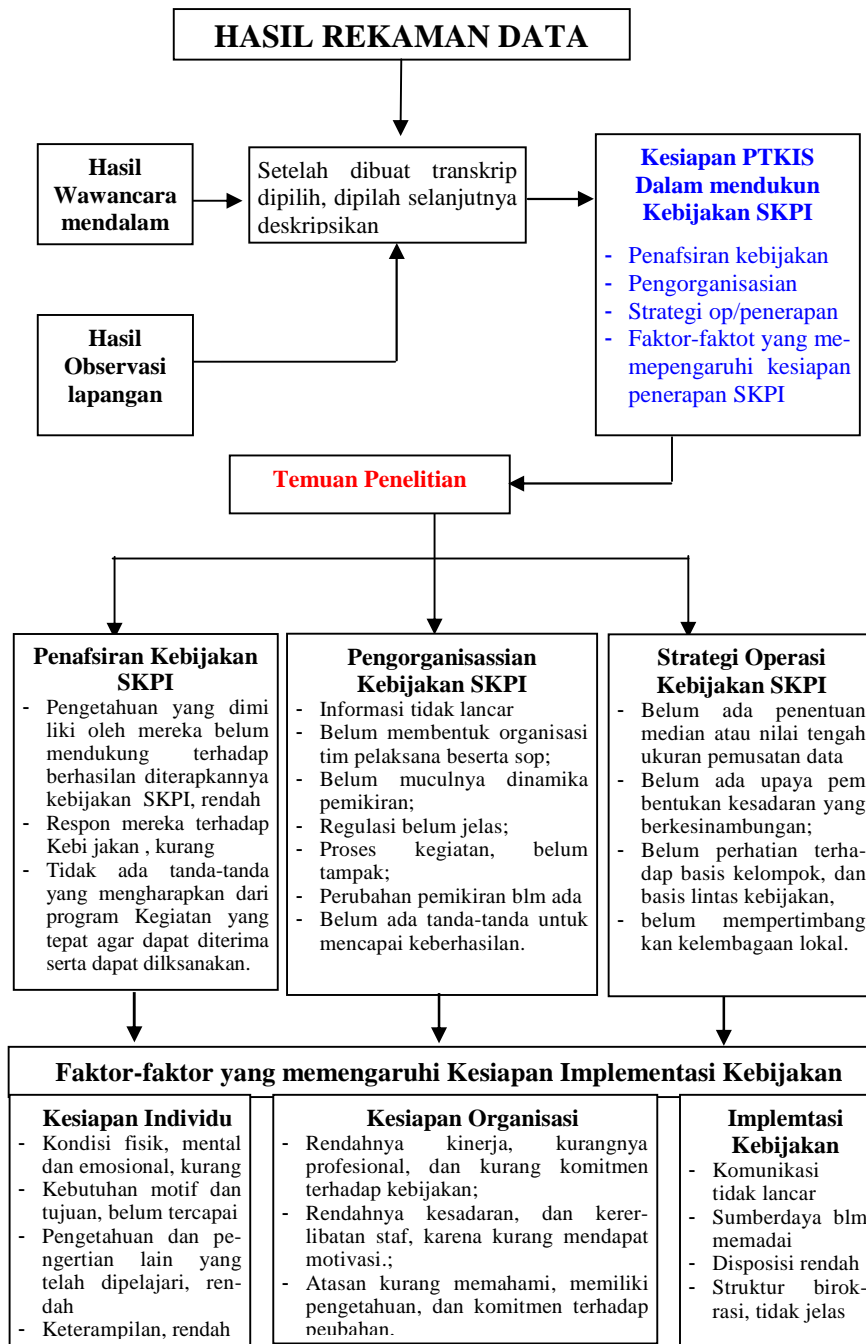
15) STAIS Dharma Indramayu (LP-15)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 28 April 2018; wawancara dengan (IF. 15:1,2,3,4), tanggal 6 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijaksanaan penerapan SKPI” di STAIS Dharma ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAIS Dharma, dideskripsikan pada gambar 4.2..15, berikut:



Gambar 4.2..15
Temuan data tunggal di STAIS Dharma Indramayu
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..15, menunjukkan bahwa STAIS Dharma, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

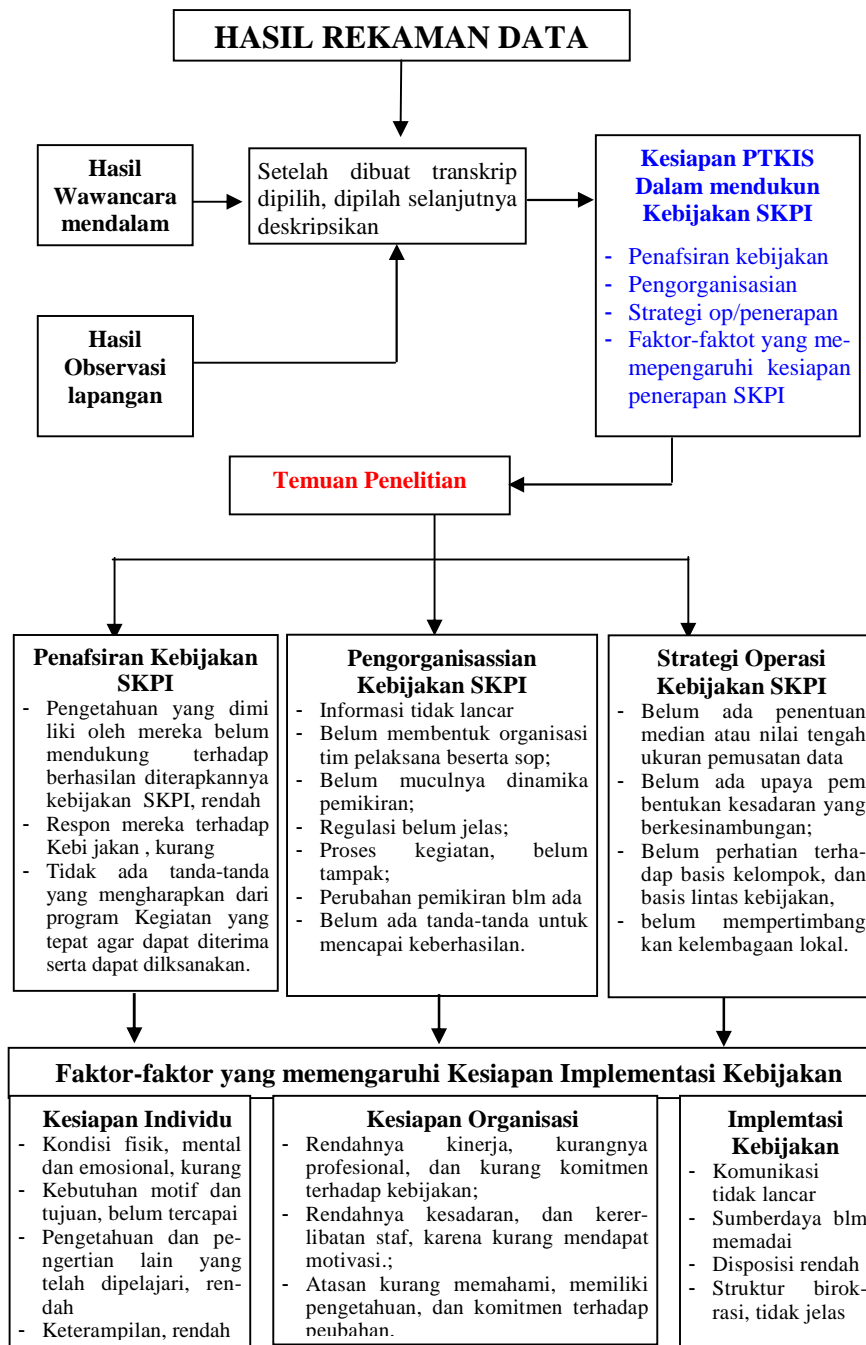
16) STAIC Cirebon (LP-16)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 28 April 2018; wawancara dengan (IF.16:1,2,3), tanggal 7 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Cirebon ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Cirebon, dideskripsikan pada gambar 4.2..16, berikut:



Gambar 4.2..16
Temuan data tunggal di STAIC Cirebon
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..16, menunjukkan bahwa STAI Cirebon,, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

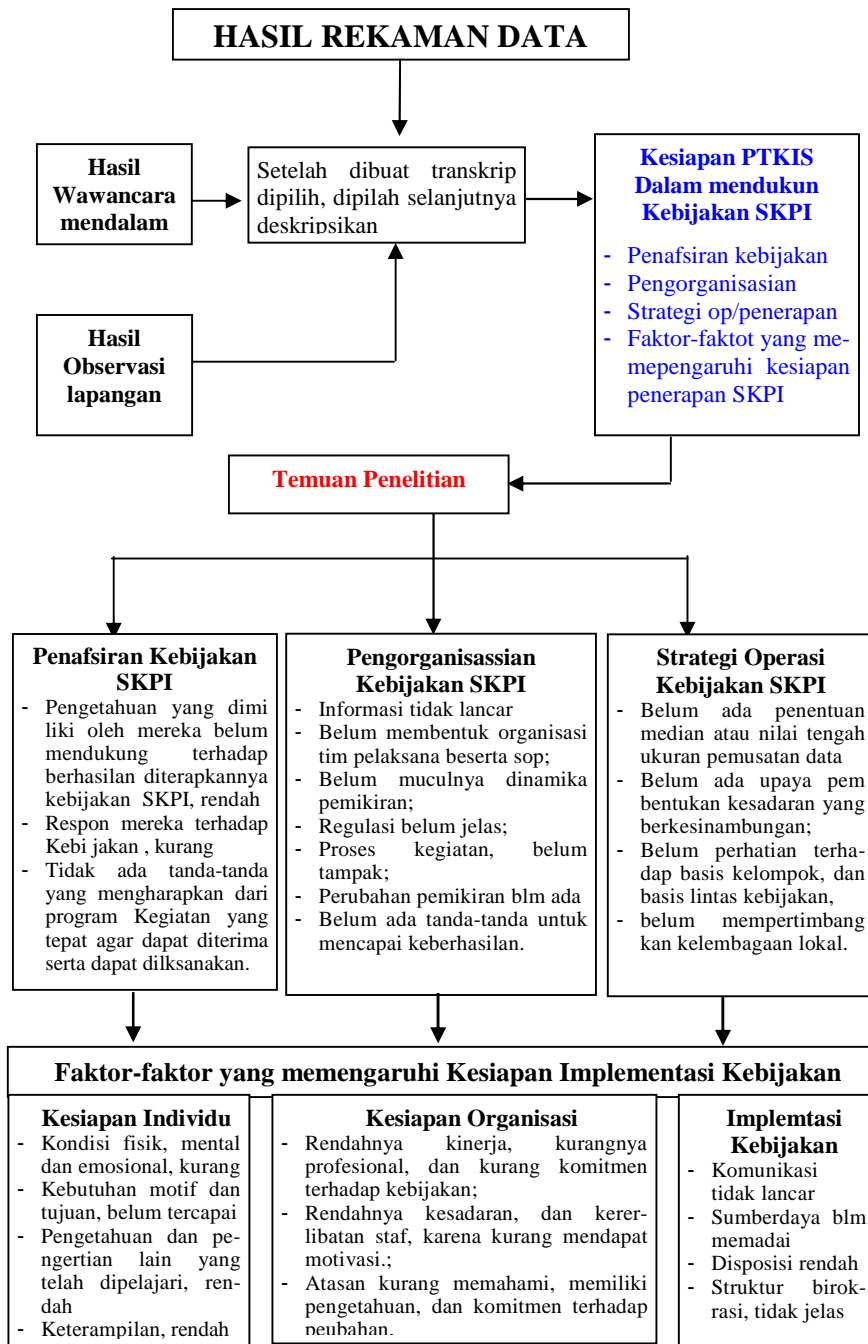
17) FKIS UNSIA Kuningan(LP-17)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 2 Mei 2018; wawancara dengan (IF. 17:1,2,3,4), tanggal 9 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di FKIS UNSIA Kuningan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di FKIS UNSIA Kuningan, dideskripsikan pada gambar 4.2..17, berikut:



Gambar 4.2..17
Temuan data tunggal di FKIS UNSIA Kuningan
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..17, menunjukkan bahwa FKIS UNSIA Kuningan, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

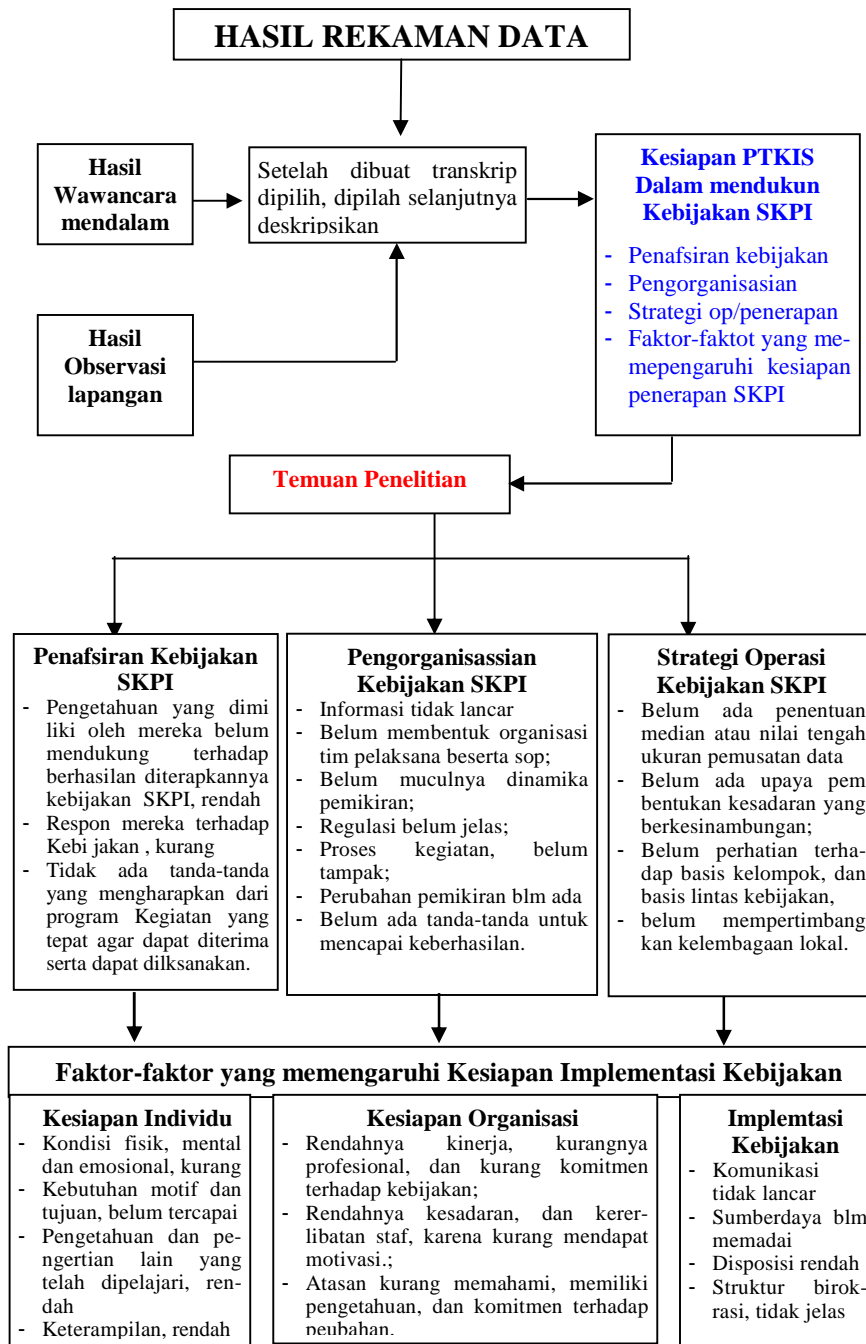
18) STAI Putra Galuh Ciamis (LP-18)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 2 Mei 2018; wawancara dengan (IF,18:1,2,3,4,5), tanggal 10 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Putra Galuh Ciamis ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Putra Galuh Ciamis, dideskripsikan pada gambar 4.2..18, berikut:



Gambar 4.2..18
Temuan data tunggal di STAI Putra Galuh Ciamis
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..18, menunjukkan bahwa STAI Putra Galuh Ciamis, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

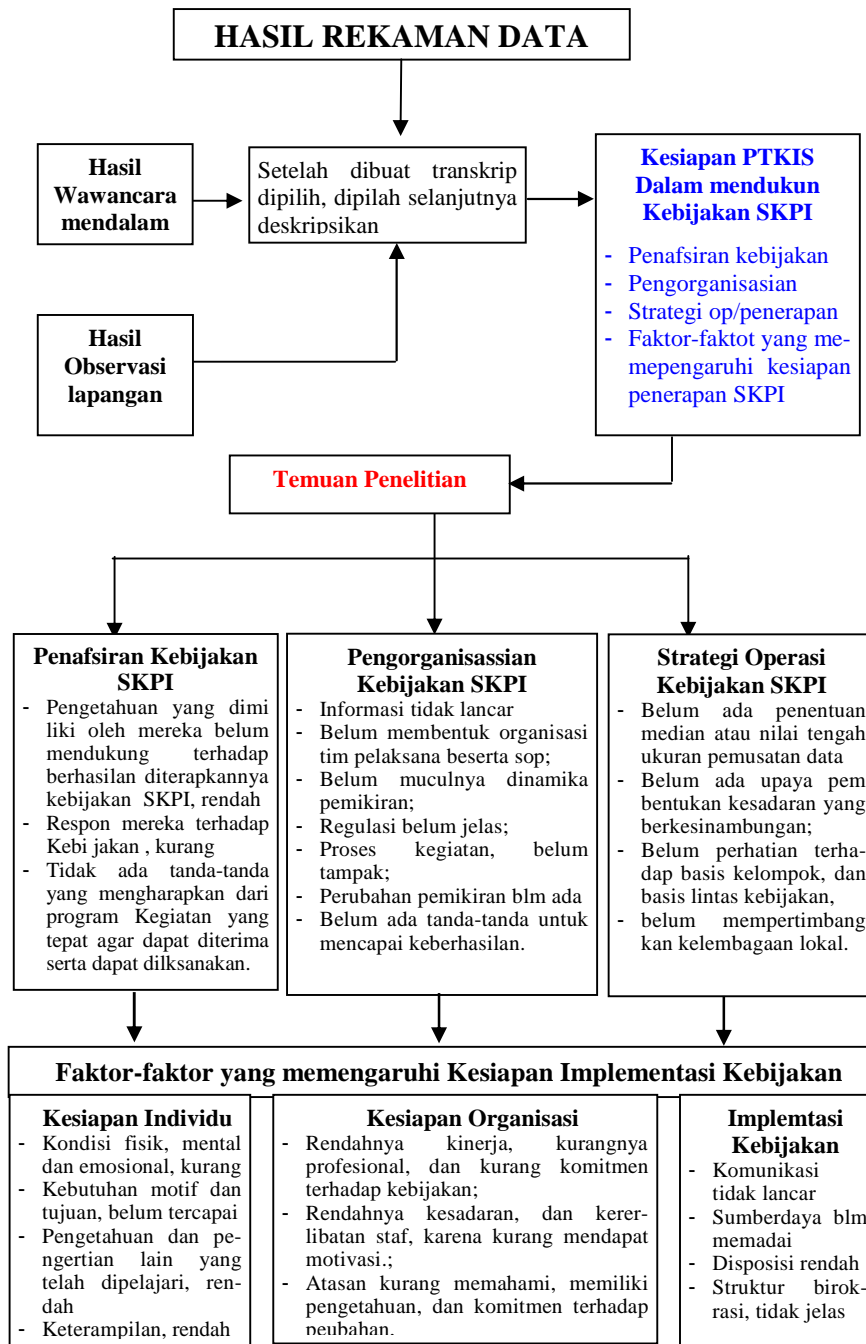
19) STAIMA Banjar (LP-19)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 2 Mei 2018; wawancara dengan (IF.19:1,2,3), tanggal 9 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAIMA Banjar ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
 - **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
 - (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAIMA Banjar, dideskripsikan pada gambar 4.2..19, berikut:



Gambar 4.2..19
Temuan data tunggal di STAIMA Banjar
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..19, menunjukkan bahwa STAIMA Banjar, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

20) STAINU Tasikmaya (LP-20)

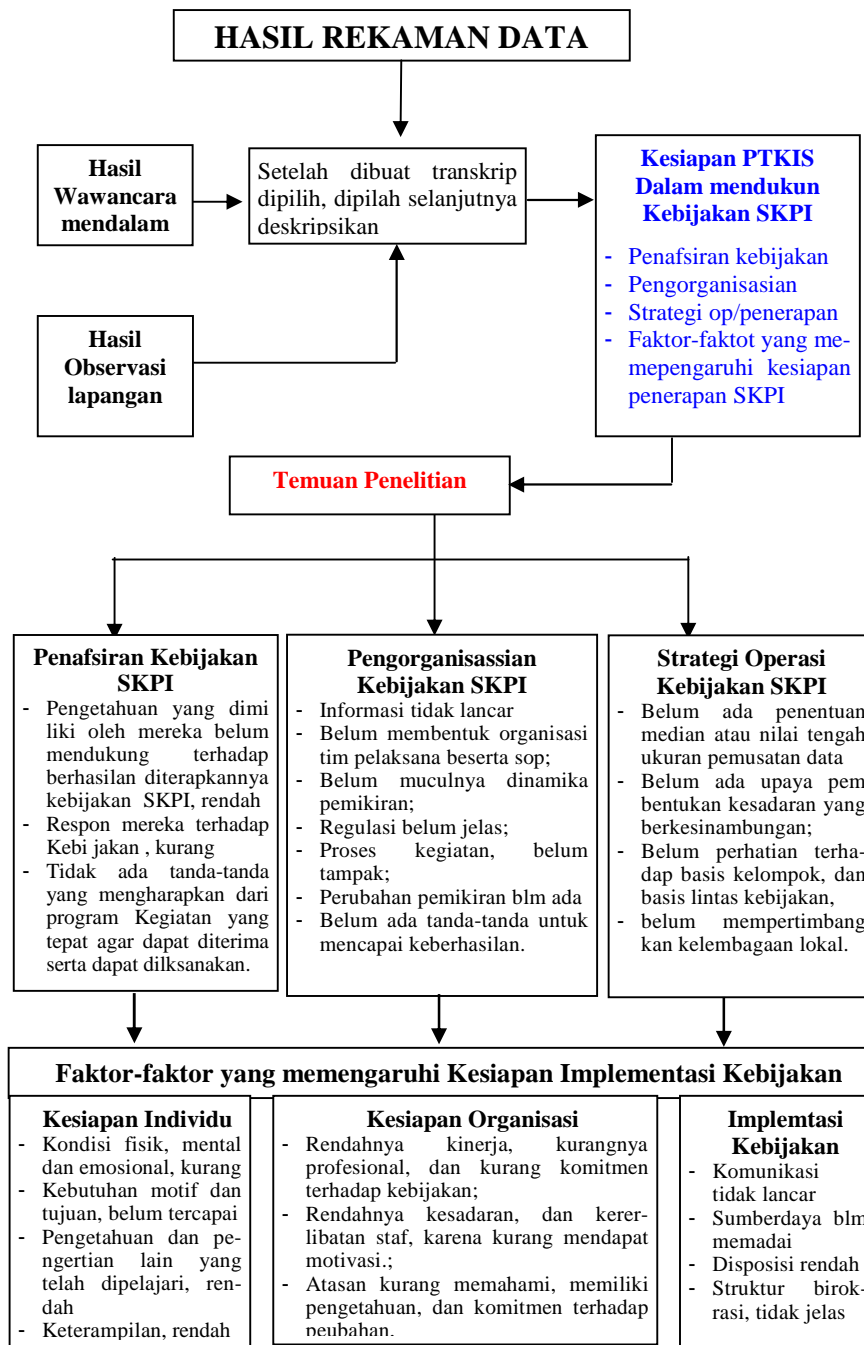
Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 2 Mei 2018; wawancara dengan (IF. 20: 1,2,3), tanggal 9 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijaksanaan penerapan SKPI” di STAINU Tasikmaya ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian

SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:

- (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-fator:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAINU Tasikmaya, dideskripsikan pada gambar 4.2..20, berikut:



Gambar 4.2..20
Temuan data tunggal di STANU Tasikmalaya
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..20, menunjukkan bahwa STAINU Tasikmaya, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

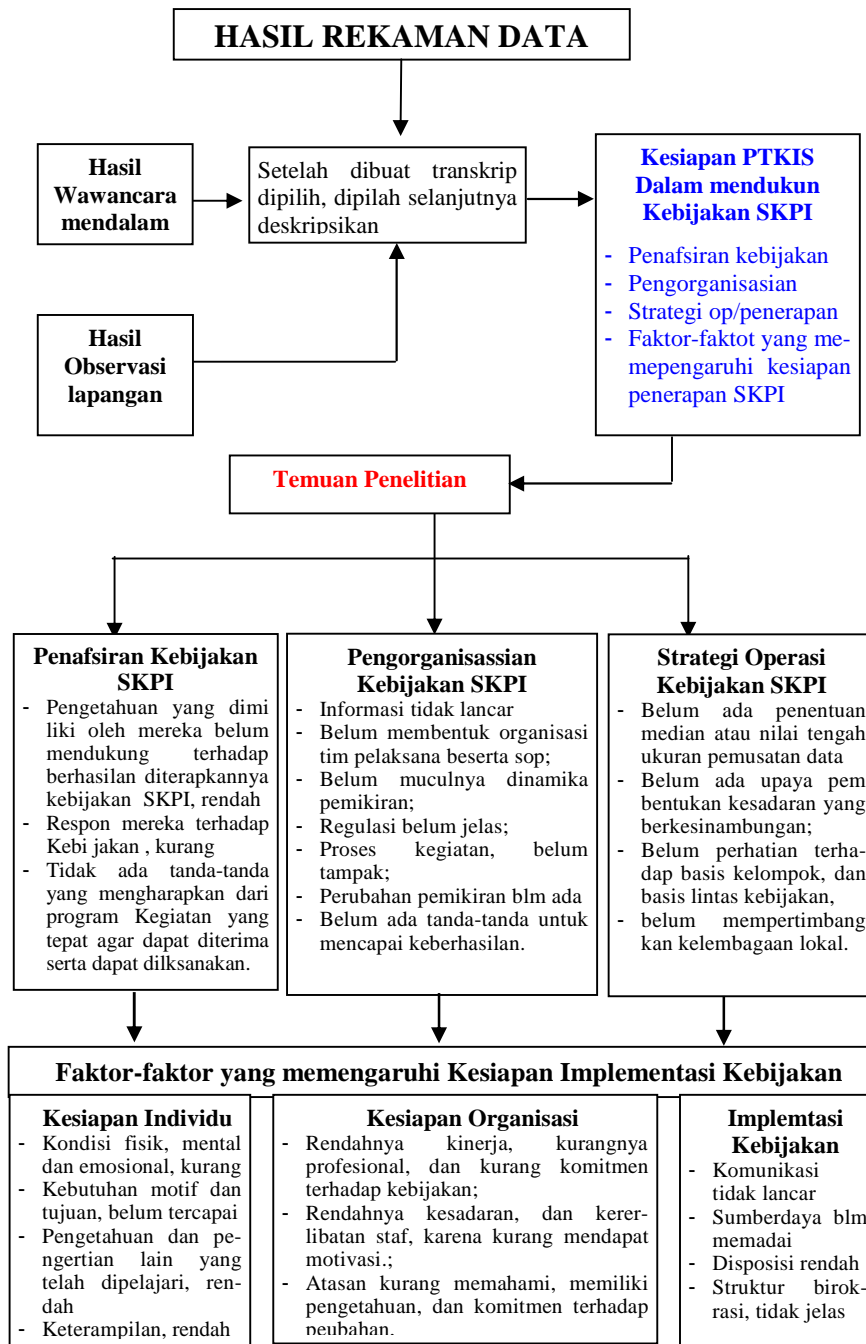
21) IAIC Tasikmaya (LP-21)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 5 Mei 2018; wawancara dengan (IF. 21:1,2,3,4), tanggal 11 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakanjakan penerapan SKPI” di IAIC Tasikmaya ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:

- (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di IAIC Tasikmaya, dideskripsikan pada gambar 4.2..21, berikut:



Gambar 4.2..21
Temuan data tunggal di IAIC Tasikmalaya
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..21, menunjukkan bahwa IAIC Tasikmaya, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

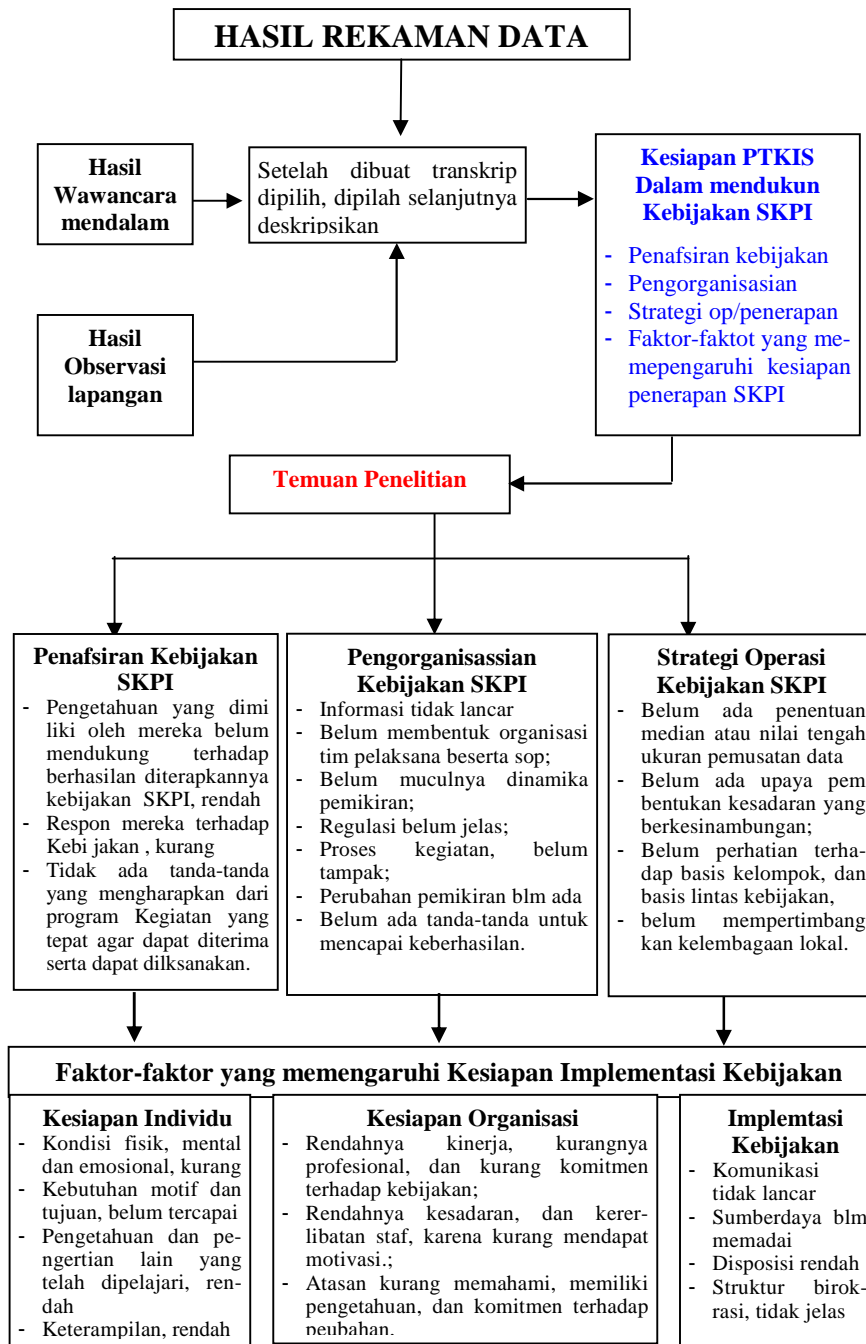
22) STAI Siliwangi Garut (LP-22)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 5 Mei 2018; wawancara dengan (IF.22:1,2,3), tanggal 12 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakanjangan penerapan SKPI” di STAI Siliwangi Garut ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:

- (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Siliwangi Garut, dideskripsikan pada gambar 4.2..22, berikut:



Gambar 4.2..22
Temuan data tunggal di STAI Siliwangi Garut
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..22, menunjukkan bahwa STAI Siliwangi Garut, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

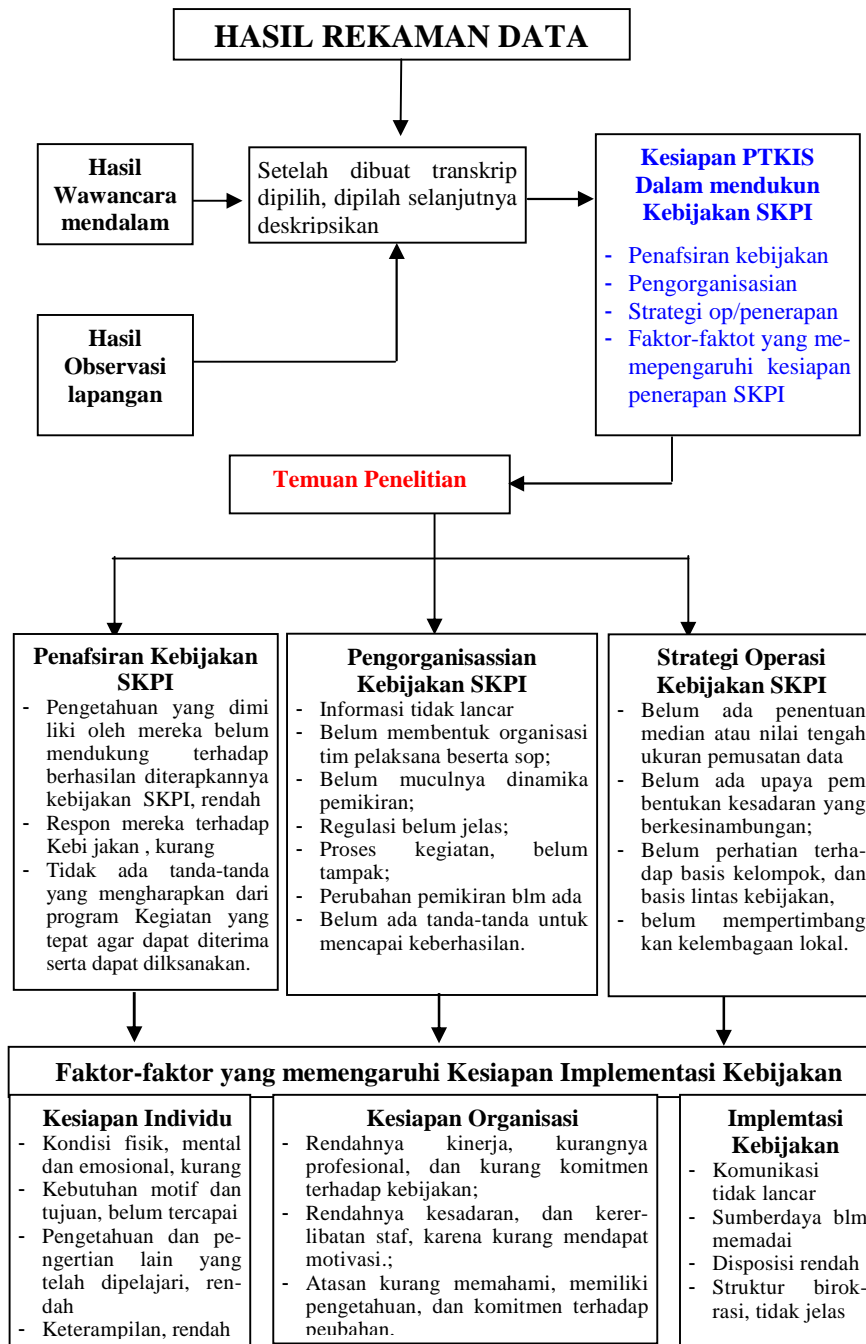
23) STAI Al-Falah Cicalengka (LP-23)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 8 Mei 2018; wawancara dengan (IF.23:1,2,3), tanggal 11 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Al-Falah Cicalengka ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:

- (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;
 - (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
 - **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
 - (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Al-Falah Cicalengka, dideskripsikan pada gambar 4.2..23, berikut:



Gambar 4.2..23
Temuan data tunggal di STAI Al-Falah Cicalengka Bndung
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2..23, menunjukkan bahwa STAI Al-Falah Cicalengka, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

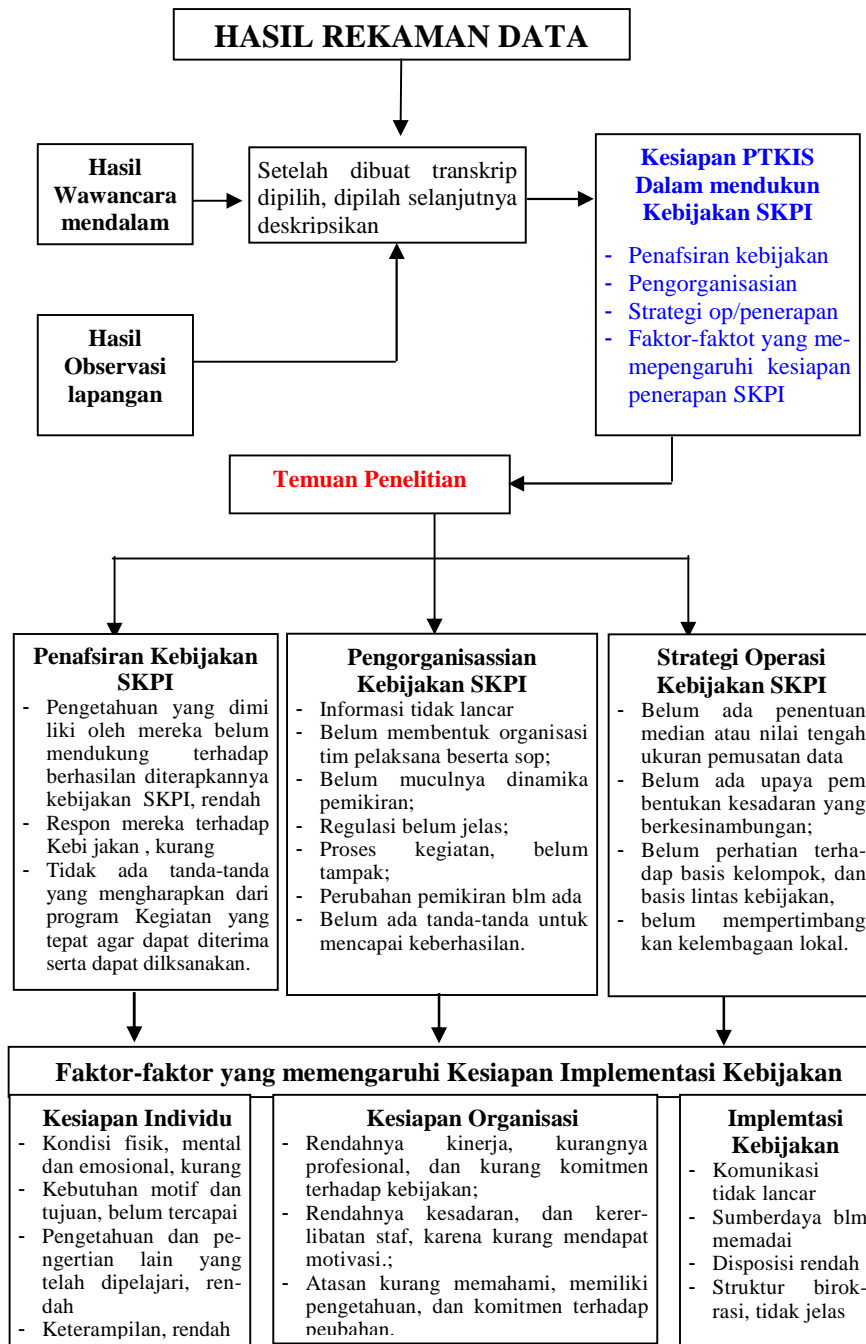
24) STAI Siliwangi Cimahi (LP-24)

Berdasarkan pada hasil observasi, tanggal 9 Mei 2018; wawancara dengan (IF.23:1,2,3,4), tanggal 12 Juli 2018 dan penelusuran dokumen, dalam penelitian “Kesiapan PTKIS, dalam mendukung Implementasi kebijakan penerapan SKPI” di STAI Siliwangi Cimahi ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Aspek penafsiran;** merupakan kegiatan untuk menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan, namun kenyataannya ditemukan:
 - (a) pengetahuan yang dimiliki oleh mereka belum mendukung terhadap berhasil diterapkannya Kebijakan SKPI,
 - (b) Respon terhadap Kebijakan, SKPI kurang dan
 - (c) tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan program Kegiatan yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan.
- **Aspek pengorganisasian;** merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Proses pengorganisasian tidak terlepas pada pengoperasian SKPI, bisa dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diharuskan. namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
 - (a) informasi tidak lancar dan tidak stabil;

- (b) belum adanya pembentukan organisasi beserta SOP;
 - (c) belum adanya dinamika pemikiran;
 - (d) pengorganisasian harus terdapat regulasi belum jelas;
 - (e) proses belangsungnya kegiatan, belum tampak;
 - (f) tidak ditemukan adanya suatu perubahan pemikiran,
 - (g) belum menunjukkan adanya tanda-tanda kegiatan untuk mencapai keberhasilan.
- **Aspek strategi Operasi Penerapan;** berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; namun kenyataannya ditemukan, bahwa:
- (a) belum menentukan median dalam membentuk kesadaran yang berkesinambungan;
 - (b) belum memperhatikan basis kelompok, basis lintas Kebijakan,
 - (c) belum mempertimbangkan kelembagaan lokal.
- **Aspek Kendala/Permasalahan yang dihadapi;** bertumpu pada faktor-faktor:
- (a) individu pengetahuan, keterampilan; Organisasi; regulasi belum jelas;
 - (b) desain proses kegiatan, belum tampak; dan
 - (c) Kebijakan; Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi; Struktur Birokrasi; belum terkoordinasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai temuan penelitian yang dilaksanakan di STAI Siliwangi Cimahi, dideskripsikan pada gambar 4.2..24, berikut:



Gambar 4.2..24
Temuan data tunggal di STAI Siliwagi Cimahi
 Sumber: diolah oleh Peneliti

Gambar/bagan 4.2.24, menunjukkan bahwa STAI Siliwangi Cimahi, belum siap dalam mendukung implementasikan Kebijakan penerapan SKPI, dan perlu pembinaan lanjut.

b. Temuan Berdasarkan Multi Situs dan Multi Kasus

Setelah mendapat temuan penelitian berdasarkan pada situs tunggal di atas, pada bagian ini akan disajikan temuan penelitian berdasarkan temuan multi situs dan multi kasus mencakup: (1) Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI, (2) Pengorganisasian Kebijakan SKPI; (3) Rancangan Starategi Penerapan SKPI dan (4) Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI, pada 24 PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat, sebagai berikut:

1) Penafsiran/intrepretasi Kebijakan SKPI

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; maksunya. Adapun ragam penafsiran mereka, dihitung berdasarkan skala K (kurang) diberi nilai 1; C (cukup) diberi nilai 2; T (tinggi) diberi nilai 3; ST (tinggi) diberi nilai 4; tampak pada tabel 4.3.1. sebagai berikut:

Tabel 4.3.1
Temuan Berdasarkan Multi Situs
Pada Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI

No	Nama PTKIS dan Indikator Penafsiran	Kondisi			
		R	S	T	ST
1	2	3	4	5	6
1.	FAI UNMA Pandeglang				
	-Respon terhadap Kebijakan	1			
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	-Pengetahuan untuk menentukan keber-hasilan diterapkannya		2		
	-Mengarahkan program agar dapat diteri-ma dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			

1	2	3	4	5	6
2.	IAIB Serang				
	-Respon terhadap Kebijakan	1			
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	-Mengarahkan program agar dapat diteri ma dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	9/4=2,25			
3.	STAI Latansa Mashiro				
	-Respon terhadap Kebijakan		2		
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	-Mengarahkan program agar dapat diteri-ma dan dijalankan				4
	Jumlah dan NT	10/4=2,50			
4.	STAI Fatahilah				
	-Respon terhadap Kebijakan	1			
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya	1			
	-Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	6/4=1,50			
5.	STAI Karimiyah				
	-Respon terhadap Kebijakan	1			
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	-Mengarahkan program agar dapat diteri ma dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			

1	2	3	4	5	6
6.	FIS UNIDA				
	-Respon terhadap Kebijakan				4
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya			3	
	-Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan				4
	Jumlah dan NT	14/4=3,75			
7.	IAIN Laroiba				
	-Respon terhadap Kebijakan	1			
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	-Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			
8.	STAI Kharisma				
	-Respon terhadap Kebijakan		2		
	-Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	-Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	-Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan				4
	Jumlah dan NT	11/4=2,75			
9.	STAI Sukabumi				
	- Respon terhadap Kebijakan		2		
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	10/4=2,50			

1	2	3	4	5	6
10.	STAI Nurul Hikmah				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			
11.	STAI KH Agus Salim				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			
12.	STAI Ass-Siddiqiyah				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			
13.	STAI KHEZ Mutaqin				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			

1	2	3	4	5	6
14.	STAI Riadul Jannah				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			
15.	STAIS Dharma				
	- Respon terhadap Kebijakan		2		
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	10/4=2,50			
16.	STAI Cirebon				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			
17.	FKI UNSIA Kuiningan				
	- Respon terhadap Kebijakan		2		
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya			3	
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan				4
	Jumlah dan NT	11/4=2,75			

1	2	3	4	5	6
18.	STAI Putra Galuh				
	- Respon terhadap Kebijakan		2		
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya			3	
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan				4
	Jumlah dan NT	12/4=3,00			
19.	STAIMA Banjar				
	- Respon terhadap Kebijakan		2		
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	10/4=2,50			
20.	STAINU Tasikmalaya				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			
21.	IAIC Tasikmalaya				
	- Respon terhadap Kebijakan		2		
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan			3	
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya			3	
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan				4
	Jumlah dan NT	12/4=3,00			

1	2	3	4	5	6
22.	STAI Al-Falah Cicalengka				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			
23.	STAI Siliwagi Garut				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan		2		
	Jumlah dan NT	7/4=1,75			
24.	STAI Siliwagi Cimahi				
	- Respon terhadap Kebijakan	1			
	- Meterjemahkan makna program kedalam pengaturan		2		
	- Pengetahuan untuk menentukan keberhasilan diterapkannya		2		
	- Mengarahkan program agar dapat diterima dan dijalankan			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			

Sumber: (diolah oleh peneliti)

Tabel 4.3.01, menunjukkan bahwa nilai kinerja kesiapan dalam “Aspek Penafsirani Kebijakan SKPI” Rekapitulasi di 24 PTKIS, tampak pada berikut:

Tabel 4.3.2

**Rekapitulasi Temuan Aspek: Penafsiran Kebijakan SKPI”
Berdasarkan Multi Situs**

LP.1 : 1.75	LP.2 : 2.25	LP. 3: 2.50	LP. 4: 1.50	LP.5 : 1.75	LP. 6: 3.75
LP.7 : 2.00	LP.8 : 2.75	LP. 9: 2.50	LP.10: 1.75	LP.11: 2.00	LP.12: 1.75
LP.13: 2.00	LP.14: 1.75	LP.15: 2.50	LP.16: 2.00	LP.17: 2.75	LP.18: 3.00
LP.19: 2.50	LP.20: 1.75	LP.21: 3.00	LP.22: 2.00	LP.23: 1.75	LP.24: 2.00

Sumber: (diolah oleh peneliti)

2) Pengorganisasian Kebijakan SKPI

Pengorganisasian Kebijakan, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; Adapun ragam pada aspek Pengorganisasian Kebijakan, dihitung berdasarkan skala K (kurang) diberi nilai 1; C (cukup) diberi nilai 2; T (tinggi) diberi nilai 3; ST (tinggi) diberi nilai 4; tampak pada tabel 4.3.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3.3
Temuan Berdasarkan Multi Situs
Pada Aspek Pengorganisasian Kebijakan SKPI

No	Nama PTKIS dan Indikator Penafsiran	Kondisi			
		R	S	T	ST
1	2	3	4	5	6
1.	FAI UNMA Pandeglang				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkronisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (Sentralisasi/Desentralisasi)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			
2.	IAIB Serang				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkronisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)			3	
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi			3	
	Jumlah dan NT	12/6=2.00			

1	2	3	4	5	6
3.	STAI Latansa Mashiro				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi			3	
	Jumlah dan NT	11/6=1.83			
4.	STAI Fatahilah				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/5=1.50			
5.	STAI Karimiyah				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			

1	2	3	4	5	6
6.	FIS UNIDA				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;			3	
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi				4
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;			3	
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)				4
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM				4
	- Budaya organisasi				4
	- Jumlah dan NT	22/6=3.66			
7.	IAIN Laroiba				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			
8.	STAI Kharisma				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi			3	
	- Jumlah dan NT	12/6=2.00			

1	2	3	4	5	6
9.	STAI Sukabumi				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi	1			
	- Jumlah dan NT	9/6=1.50			
10.	STAI Nurul Hikmah				
	- Desain organisasi, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi	1			
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi	1			
	- Jumlah dan NT	8/6=1.33			
11.	STAI KH Agus Salim				
-	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
-	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
-	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
-	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)			3	
-	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
-	- Budaya organisasi	1			
	- Jumlah dan NT	12/6=2.00			

1	2	3	4	5	6
12.	STAI Ass-Siddiqiyah				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			
13.	STAI KH EZ Mutaqin				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)			3	
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	12/6=2.00			
14.	STAI Riadul Jannah				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi	1			
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	8/6=1.33			

1	2	3	4	5	6
15.	STAIS Dharma				
	- Desain struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			
16.	STAI Cirebon				
	- Desain struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;		2		
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi			3	
	Jumlah dan NT	12/6=2.00			
17.	FKI UNSIA Kuiningan				
	- Desain struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			

1	2	3	4	5	6
18.	STAI Putra Galuh				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi			3	
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)			3	
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM			3	
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	14/6=2.33			
19.	STAIMA Banjar				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM		2		
	- Budaya organisasi			3	
	Jumlah dan NT	12/6=2.00			
20.	STAINU Tasikmalaya				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			

1	2	3	4	5	6
21.	IAIC Tasikmalaya				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi			3	
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;			3	
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM			3	
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	13/6=2.16			
22.	STAI Siliwagi Garut				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)		2		
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	Jumlah dan NT	9/6=1.50			
23.	STAI Al-Falah Cicalengka				
	- Desain, organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;	1			
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	- Jumlah dan NT	8/6=1.33			

1	2	3	4	5	6
24.	STAI Siliwagi Cimahi				
	- Desain, struktur organisasi; dan pembagian pekerjaan;	1			
	- Koordinasi; Integrasi dan Singkonisasi		2		
	- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;		2		
	- Hak, wewenang, kewajiban, dan Pendelegasian (SD)	1			
	- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM	1			
	- Budaya organisasi		2		
	- Jumlah dan NT	9/6=1.50			

Sumber: (diolah oleh peneliti)

Tabel 4.3.3 menunjukkan nilai kinerja dari Aspek Pengorganisasian Kebijakan SKPI di 24 PTKIS. Rekapitulasi dari kinerja tersebut tampak pada tabul 4.3.4, sebagai berikut:

Tabel 4.3.4
Rekapitulasi Temuan Berdasarkan Multi Situs
Pada Aspek Pengorganisasian Kebijakan SKPI

LP.1 : 1.50	LP.2 : 2.00	LP. 3: 1.83	LP. 4: 1.50	LP.5 : 1.50	LP. 6: 3.66
LP.7 : 1.50	LP.8 : 2.00	LP. 9: 1.50	LP.10: 1.33	LP.11: 2.00	LP.12: 1.50
LP.13: 2.00	LP.14: 1.33	LP.15: 1.50	LP.16: 2.00	LP.17: 1.50	LP.18: 2.33
LP.19: 2.00	LP.20: 1.50	LP.21: 2.16	LP.22: 1.50	LP.23: 1.33	LP.24: 1.50

Sumber: (diolah oleh peneliti)

3) Strategi Penerapan Kebijakan SKPI

Starategi Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; Adapun ragam temuan pada aspek Starategi Penerapan Kebijakan, dihitung berdasarkan skala K (kurang) diberi nilai 1; C (cukup) diberi nilai 2; T (tinggi) diberi nilai 3; ST (sangat tinggi) diberi nilai 4; tampak pada tabel 4.3.5 sebagai berikut:

Tabel 4.3.5
Temuan Berdasarkan Multi Situs dari Aspek Strategi
Operasi Kebijakan SKPI

No	Nama PTKIS dan Indikator Penafsiran	Kondisi			
		K	C	T	ST
1	2	3	4	5	6
1.	FAI UNMA Pandeglang				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	6/3=2.00			
2.	IAIB Serang				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	5/3=1.66			
3.	STAI Latansa Mashiro				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		3		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		3		
	- Jumlah dan NT	7/3=2.33			

1	2	3	4	5	6
4.	STAI Fatahilih				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal	1			
	- Jumlah dan NT	5/3=1.66			
5.	STAI A;Karimiyah				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	7/3=2.33			
6.	FIS UNIDA				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;			3	
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal				4
	Jumlah dan NT	10/3=3.33			
7.	IAIN Laroiba				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	5/3=1.66			

1	2	3	4	5	6
8.	STAI Kharisma				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	7/3=2.33			
9.	STAI Sukabumi				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	6/3=2.00			
10.	STAI Nurul Hikmah				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	4/3=1.33			
11.	STAI KH Agus Salim				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	5/3=1.66			

1	2	3	4	5	6
12.	STAI Ass-Siddiqiyah				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	- Jumlah dan NT	4/3=1.33			
13.	STAI KH EZ Mutaqin				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;		2		
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	6/3=2.00			
14.	STAI Riadul Jannah				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal	1			
	Jumlah dan NT	3/3=1.00			
15.	STAIS Dharma				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	6/3=2.00			

1	2	3	4	5	6
16.	STAI Cirebon				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal	1			
	Jumlah dan NT	5/3=1.66			
17.	FKI UNSIA Kuiningan				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	6/3=2.00			
18.	STAI Putra Galuh				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	7/3=2.33			
19.	STAIMA Banjar				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	5/3=1.66			

1	2	3	4	5	6
20.	STAINU Tasikmalaya				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	- Jumlah dan NT	5/3=1.66			
21.	IAIC Tasikmalaya				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;			3	
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	7/3=2.33			
22.	STAI Siliwagi Garut				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;		2		
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,	1			
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal		2		
	Jumlah dan NT	5/3=1.66			
23.	STAI Al-Falah Cicalengka				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,		2		
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal	1			
	Jumlah dan NT	4/3=1.33			

1	2	3	4	5	6
24	STAI Siliwagi Cimahi				
	- Menentukan ukuran-ukuran untuk membentuk kesadaran yang berkesinambungan;	1			
	- Memperhatikan basis kelompok kebijakan, maupun basis lintas kebijakan,			3	
	- Mempertimbangkan kelembagaan lokal			3	
	Jumlah dan NT	7/3=2.33			

Sumber: diolah oleh peneliti

Tabel 4.3.5, menunjukkan temuan nilai kinerja 24 PTKIS, dalam Aspek Strategi operasi Kebijakan SKPI. Adapun rekapitulasinya divisualisasikan pada tabel 4.3.6, berikut:

Tabel 4.3.6

Rekapitulasi Nilai Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Strategi Operasi Kebijakan SKPI

LP.1 : 2.00	LP.2 : 1.66	LP. 3: 2.33	LP. 4: 1.66	LP.5 : 2.33	LP. 6: 3.33
LP.7 : 1.66	LP.8 : 2.33	LP. 9: 2.00	LP.10: 3.33	LP.11: 1.66	LP.12: 1.33
LP.13: 2.00	LP.14: 1.00	LP.15: 2.00	LP.16: 1.66	LP.17: 2.00	LP.18: 2.33
LP.19: 1.66	LP.20: 1.66	LP.21: 2.33	LP.22: 1.66	LP.23: 1.33	LP.24: 2.33

Sumber: diolah oleh peneliti

4) Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesiapan dalam Implementasi Kebijakan SKPI

Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI, pada 24 PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Adapun ragam temuan pada aspek Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesiapan Kebijakan, dihitung berdasarkan skala K (kurang) diberi nilai 1; C (cukup) diberi nilai 2; T (tinggi) diberi nilai 3; ST (tinggi) diberi nilai 4; tampak pada tabel 4.3.7 sebagai berikut:

Tabel 4.3.7

Temuan Berdasarkan Multi Situs. Pada Aspek Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan SKPI

No	Nama PTKIS dan Indikator Penafsiran	Kondisi			
		K	C	T	ST
1	2	3	4	5	6
1.	FAI UNMA Pandeglang				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	7/4=1,25			
2.	IAIB Serang				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			
3.	STAI Latansa Mashiro				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),			3	
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).		2		
	Jumlah dan NT	9/4=2,25			
4.	STAI Fatahilah				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	Jumlah dan NT	5/4=1,25			
5	STAI Karimiyah				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	5/4=1,00			

1	2	3	4	5	6
6.	FIS UNIDA				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)			3	
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),			3	
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).			3	
	- Jumlah dan NT	11/4=2,75			
7.	IAIN Laroiba				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),			3	
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	Jumlah dan NT	6/4=1,50			
8.	STAI Kharisma				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).			3	
	Jumlah dan NT	8/4=2,00			
9.	STAI Sukabumi				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),			3	
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	Jumlah dan NT	6/4=1,50			
10.	STAI Nurul Hikmah				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	5/4=1,25			
11.	STAI KH Agus Salim				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),			3	
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	6/4=1,50			

1	2	3	4	5	6
12.	STAI Ass-Siddiqiyah				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	6/4=1,25			
13.	STAI KH EZ Mutaqin				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),			3	
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	Jumlah dan NT	6/4=1,50			
14.	STAI Riadul Jannah				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),				
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	Jumlah dan NT	5/4=1,25			
15.	STAIS Dharma				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),			3	
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	6/4=1,50			
16.	STAI Cirebon				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),			3	
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	7/4=1,75			
17.	FKI UNSIA Kuiningan				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),			3	
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	8/4=2,00			

1	2	3	4	5	6
18.	STAI Putra Galuh				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)			3	
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),			3	
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	9/4=2,25			
19.	STAIMA Banjar				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),		2		
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	7/4=1,75			
20.	STAINU Tasikmalaya				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	6/4=1,50			
21.	IAIC Tasikmalaya				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),			3	
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).			3	
	- Jumlah dan NT	10/4=2,50			
22.	STAI Siliwagi Garut				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	5/4=1,25			
23.	STAI Al-Falah				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)		2		
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),	1			
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).	1			
	- Jumlah dan NT	6/4=1,25			

1	2	3	4	5	6
24.	STAI Siliwagi Cimahi				
	- Komunikasi (<i>communications</i>)	1			
	- Sumber daya (<i>resources</i>),	1			
	- Sikap (<i>dispositions</i> atau <i>attitudes</i>),		2		
	- Struktur birokrasi (<i>bureucratic structure</i>).			3	
	- Jumlah dan NT	7/4=1,75			

Sumber: diolah oleh peneliti

Tabel 4.3.7, menunjukkan nilai temuan kinerja 24 PTKIS, dalam Aspek Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan SKPI. Adapun rekapitulasinya divisualisasikan pada tabel 4.3.8, berikut:

Tabel 4.3.8

Rekapitulasi Nilai Temuan Berdasarkan Multi Situs Pada Aspek Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan penerapan Kebijakan SKPI

LP.1 : 1.75	LP.2 : 2.00	LP. 3: 2.25	LP. 4: 1.25	LP.5 : 1.00	LP. 6: 2.75
LP.7 : 1.50	LP.8 : 2.00	LP. 9: 1.50	LP.10: 1.25	LP.11: 1.50	LP.12: 1.25
LP.13: 1.50	LP.14: 1.75	LP.15: 1.50	LP.16: 1.75	LP.17: 2.00	LP.18: 1.50
LP.19: 1.71	LP.20: 1.50	LP.21: 2.50	LP.22: 1.25	LP.23: 1.25	LP.24: 1.75

Sumber: diolah oleh peneliti

Setelah mendapat temuan penelitian berdasarkan pada multi situs di atas, pada bagian ini akan disajikan Rekapitulasi temuan penelitian berdasarkan multi kasus mencakup: (a) Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI, (b) Pengorganisasian Kebijakan SKPI; (c) Rancangan Starategi Penerapan SKPI dan (d) Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI, pada 24 PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat.

Untuk mengetahui bobot kinerja Kesiapan PTKIS dalam mendukung Penerapan Kebijakan SKPI, dihitung berdasarkan rumus:

$$K = \frac{Asp-1+Asp-2+Asp-3+Asp-4}{4} = NRK$$

Ketengan:

K = Kesiapan

NRK = Nilai Rata-rata Kesipan

Asp-1 = Penafsiran/intrepetasi

Asp-2 = Penengorganisasian

Asp-3 = Rancangan Strtegi

Asp-4 = Faktor-faktor

Untuk mengetahui bobot kinerja Kesiapan PTKIS dalam mendukung Penerapan Kebijakan SKPI, disajikan pada tabel 4.3.9, berikut:

Tabel 4.3.9
Temuan Berdasarkan Multi Situs dan Multi Kasus

No.	Nama PTKIS	Nilai Temuan Multi situs/kasus				Nilai	
		Asp-1	Asp-2	Asp-3	Asp-4	Kom	Rta-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FAI UNMA	1.75	1.50	2.00	1.75	7.00	1.75
2.	IAIB Serang	2.25	2.00	1.66	2.00	7.91	1.98
3.	STAI Latansa Mashiro	2.50	1.83	2.33	2.25	8.91	2.23
4.	STAI Fatahilah	1.50	1.50	1.66	1.25	5.91	1.48
5.	STAI Karimiyah	1.75	1.50	2.33	1.00	6.58	1.65
6.	FIS UNIDA	3.75	3.66	3.33	2.75	13.49	3.37
7.	IAIN Laroiba	2.00	1.50	1.66	1.50	6.66	1.67
8.	STAI Kharisma	2.75	2.00	2.33	2.00	9.08	2.27
9.	STAI Sukabumi	2.50	1.50	2.00	1.50	7.50	1.88
10.	STAI Nurul Hikmah	1.75	1.33	3.33	1.25	7.66	1.92
11.	STAI KH Agus Salim	2.00	2.00	1.66	1.50	7.16	1.79
12.	STAI Siddiqiyah	1.75	1.50	1.33	1.25	5.83	1.46
13.	STAI KH EZ Mutaqin	2.00	2.00	2.00	1.50	7.50	1.88
14.	STAI Riadul Jannah	1.75	1.33	1.00	1.75	5.83	1.46
15.	STAIS Dharma	2.50	1.50	2.00	1.50	7.50	1.88
16.	STAI Cirebon	2.00	2.00	1.66	1.75	7.41	1.85
17.	FKI UNSIA	2.75	1.50	2.00	2.00	8.25	2.06
18.	STAI Putra Galuh	3.00	2.33	2.33	1.50	9.16	2.29
19.	STAIMA Banjar	2.50	2.00	1.66	1.71	7.87	1.97
20.	STAINU Tasikmalaya	1.75	1.50	1.66	1.50	6.41	1.60
21.	IAIC Tasikmalaya	3.00	2.16	2.33	2.50	9.99	2.50
22.	STAI Siliwagi Garut	2.00	1.50	1.66	1.25	6.41	1.60
23.	STAI Al Falah	1.75	1.33	1.33	1.25	5.66	1.42
24.	STAI Siliwagi Cimahi	2.00	1.50	2.33	1.75	7.58	1.90
	Nilai Total	53.25	42.47	47.58	39.96	183.26	45.815
	Nilai Rata-rata	2.13	1.70	1.90	1.60	7.33	1.83

Rentang Nilai R Kesiapan:

350	–	400	= Sangat Tinggi
280	–	349	= Tinggi
200	–	279	= Cukup
100	–	199	= Kurang

C. Pembahasan

Kesiapan untuk menerapkan Kebijakan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan Kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan 24 PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (Permenag RI no 1 Tahun 2016).

Mengacu pada Tangkilisan (2003: 17) ada tiga langkah kegiatan utama yang paling penting dalam mempersiapkan untuk implementasi keputusan/kebijakan yaitu: (1) penafsiran/intrepretasi kebijakan, (2) pengorganisasian kebijakan, dan (3) strategi penerapan Kebijakan. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan dalam implemtasi kebijakan menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) ada empat faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Sesuai dengan desaian penelitian, pada bagian ini akan disajikan (1) Analsia data temuan penelitian; (2) Intrepretasi data temuan penelilian, (3) Analisis dampak, dan (4) Langkah antisipatif untuk penyiapan Implentasi Kebijakan SKPI.

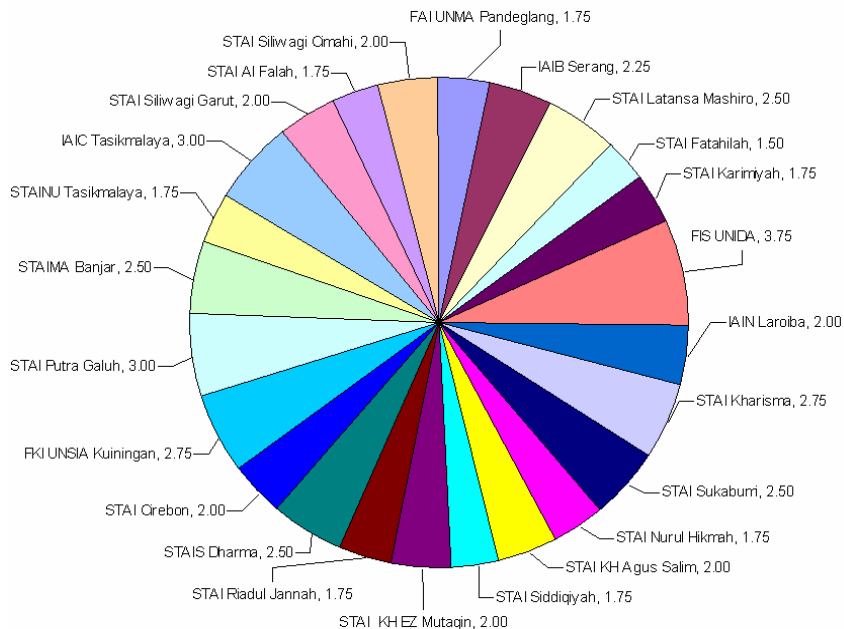
1. Analis Data Kesiapan 24 PTKIS dalam Mendukung Kebikan SKPI

a. Penafsiran/intrepretasi Kebijakan SKPI (Asp-1)

Menafsirkan/intrepretasi kebijakan menjadi program untuk mengetahui kesiapan PTKIS dalam mendukung kebijakan SKPI, Komponen penafsiran/kebijakan yaitu: (1) Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya Kebijakan ini, (2) Respon terhadap Kebijakan SKPI, (3), dan (4) Harapan dari program Kegiatan SKPI yang tepat agar dapat diterima serta dapat dilaksanakan (Tangkilisan (2003: 18).

Kedelapan komponen tersebut di atas, dihitung berdasarkan Rentang Nilai (RN), dan diberi nilai bobot Kesiapan: 350 - 400= Sangat Tinggi; 280 - 349 = Tinggi; 200 - 279 = Cukup; dan 100 -199= Kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan peneliti di 24 PTKIS, tanggal 25 Juni sampai 12 Juli 2018, ditemukan bahwa kinerja 24 PTKIS, dari aspek intrepetasi/penafsiran terhadap kebijakan SKPI (Asp-1), diperoleh angka bobot kinerja (abk): (1) FAI UNMA Pandeglang, dengan bobot kinerja atau (BK), (1.75), artinya kurang atau masih rendah; (2)IAIB Serang (2.25), cukup, (3) STAI Latansa Mashiro, (2.50) cukup; (4) STAI Fatahilah, dengan bobot kinerja (1.50) artinya kurang atau masih rendah; (5) STAI Karimiyah dengan bobot kinerja (1.75) artinya kurang atau masih rendah; (6)FIS UNIDA dengan bobot kinerja (3.75), artinya sangat tinggi; (7) IAIN Laroiba (2.00) artinya cukup; (8) STAI Kharisma dengan (2.75), artinya cukup; (9) STAI Sukabumi, (2.50) artinya cukup; (10) STAI Nurul Hikmah (1.75), tergolong masih rendah; (11) STAI KH Agus Salim, (2.00) artinya cukup; (12) STAI Siddiqiyah, (1.75) artinya masih rendah; (11) STAI KH EZ Mutaqin, dengan bobot kinerja (2.00) tergolong cukup; (14) STAI Riadul Jannah, dengan bobot kinerja (1.75), tergolong masih rendah; (15) STAIS Dharma, dengan bobot kinerja (2.50) tergolong cukup; (16) STAI Cirebon, dengan bobot kinerja (2.00), tergolong cukup; (17) FKI UNSIA Kuiningan, dengan bobot kinerja (2.75) tergolong cukup; (18) STAI Putra Galuh, dengan bobot kinerja (3.00) tergolong tinggi; (19) STAIMA Banjar dengan bobot kinerja (2.50), tergolong cukup; (20) STAINU Tasikmalaya dengan bobot kinerja (1.75), tergolong tinggi; (21) IAIC Tasikmalaya, dengan bobot kinerja (3.00) tergolong tinggi; (22) STAI Siliwagi Garut, dengan bobot kinerja (2.00) dianggap cukup; (23) STAI Al Falah, dengan bobot kinerja (1.75) tergolong masih rendah; (24) STAI Siliwagi Cimahi, dengan bobot kinerja (2.00), tergolong cukup. Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan gambar 4.4.1, berikut:



Gambar 4.4.1

Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI (Asp-1)

Sumber: diolah oleh Peneliti

Apabila diakumulasikan dengan bobot kinerja 24 PTKIS, dari aspek intepetasi/penafsiran terhadap kebijakan SKPI, diperoleh angka, sebesar (53.25), dengan perolehan angka rata-rata sebesar (2,13), maka kinerja 24 PTKIS, dari aspek intepetasi/penafsiran terhadap kebijakan SKPI, bisa dikatakan cukup, pada umumnya mereka mengharapkan diterapkannya kebijakan SKPI.

b. Pengorganisasian Kebijakan SKPI, di PTKIS (Asp-2);

Untuk merealisasikan Kebijakan dalam aspek (Asp-2), Pengorganisasian Kebijakan, diperlukan; (1) desain organisasi dan struktur organisasi; (2) pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; (3) integrasi dan koordinasi; (4) perekrutan dan penempatan sumber daya manusia, (5) hak, wewenang dan kewajiban, (6) pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi), (7) pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber

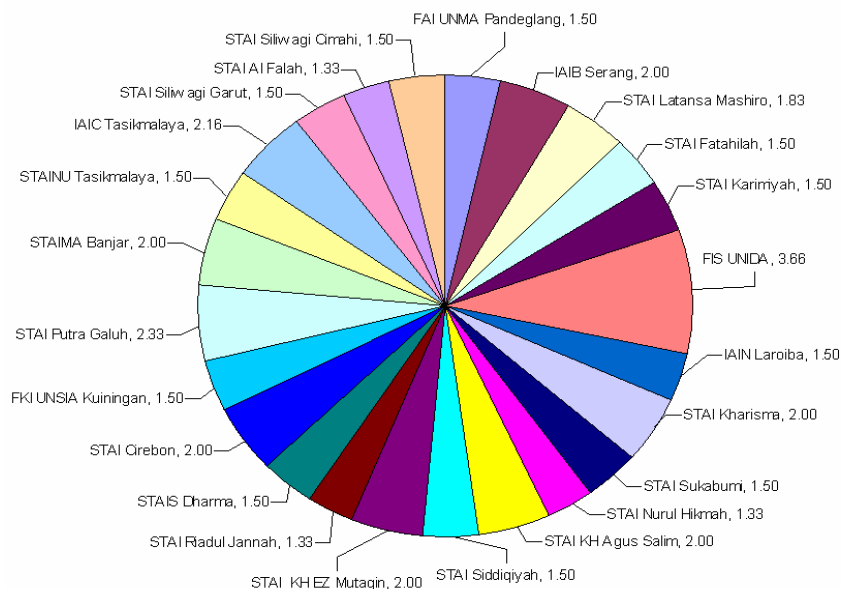
daya manusia, dan (8) Budaya organisasi (Tangkilisan, 2003: 18).

Kedelapan komponen tersebut di atas, dihitung berdasarkan Rentang Nilai (RN), dan diberi nilai bobot Kesiapan: 350 - 400= Sangat Tinggi; 280 - 349 = Tinggi; 200 - 279 = Cukup; dan 100 -199= Kurang

Berdasarkan hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara dilakukan peneliti di 24 PTKIS, tanggal 25 Juni sampai 12 Juli 2018, ditemukan bahwa kinerja 24 PTKIS, dari aspek pengorganisasian kebijakan SKPI (Asp-2), diperoleh angka: (1) FAI UNMA Pandeglang, dengan bobot kinerja (1.50), artinya kurang atau masih rendah; (2) IAIB Serang dengan (2.00), artinya cukup, (3) STAI Latansa Mashiro, dengan bobot kinerja (1.83) artinya masih rendah; (4) STAI Fatahilah, dengan bobot kinerja (1.50) artinya kurang atau masih rendah; (5) STAI Karimiyah dengan bobot kinerja (1.50) artinya kurang atau masih rendah; (6) FIS UNIDA dengan bobot kinerja (3.66), artinya sangat tinggi; (7) IAIN Laroiba (1.50) artinya masih rendah; (8) STAI Kharisma dengan bobot kinerja (2.00), artinya cukup; (9) STAI Sukabumi, dengan bobot kinerja (1.50) artinya masih rendah; (10) STAI Nurul Hikmah dengan bobot kinerja (1.33), tergolong masih rendah; (11) STAI KH Agus Salim, dengan bobot kinerja (2.00) artinya cukup; (12) STAI Siddiqiyah, dengan bobot kinerja (1.50) artinya masih rendah; (11) STAI KH EZ Mutaqin, dengan bobot kinerja (2.00) tergolong cukup; (14) STAI Riadul Jannah dengan bobot kinerja (1.33), tergolong masih rendah; (15) STAIS Dharma, dengan bobot kinerja (1.50) tergolong masih rendah; (16) STAI Cirebon, dengan bobot kinerja (2.00), tergolong cukup; (17) FKI UNSIA Kuiningan, dengan bobot kinerja (1.50) tergolong cukup; (18) STAI Putra Galuh, dengan bobot kinerja (2.33) tergolong tinggi; (19) STAIMA Banjar dengan bobot kinerja (2.00), tergolong cukup; (20) STAINU Tasikmalaya dengan bobot kinerja (1.50), tergolong masih rendah; (21) IAIC Tasikmalaya, dengan bobot kinerja (2.16) tergolong cukup; (22) STAI Siliwagi Garut, dengan bobot kinerja (1.50) dianggap masih rendah; (23) STAI

Al Falah dengan bobot kinerja (1.33) tergolong masih rendah; (24) STAI Siliwagi Cimahi, dengan bobot kinerja (1.50), tergolong cukup.

Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan gambar 4.4.2, berikut:



Gambar 4.4.2

Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Penafsiran Kebijakan SKPI (Asp-1)

Sumber: diolah oleh Peneliti

Apabila diakumulasikan dengan bobot kinerja 24 PTKIS, dari aspek pengorganisasian kebijakan SKPI (Asp-2), diperoleh angka, sebesar (42.47), dengan perolehan rata-rata sebesar (1,70), maka kinerja 24 PTKIS, dari aspek pengorganisasian kebijakan SKPI, (Asp-2) bisa dikatakan masih rendah.

c. Rencana Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS (Asp-3)

Dalam merealisasikan Kebijakan dalam hal ini penenerapkan SKPI, diperlukan strategi, yaitu: (1) menyusun struktur dengan strategi; (2) melembagakan strategi; (3) mengoperasikan strategi; (4) menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi (Tangkilisan (2003: 18). Menurut Taliziduhu Ndraha (1999: 1), "Kerja adalah proses penciptaan

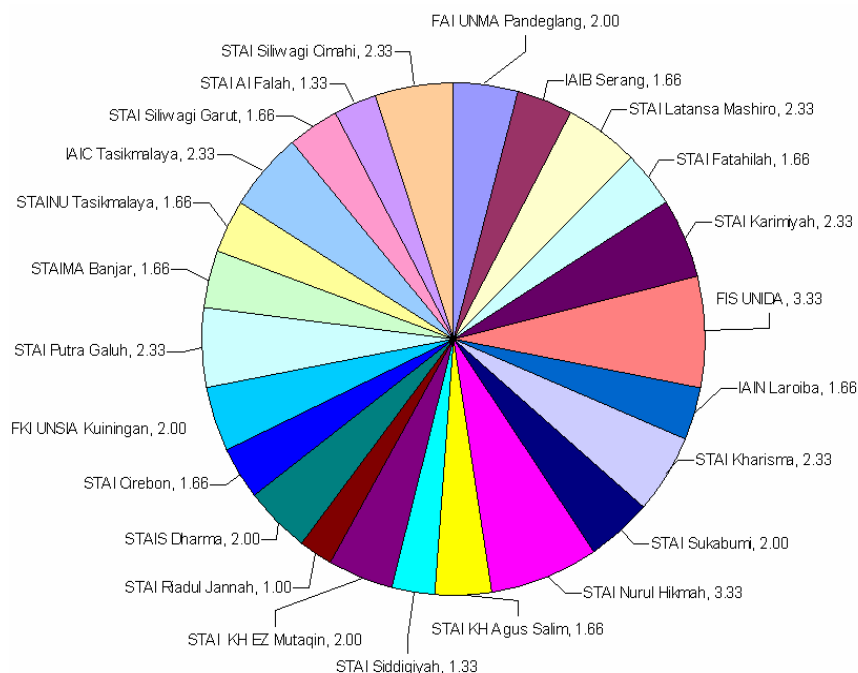
atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuh kebutuhan yang ada". Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa kesiapan kerja merupakan suatu kondisi awal yang harus dimiliki seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu pekerjaan dalam rangka penciptaan suatu produk atau penambahan nilai suatu unit sumber daya.

Kedelapan komponen tersebut di atas, dihitung berdasarkan Rentang Nilai (RN), dan diberi nilai bobot Kesiapan: 350 - 400= Sangat Tinggi; 280 - 349 = Tinggi; 200 - 279 = Cukup; dan 100 -199= Kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan peneliti di 24 PTKIS, tanggal 25 Juni sampai 12 Juli 2018, ditemukan bahwa kinerja 24 PTKIS, dari aspek strategi penerapan kebijakan SKPI (Asp-3), diperoleh angka: (1) FAI UNMA Pandeglang, dengan bobot kinerja (2.00), artinya cukup; (2) IAIB Serang dengan (1.66), artinya cukup, (3) STAI Latansa Mashiro, dengan bobot kinerja (2.33) artinya cukup; (4) STAI Fatahilah, dengan bobot kinerja (1.66) artinya kurang atau masih rendah; (5) STAI Karimiyah dengan bobot kinerja (2.33) artinya cukup; (6) FIS UNIDA dengan bobot kinerja (3.33), artinya sangat tinggi; (7) IAIN Laroiba (1.66) artinya masih rendah; (8) STAI Kharisma dengan bobot kinerja (2.33), artinya cukup; (9) STAI Sukabumi, dengan bobot kinerja (2.00) artinya cukup; (10) STAI Nurul Hikmah dengan bobot kinerja (3.33), tergolong tinggi; (11) STAI KH Agus Salim, dengan bobot kinerja (1.66) tergolong masih rendah; (12) STAI Siddiqiyah, dengan bobot kinerja (1.33) artinya masih rendah; (11) STAI KH EZ Mutaqin, dengan bobot kinerja (2.00) tergolong cukup; (14) STAI Riadul Jannah dengan bobot kinerja (1.00), tergolong masih rendah; (15) STAIS Dharma, dengan bobot kinerja (2.00) tergolong cukup; (16) STAI Cirebon, dengan bobot kinerja (1.66), tergolong masih rendah; (17) FKI UNSIA Kuiningan, dengan bobot kinerja (2.00) tergolong cukup; (18) STAI Putra Galuh, dengan bobot kinerja (2.33) tergolong cukup; (19) STAIMA Banjar dengan bobot kinerja (2.00), tergolong cukup; (20) STAINU Tasikmalaya dengan bobot kinerja (1.50), tergolong masih rendah; (21) IAIC Tasikmalaya, dengan bobot kinerja (2.33) tergolong cukup; (22)

STAI Siliwagi Garut, dengan bobot kinerja (1.66) dianggap masih rendah; (23) STAI Al Falah dengan bobot kinerja (1.33) tergolong masih rendah; (24) STAI Siliwagi Cimahi, dengan bobot kinerja (2.33), tergolong cukup.

Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan gambar 4.4.3, berikut:



Gambar 4.4.3

Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Strategi Penerapan Kebijakan SKPI (Asp-3)

Sumber: diolah oleh Peneliti

Apabila diakumulasikan dengan bobot kinerja 24 PTKIS, dari aspek rencana strategi kebijakan SKPI (Asp-3), diperoleh angka, sebesar (47.58), dengan perolehan rata-rata sebesar (1,90), maka kinerja 24 PTKIS, dari aspek rencan strategi operasi kebijakan SKPI, (Asp-3) bisa dikatakan masih rendah.

d. Kendala yang dihadapi, dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS (Asp-4)

Ahli manajemen kebijakan David C. Korten (Penelitian Tarigan, 2000:19), memandang, bahwa suatu program akan

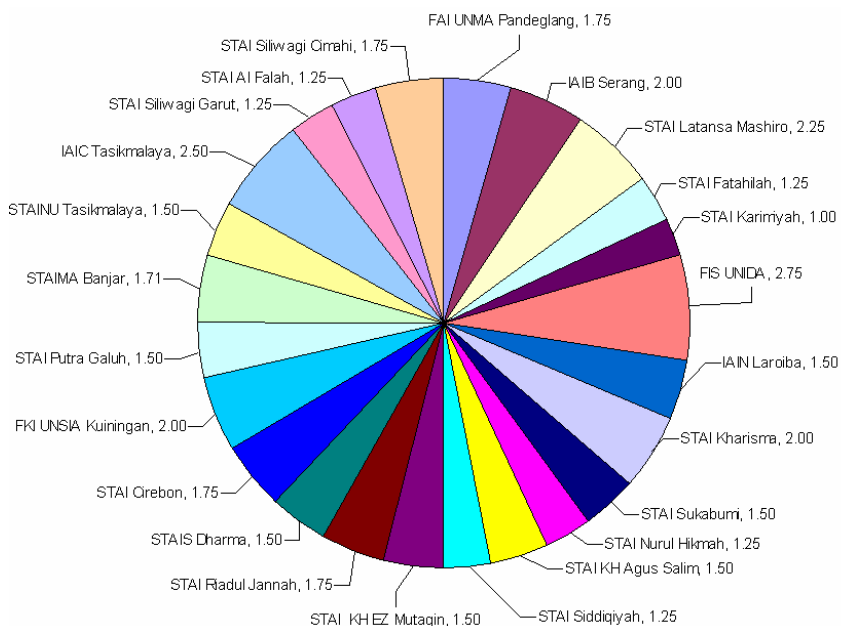
berhasil diimplementasikan, jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu: (1) kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). (2) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. (3) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Keempat komponen tersebut di atas, dihitung berdasarkan Rentang Nilai (RN), dan diberi nilai bobot Kesiapan: 350 - 400= Sangat Tinggi; 280 - 349 = Tinggi; 200 - 279 = Cukup; dan 100 -199= Kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan peneliti di 24 PTKIS, tanggal 25 Juni sampai 12 Juli 2018, ditemukan bahwa kinerja 24 PTKIS, dari aspek kendala dalam penerapan kebijakan SKPI (Asp-4), diperoleh angka: (1) FAI UNMA Pandeglang, dengan bobot kinerja (1.75), artinya masih rendah; (2) IAIB Serang dengan (2.00), artinya cukup, (3) STAI Latansa Mashiro, dengan bobot kinerja (2.55) artinya cukup; (4) STAI Fatahilah, dengan bobot kinerja (1.25) artinya kurang atau masih rendah; (5) STAI Karimiyah dengan bobot kinerja (1.00) artinya cukup; (6) FIS UNIDA dengan bobot kinerja (2.75), artinya tinggi; (7) IAIN Laroiba (1.50) artinya masih rendah; (8) STAI Kharisma dengan bobot kinerja (2.00), artinya cukup; (9) STAI Sukabumi, dengan bobot kinerja (1.50) artinya masih rendah; (10) STAI Nurul Hikmah dengan bobot kinerja (1.25), tergolong masih rendah; (11) STAI KH Agus Salim, dengan bobot kinerja (1.50) tergolong masih rendah; (12) STAI Siddiqiyah, dengan bobot kinerja (1.25) artinya masih rendah; (11) STAI KH EZ Mutaqin, dengan bobot kinerja (1.50)

tergolong masih rendah; (14) STAI Riadul Jannah dengan bobot kinerja (1.75), tergolong masih rendah; (15) STAIS Dharma, dengan bobot kinerja (1.50) tergolong masih rendah; (16) STAI Cirebon, dengan bobot kinerja (1.75), tergolong masih rendah; (17) FKI UNSIA Kuningan, dengan bobot kinerja (2.00) tergolong cukup; (18) STAI Putra Galuh, dengan bobot kinerja (1.50) tergolong masih rendah; (19) STAIMA Banjar dengan bobot kinerja (1.50), tergolong masih rendah; (20) STAINU Tasikmalaya dengan bobot kinerja (1.50), tergolong masih rendah; (21) IAIC Tasikmalaya, dengan bobot kinerja (2.50) tergolong cukup; (22) STAI Siliwagi Garut, dengan bobot kinerja (1.25) dianggap masih rendah; (23) STAI Al Falah dengan bobot kinerja (1.25) tergolong masih rendah; (24) STAI Siliwagi Cimahi, dengan bobot kinerja (1.75), tergolong masih rendah.

Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan gambar 4.4.4, berikut:



Gambar 4.4.4

Bobot Kinerja Kesiapan 24 PTKIS dalam Aspek Kendala dalam Kebijakan SKPI (Asp-4)

Sumber: diolah oleh Peneliti

Apabila diakumulasikan dengan bobot kinerja 24 PTKIS, dari aspek permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan SKPI (Asp-4), diperoleh angka, sebesar (39.96), dengan perolehan rata-rata sebesar (1,60), maka kinerja 24 PTKIS, dari aspek kendala yang dihadapi yang dalam implementasi kebijakan SKPI, (Asp-4) bisa dikatakan masih rendah.

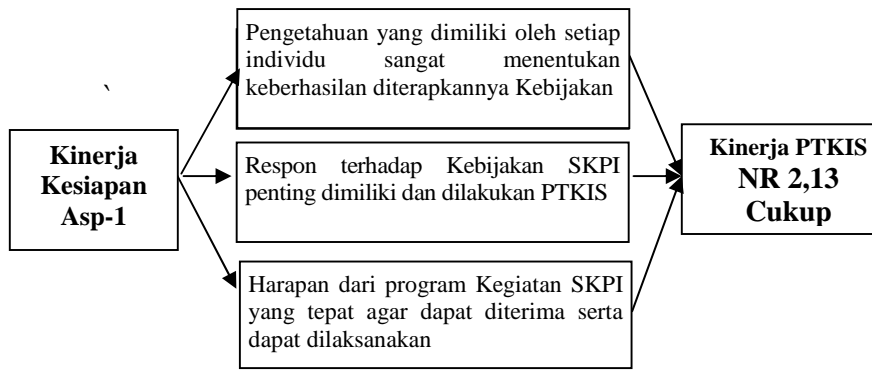
2. Interpretasi Data Temuan Penelitian

Interpretasi data dalam penelitian ini, berupaya menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki. Teknik yang dilakukan dalam interpretasi data, antara lain dengan: (a) menghubungkan data dengan pengalaman peneliti, (b) mengaitkan temuan (data) dengan hasil kajian pustaka atau teori terkait, (c) memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian dan implikasi hasil penelitian, dan/atau, (d) meminta nasihat teman sejawat jika mengalami kesulitan.

Sesuai dengan hasil analisis data temuan penelitian ini, untuk mengkaji dan mencermati tentang kinerja: (a) Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI, (b) Pengorganisasian Kebijakan SKPI; (c) Rancangan Starategi Penerapan SKPI dan (d) Faktor-faktor yang memengaruhi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI, pada 24 PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat. Pada bagian ini, akan diintreprestasikan data temuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI (Asp-1)

Dalam menafsirkan kebijakan, diperlukan syarat khusus, Sesuai dengan hasil analisis data temuan penelitian ini, untuk mengkaji dan mengintreprestasikan tentang "kinerja Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI, (Asp-1)", divisualisasikan pada gambar 4.5.1, berikut:



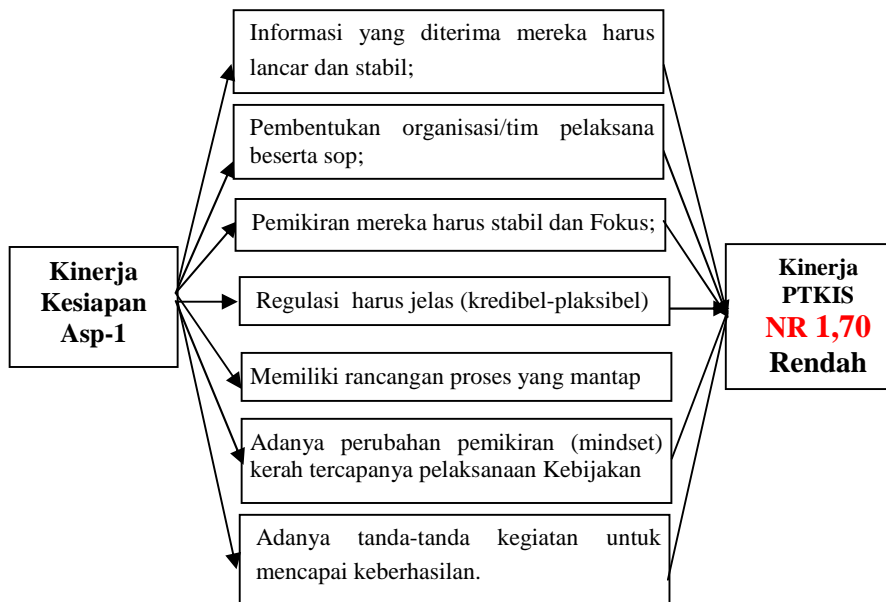
Gambar 4.5.1
Intrepretasi dari kinerja Penafsiran/intreprestasi kebijakan SKPI (Asp-1)

Sumber: diolah oleh peneliti

Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan Kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong Kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS. Nilai kinerja rata Asp-1 (2.13) dianggap cukup, hal ini diwakili oleh sebagian besar 17 PTKS dari 24 PTKIS atau hampir (70.83 %) memiliki harapan besar terhadap penerapan SKPI. Artinya sangat memungkinkan untuk di bina dan kembangkan.

b. Pengorganisasian Kebijakan SKPI (Asp-2)

Pengorganisasian kebijakan, guna meningkatkan posisi tawar terhadap lembaga manapun, adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas, menumbuhkan kondisi kritis, serta adanya proses kaderisasi. Hal tersebut akan berdampak pada pengorganisasian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan pada penentuan Kebijakan, banayak indikator yang harus dipenuhi. Sesuai dengan hasil analisis data temuan penelitian ini, untuk mengkaji dan mengintrepretasikan tentang "kinerja Pengorganisasian kebijakan SKPI, (Asp-1)", divisualisasikan pada gambar 4.5.2, berikut:



Gambar 4.5.2

Intrepretasi dari kinerja Pengorganisasian kebijakan SKPI, (Asp-2)

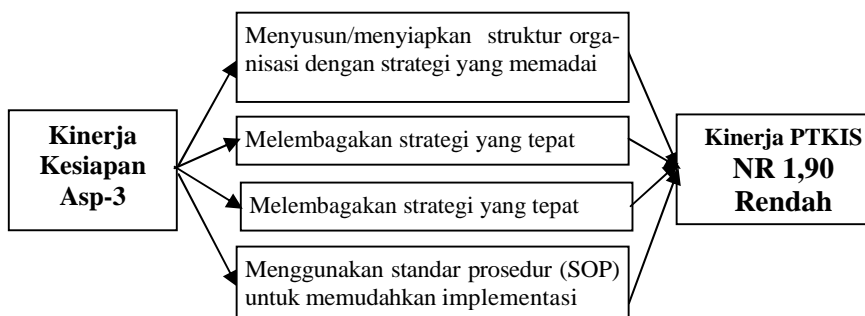
Sumber: diolah oleh peneliti

Untuk menerapkan SKPI, diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikannya, dikarenakan Kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong Kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS. Nilai kinerja rata Asp-1 (1.70) dianggap belum cukup/rendah hal ini diwakili oleh sebagian besar 15 PTKS dari 24 PTKIS atau hampir (62.50 %) masih belum miliki persiapan untuk mengorganisasikan kebijakan SKPI. Artinya mereka memerlukan informasi, moivasi, pembina dan pengembangan berkelanjutan.

c. Perencanaan strategi operasi kebijakan SKPI (Asp-3)

Kesiapan untuk merealisasikan kebijakan dalam hal ini penenerapkan SKPI, diperlukan strategi yang jitu,

yaitu: (1) menyusun struktur dengan strategi; (2) melembagakan strategi; (3) mengoperasikan strategi; (4) menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi. Sesuai dengan hasil analisis data temuan penelitian ini, untuk mengkaji dan menginterpretasikan tentang "kinerja rencana strategi operasional kebijakan SKPI, (Asp-3)", hal itu divisualisasikan pada gambar 4.4.03, berikut:

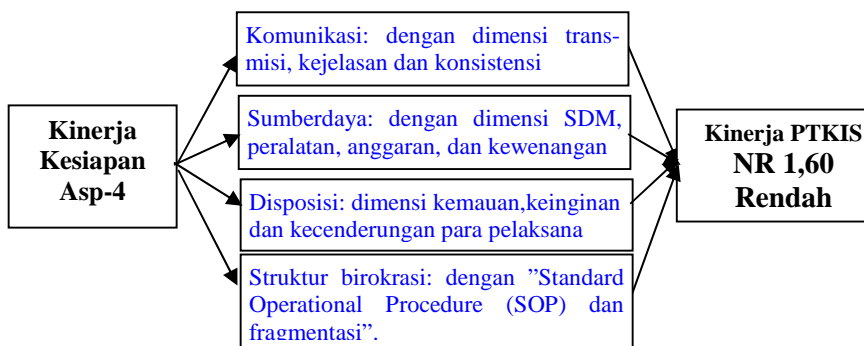


Gambar 4.5.3.
Perencanaan strategi operasi kebijakan SKPI (Asp-3)
 Sumber: diolah oleh peneliti

Perencanaan strategi operasional penerapan kebijakan SKPI memerlukan strategi khusus, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, akan melibatkan bukan hanya pihak yang terkait dilingkungan intenal saja, akan tetapi pihak luar juga harus dilibatkan, sehingga permasalahannya menjadi kompleks. Nilai kinerja rata Asp-5 (1.90) nilai ini tergolong masih rendah diwakili oleh sebagian 12 PTKS dari 24 PTKIS atau (50 %) memiliki daya tarik menarik antar (- dan +) terhadap penerapan SKPI. Artinya masih memiliki peluang untuk di bina dan dikembangkan, dan tidak akan sesulit pada kasus Asp-2.

d. Faktor-faktor yang menghambat kesiapan penerapan kebijakan SKPI (Asp-4)

Faktor-faktor yang menghambat kesiapan penerapan kebijakan SKPI (Asp-4) tidak lepas dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Untuk mengkaji dan mengintrepretasikan tentang bisa dikatakan masih rendah. Hal itu divisualisasikan pada gambar 4.5.4, berikut:



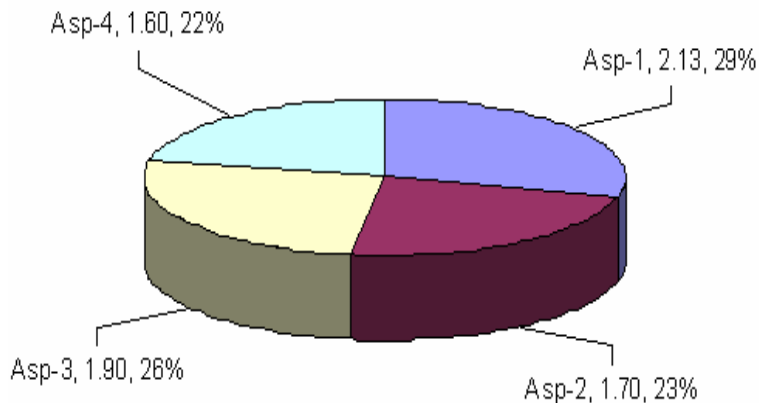
Gambar 4.5.4
Kendala yang dihadapi dalam Kesiapan Implementasi kebijakan SKPI (Asp-4)

Sumber: diolah oleh peneliti

Karakteristik implementasi kebijakan, seperti halnya kebijakan SKPI, merupakan kebijakan baru diberlakukan pada Kinerja 24 PTKIS diperoleh angka rata-rata (1,60), maka kinerja 24 PTKIS, dari aspek permasalahan dalam implementasi kebijakan SKPI, (Asp-4), masih rendah. diwakili oleh sebagian besar 16 PTKS dari 24 PTKIS atau (66 %), dikategorikan paling rendah dari empat kasus kesiapan terhadap penerapan SKPI. Artinya walaupun memiliki peluang untuk di bina dan

kembangkan, akan tetapi akan sulit keimbang mengani kasus Asp-2.

Apabila data tersebut diakumulasikan, maka diperoleh gambaran penafsiran data dalam prosentase % sebagai kekuatan kinerja 24 PTKIS sebagaimana divisualisasikan pada gambar 4.6.1, berikut:



Gambar 4.6.1
Data Capain kumulasi (Asp-1-4) Kesiapan Implementasi kebijakan SKPI

Sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 4.6.1, menunjukkan kemampuan 24 PTKIS dalam mendukung penerapan kebijakan SKPI pada 4 aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1, penafsiran/intrepretasi kebijakan, dengan bobot 2.13 (29%) dinilai cukup;
- 2) Aspek 2, pengorganisasian kebijakan, dengan bobot 1.70 (23%) dinilai masih rendah;
- 3) Aspek 3, stategi penerapan kebijakan, dengan bobot 1.90 (26%) dinilai masih rendah;
- 4) Aspek 4, faktor kendala kebijakan, dengan bobot 1.90 (22%) dinilai masih rendah;

Apabila keempat capaian kinerja dilihat secara akumulatif, dari segi kualitatif dan kuantitatif maka:

- 1) Secara kualitatif dari sudut kinerja 24 PTKIS maka diperoleh angka rerata kesiapan dalam mendukung implentasi kebijakan SKPI, yaitu:

$$\frac{TNL(45.815)}{24} = NR 191$$

(dari total nilai 45.815/24, diperoreh NR, sebesar 1.91).

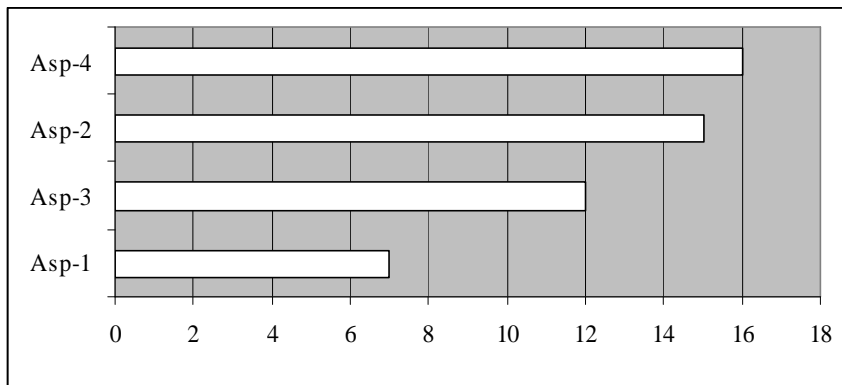
- 2) Secara kuantitaif dari 4 aspek kesiapan PTKIS yaitu:

$$\frac{TNK (76.4)}{4} = NR 191$$

(dari TNK 76.4/4, maka diperoleh NR, sebesar 1.91)

Dengan demikian, kesiapan PTKIS dalam mendukung penerapan kebijakan SKPI (Perrmenag RI No. 1 tahun 2016), secara kualatatif maupun kuantitatif secara bersama-sama diperoleh nilai NR, sebesar 1.91. Nilai 1.91, dikegorikan masih rendah.

Apabila kasus tersebut posinya dilihat dari tingkat kesulitan dibandingkan dengan kemudahannya untuk penganannya, divisualisasikan pada gambar (grafik) 4.6.2, berikut:



Gambar 4.6.2

Grafik Perbandingan tingkat kesulitan menangani Kasus kesiapan penerapan SKPI

Sumber: diolah oleh peneliti

Keterangan:

Asp-4 dengan Posisi kesulitan ke-1 = ada di 16 PTKIS

Asp-2 dengan Posisi kesulitan ke-2 = ada di 15 PTKIS

Asp-3 dengan Posisi kesulitan ke-3 = ada di 12 PTKIS

Asp-1 dengan Posisi kesulitan ke-4 = ada di 7 PTKIS

3. Analisis Dampak Ketidaksiapan PTKIS dalam mendukung penerapan Implementasi Kebijakan SKPI

Seuai dengan desain dan tema penelitian ini yaitu: Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), dalam mendukung Implementasi Kebijakan Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. (Studi di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten).

Dikarenakan karakteristik, penelitian ini sipatnya penelitian kebijakan dalam rangka peningkatan mutu PTKIS. Penelitian kebijakan pada awalnya merupakan kegiatan untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Ann Majchrzak (1984:12), yang mengemukakan bahwa penelitian kebijakan adalah sebuah penelitian tentang suatu permasalahan sosial yang mendasar dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan berkenaan dengan masalah sosial tersebut. Sesuai dengan yang disarankan Creswell metode campuran berurutan dimana peneliti melaksanakan tahap kajian penelitian kualitatif dan kemudian melaksanakan secara terpisah tahap penelitian kuantitatif, atau sebaliknya Creswell menyebut desain ini sebagai desain dua tahap. (Creswell, 2010:332). Yang terakhir adalah desain metode campuran (mix methods) sejajar atau bersamaan. Data kualitatif atau kuantitatif di kumpulkan dalam waktu yang sama dan dianalisis untuk saling melengkapi.

Atas dasar itu, maka pembahasan penelitian kedua ini, berkenaan dengan analisis teori kebijakan berkaitan dengan kesiapan PTKIS dalam mendukung kebijakan penerapan SKPI, selanjutnya berturut-turut analisis teori kebijakan, dan analisis praktis implementasi kebijakan penerapan SKPI pada PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

a. Analisis Teori Implementasi Kebijakan: tentang Implementasi Kebijakan SKPI

Dimaklumi bersama bahwa, suatu kebijakan, belum tentu dapat diimplementasikan dengan alasan bahwa: (1) salah satu tahapan yang paling krusial dari kebijakan adalah tahap implementasi; (2) implementasi kebijakan selalu ditandai oleh adanya kesenjangan antara isi kebijakan dengan konteks kebijakan; dan (3) perlu dicarikan faktor-faktor kritis yang dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan hanya akan dicapai apabila faktor-faktor kritis dari implementasi kebijakan dapat diatasi dan dijadikan.

Faktor-faktor kritis tersebut menurut George Edward III (Widodo, 2010:9-10), mencakup 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat hubungan variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) Sumberdaya, berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan, yaitu sumber daya manusia, kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana. Sumber daya menjamin dukungan efektivitas implementasi kebijakan.
- 3) Disposisi atau sikap, berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.

- 4) Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Ada dua indikator penting dalam struktur organisasi yaitu: (a) Standar operasi prosedur sebaiknya dibuat secara sederhana namun tetap tidak mengurangi makna sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana. Standar operasi prosedur merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan standar operasi prosedur, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan efisien; (b) Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. Fragmentasi organisasi terutama berasal dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi.

Karakteristik implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu: (1) siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) esensi proses administratif; (3) kepatuhan terhadap kebijakan; (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan (Sudiyono. 2007:81)

Dalam sistem terpusat, SKPI dikembangkan secara kelembagaan dalam hal ini institusi utama pendidikan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi), dan diteruskan ke masing-masing Fakultas dan Jurusan/program Studi untuk dilaksanakan. Di antara para pelaku utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan SKPI, diidentifikasi berdasarkan PMA 1/2016, pasal 19 menegaskan bahwa: (a) Dekan untuk Tingkat Universitas dan Institut; (b) Ketua Jurusan/Prodi untuk Sekolah

tinggi; (c) Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan (d) Dekan untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.

Ketentuan, pada pasal 20, ayat (1) menegaskan tentang SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.

Pasal 21, Dalam hal perguruan tinggi penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan KOPERTAIS untuk PTKIS.

Pasal 22, ayat (1) Pengesahan Salinan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan; ayat (2) Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan; ayat (3) Pengesahan Salinan SKPI dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk: (a) Universitas dan Institut dilakukan oleh Wakil Dekan terkait bidang Akademik; dan (b) Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.

Pasal 23, ayat (1) Dalam hal Perguruan Tinggi penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengesahan Salinan SKPI dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Direktur Jenderal dan KOPERTAIS untuk PTKIS; ayat (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

Untuk hal itu Darwin (1999:121), menyatakan bahwa ada lima aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu:

1) Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*). (Dwiyanto, Agus. 2005:103). .

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan *complain*, bahkan benturan fisik bisa saja

terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

2) Kejelasan manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3) Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh Darwin (1999:122) menyatakan bahwa: Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

4) Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh karena itu, Darwin (1999:123) menyatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan proram merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses impementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.

5) Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Kelima faktor yang menentukan sulit atau tidaknya proses implementasi kebijakan publik di atas oleh Muhadjir Darwin nampaknya diuraikan secara umum, dalam pengertian tidak dibedakan mana aspek organisasi serta mana faktor lingkungan. Oleh Effendi (2000:13), dikatakan bahwa perbedaan antara studi implementasi dengan penelitian ilmiah biasa terletak di dalam variabel penelitian (khususnya variabel independen). Dimana, penelitian ilmiah biasa bebas menentukan variabel independen,

artinya variabel yang secara teoritis penting, dapat dijadikan variabel independen atau dependen sebagai obyek atau topik penelitian. Sedangkan studi implementasi, ada keharusan dimana variabel penelitian (independen) adalah variabel yang comparable (dapat diimplementasikan), disebabkan oleh variabel-variabel independen tersebut digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan, karenanya tidak semua variabel dapat dijadikan topik untuk studi implementasi.

b. Analisis Praktis Implementasi Kebijakan: tentang Implentasi Kebijakan SKPI

Setiap Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan SKPI dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Terkait dengan itu, Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa SKPI harus ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (PP.81/2014). Penggunaan dua bahasa didasarkan pertimbangan bahwa para sarjana yang akan memasuki pasar kerja saat ini memiliki kesempatan sangat luas dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Diketahui, implementasi MEA memungkinkan meluasnya pasar kerja di seluruh negara ASEAN. Sesuai kesepakatan Bali Concord II tahun 2003 diputuskan bahwa mulai tahun 2015 berlaku *free flow of service* di seluruh negara ASEAN bagi seluruh warga negara-negara di kawasan ini (AECOCBE, 208|10). Dengan demikian, sarjana yang ada di posisi level enam KKNi, yang merupakan calon wirausahawan dan tenaga profesional, harus diakseskan pada lapangan kerja dengan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang melahirkannya, baik untuk pasar kerja di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk menyikapi hal itu, Kementerian Agama menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 1 tahun 2016, tentang: *Ijazah, Transkrip Akademik, Dan*

Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Kebijakan ini ditetapkan dan diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2016

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya, menerbitkan sertifikat kompetensi keguruan bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran. Demikian juga Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), harus menerbitkan sertifikat kompetensi alumni sebagai hakim, pengacara, atau kompetensi lain yang sesuai dengan keahlian sekaligus bisa digunakan alumninya untuk memasuki pasar kerja.

Persoalannya adalah bagaimana dengan fakultas-fakultas yang seluruh program studinya mengelola program keilmuan dan tidak pernah mengembangkan program pendidikan keahlian untuk memasuki pasar kerja? Sebab karakter keilmuan yang mereka kembangkan adalah ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk bekerja. Sebut misalnya program studi Aqidah Filsafat, al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain. Sementara, hampir 60% ilmu yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu-ilmu keagamaan yang tidak disertai dengan keterampilan kerja karena karakter keilmuannya. Oleh sebab itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: "....Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya" (Permmmendikbud, 81/2014). Maka, mengacu pada Permendikbud ini, seorang mahasiswa/sarjana bidang al-Qur'an dan Tafsir, misalnya, bisa memiliki sertifikat

kompetensi melalui pelatihan yang diperoleh selama belajar dan belum dinyatakan lulus dari program studinya.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengamanatkan agar lulusan pendidikan tinggi pada level enam (Sarjana dan Diploma IV) harus mampu: “..Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi”(Perpres, 28/211). Pernyataan KKNI ini hendak menegaskan bahwa lulusan sarjana atau diploma IV harus mampu menjadi wirausahawan atau bekerja pada suatu lembaga. Apakah sebagai wirausahawan maupun bekerja di perusahaan, korporasi, atau jasa yang dimiliki oleh perseroan orang lain, dia harus memiliki kreatifitas dan inovasi untuk memajukan usaha tersebut, atau setidaknya mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga di mana dia bekerja sebagai profesional di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap sarjana harus memiliki *basic skill* yang bisa mengantarkannya menjadi profesional, baik untuk menjadi wirausahawan maupun bergabung dalam usaha orang lain. Bukan masalah bila skill tersebut relevan atau tidak dengan program studi tempatnya belajar, karena SKPI pendidikan tinggi selalu menyiapkan maksimal 20% pendidikan kompetensi di luar kompetensi utama dan pendukung dari program studi.

Seluruh keterampilan yang beragam, baik *inherent* dengan program studi maupun tidak, harus dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani pejabat berwenang, dan diberikan pada para mahasiswa di samping ijazah dan transkrip. Bahkan jika ada sertifikat kompetensi yang mereka peroleh dari luar institusi, yang sifatnya keterampilan atau keahlian, selama diperlukan pasar kerja serta diperoleh kuliah, juga harus diakui dan ditulis dalam dokumen resmi tersebut. Itulah yang disebut SKPI. Ia menjadi lampiran sekaligus pendamping ijazah yang harus diberikan pada seluruh sarjana pendidikan akademik, vokasi, profesi maupun spesialis (PP.4/2014). SKPI memuat penjelasan berbagai kompetensi yang dimiliki mahasiswa/sarjana, terlepas apakah relevan atau tidak dengan program studinya, diperoleh melalui pelatihan dalam institusi atau di luar institusi,

atau melalui festival dan kompetisi yang semuanya diperoleh dalam masa studi mereka.

Dengan demikian, institusi yang akan menerimanya sebagai pegawai, memiliki persepsi yang benar tentang calon pegawai yang direkrutnya, dan para sarjananya pun terbantu dengan penjelasan tersebut, sehingga proses dedikasi keilmuan, keterampilan, dan keahlian dalam menunjang pengembangan karir profesional serta partisipasi mereka dalam proses pemajuan bangsa akan semakin cepat dan nyata.

Dalam konteks ini, berdasar pada kajian penelitian di 24 PTKIS pada umumnya mereka dihadapkan pada permasalahan seperti tampak pada gambar/grafik 4.3.6, di atas, menunjukkan bahwa memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan SKPI. Hal itu memerlukan komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

4. Langkah Antisipatif penyiapan Implementasi Kebijakan

a. Dasar Pemikiran, untuk mengantarkan Langkah antisipatif

Berdasar pada hasil analisis dan interpretasi data penelitian kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten di peroleh keterangan, bahwa: pertama; Asp-4 (kesiapan dalam mengimplementasi kebijakan SKPI belum sepenuhnya didukung oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, menempati Posisi kesulitan ke-1, ditemukan pada 16 PTKIS, kasus ini merupakan kasus terberat dan sangat kritis, memerlukan penanganan dan antisipasi paling tinggi dibanding dengan kasus lainnya; kedua; Asp-2 (Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; maksunya), kasus ini menduduki Posisi kesulitan ke-2, ditemukan pada 15 PTKIS, kasus ini sama memerlukan penanganan, namun pengangannya tidak seberat kasus pertama; ketiga; Asp-3 (Pengorganisasian kebijakan SKPI, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; berada pada Posisi kesulitan ke-3, ditemukan pada 12 PTKIS, kasus ini sama memerlukan

penangan, namun pengangannya tidak seberat kasus pertama dan kasus kedua; keempat; Asp-1 (tentang penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan), menepati Posisi kesulitan ke-4 ditemukan pada 7 PTKIS, sama halnya dengan kasus-kasus lainnya namun tidak seberat untuk menagani kasus (Asp-4, 2, dan 3), dikarenakan sebagian besar PTKIS (17 PTKIS/70,83 % lebih), sudah mempunyai niat dan itikad untuk melaksanakan kebijakan SKPI, hal ini apabila dibanding dengan yang lainnya, akan mudah dibina dan dikembangkan.

Telepas dari hal itu, antara kasus yang paling sulit sampai kasus yang paling mudah, kesemuanya memerlukan penangana, itulah kemudian dalam dunia manajemen disebut pengelolaan, pengurusan. Apabila dilihat dari teori kebijakan, maka: pertama filosofi adanya perubahan kebijakan ditetapkan untuk mengani masalah, seperi diluncurkannya kebijakan SKPI. "Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan SKPI dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"

Akan tetapi di sisi lain implementasi satu kebijakan seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (looser). (Dwiyanto, Agus. 2005:103).

Maka dari itu, Penelitian ini, diperlukan untuk membantu, menyinkap tabir, sebagaimana penelitian Edwar III tahun 80-an, menghasilkan postulat bahwa:

"..suatu kebijakan, belum tentu dapat diimplementasikan dengan alasan bahwa: (1) salah satu tahapan yang paling krusial dari kebijakan adalah tahap implementasi; (2) implementasi kebijakan selalu ditandai oleh adanya kesenjangan antara isi kebijakan dengan konteks

kebijakan; dan (3) perlu dicari faktor-faktor kritis yang dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan hanya akan dicapai apabila faktor-faktor kritis dari implementasi kebijakan dapat diatasi dan dijadikan (komunikasi, sumberdaya, disposi, dan struktur birokrasi)" (Widodo, 2010:9-10).

Secara operasional Tangkilisan, memberikan pola, untuk dilaksanakan dalam mempersiapkan implementasi keputusan/ Kebijakan yaitu: (a) Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; (b) Pengorganisasian kebijakan SKPI, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan Kebijakan; (c) Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya; (Tangkilisan (2003: 18).

b. Trend ke Depan yang perlu diantisipasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat mendorong terjadinya perubahan paradigma masyarakat, pranata sosial, dan kehidupan individu. Fakta ini melahirkan kecenderungan-kecenderungan futuristik dalam dunia pendidikan, yaitu:

- 1) Pergeseran paradigma pengelolaan lembaga pendidikan berasrama dari manajemen ilmiah menuju manajemen mutu yang mensyaratkan fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, pandangan sistem, dan peningkatan berkelanjutan. Lembaga pendidikan tinggi sejatinya dapat merubah pendekatan pengelolaan pendidikannya agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya;
- 2) PTKIS, dihadapkan pada situasi yang kompleks (complexity), di tengah-tengah perubahan lingkungan sosial, budaya, dan politik dan perubahan sikap mental penyelenggara pendidikan dan *stakeholders* pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk bisa bertahan dan konsisten dengan identitasnya sebagai lembaga tafaquhfidin dan lembaga yang pembangunan karakter (Character building) sehingga tetap kompetitif dan unggul;
- 3) Pergeseran sosio-budaya, lingkungan, paradigma masyarakat yang ditandai dengan perubahan gaya hidup,

dekadensi moral, dan lain sebagainya menjadi tantangan baru bagi lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mampu melahirkan lulusan yang berprinsip dan taat pada sistem nilai (value system) yang telah dibangun dan bahkan mampu merubah dan memperbaiki paradigma masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

Untuk menghadapi era persaingan tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia “termasuk pendidikan tinggi keagamaan” harus mempersiapkan tiga aspek yang sangat strategis. Ketiganya yaitu perbaikan Kurikulum dan program pendidikan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua untuk komunikasi tingkat regional, dan menyiapkan para mahasiswa sebagai profesional muda yang memiliki budaya kerja baik (Dede Rosyada 2014: 7).

Salah satu jalan perbaikan Kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* Kurikulum, dengan itu para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis SKPI dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur SKPI nya sudah padat, dan sudah memiliki satu *skill* khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka seluruh perguruan tinggi “termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengelola program studi keagamaan dan sebahagian besar tidak diorientasikan pada pasar kerja” harus memberikan perhatian serius dengan mengembangkan program-program pelatihan dan workshop bagi para mahasiswa, khususnya untuk keterampilan dan keahlian alternatif di luar keahlian program studi, bersertifikat dan dapat dideskripsikan dalam SKPI, sehingga bisa dijadikan informasi penting untuk memasuki pasar kerja. Rancangan baru

pendidikan tinggi tersebut sebagai sebuah gerakan inovatif untuk mengakses seluruh sarjana Strata I atau diploma IV pada pasar kerja yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN.

Tujuan mengembangkan SKPI adalah untuk membuat perbedaan bagi para peserta didik. Singkatnya, implementasi SKPI membawa perubahan dan mudah-mudahan perbaikan. Dengan kata lain, bagaimana para aktor dalam hal ini para ketua prodi, dosen dan civitas akademika memastikan bahwa SKPI membawa perubahan yang diinginkan. Nampaknya para aktor, pengembang SKPI di delapan prodi, itu belum memahami bagaimana cara membawanya dan belum dapat memastikan bahwa SKPI KKNi akan dapat membawa perubahan yang diinginkan, dikarenakan, oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Perencanaan SKPI KKNi di 24 PTKIS tersebut belum menentukan keadaan yang sebaik-baiknya dari hubungan-hubungan sumber daya internal dan eksternal dalam suatu sistem pendidikan dengan keadaan yang dinamis serta cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Secara garis besarnya rancangan SKPI di delapan prodi, belum memenuhi empat unsur, yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu: (a) capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, (b) strategi pembelajaran untuk mencapai, (c) sistem penilaian ketercapaiannya, dan (d) panduan ringkas ini juga dilengkapi dengan dua "Panduan" yang tercantum dalam lampiran.
- 3) Kondisi di delapan program studi, belum memperjelas memperjelas "profil lulusan" yang diharapkan melalui kegiatan pelacakan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (a) sikap (*attitude*), (b) bidang kemampuan kerja, (c) pengetahuan, dan (d) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan kemudian harus dijabarkan ke

dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah di program studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

Kegiatan mengembangkan SKPI pada hakikatnya merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan SKPI adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar SKPI, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. Panduan ringkas ini juga dilengkapi dengan dua "Panduan" yang tercantum dalam lampiran.

c. Langkah-langkah Aksi untuk Antisipatif

Perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan terkadang tidak terprediksi memunculkan berbagai persoalan serius yang perlu diantisipasi. Kemampuan untuk merespon berbagai kecenderungan global perlu kearifan (*wisdom*).

- 1) Adopsi prinsip-prinsip manajemen mutu total (TQM), merupakan salah satu solusinya. TQM merupakan metodologi yang dapat membantu para pimpinan pendidikan beresama merespon perubahan lingkungan yang begitu cepat. Ishikawa (1993:135), menjelaskan kelebihan TQM, yaitu: "...TQM, merupakan sistem manajemen yang mengangkat mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi". Untuk mengembangkan wawasan keunggulan dan penciptaan iklim kompetitif, manajemen strategis dapat diaplikasikan sebagai perspektif dalam implementasi manajemen mutu total ini. Manajemen strategis merupakan serangkaian langkah-langkah strategis berupa formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta kontrol.

- 2) Kearifan dalam memandang masalah, kearifan dalam mengantisipasi masalah, dan kearifan dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan langkah-langkah antisipatif berikut: Pertama: Menjadikan sistem nilai (value system), yaitu nilai teologis, etis, estetis, fisik-fisiologis, logis, dan teologis landasan mengelola mutu pendidikan tinggi yang akan menentukan bentuk, corak, intensitas, kelenturan, perilaku seseorang atau kelompok yang diwujudkan dalam bentuk fisik, perilaku, dan simbol-simbol yang pada gilirannya menjadi budaya atau kultur.
- 3) Pentingnya penekanan aspek nilai dalam proses perubahan karena kedudukannya yang sangat sentral dalam masyarakat. Sistem nilai dipandang sebagai pedoman tertinggi bagi seluruh artikulasi tingkah laku manusia baik secara personal maupun sosial. Seluruh sistem nilai kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkrit, semuanya berderivasi dari sistem ini.

Berdasar pemikiran tersebut, Mastuhu (2000: 82), menyatakan, bahwa:

"..Setiap masyarakat, juga institusi terlepas dari perbedaan stratifikasinya pasti mempunyai tata nilai yang berpengaruh sangat besar dalam kehidupan seseorang secara personal dan mengikat secara integratif bagi seluruh anggota komunitas. Dengan kesatuan sistem nilai, suatu komunitas dapat disatukan dan cenderung mempunyai ikatan solidaritas dan rasa identitas bersama yang kokoh". Salah satu implikasi praktisnya adalah bahwa PTKIS, semakin menekankan pentingnya *corporate culture*, yang berbasis kearifan ajaran Islam, dalam melaksanakan pembinaan pengembangannya. Pada saat yang bersamaan, peningkatan akuntabilitas PTKIS pun tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal (*local wisdom*).

Reorientasi proses pendidikan dengan menekankan pada keseimbangan perkembangan potensi indera, akal, dan hati (*qalbu*) yang menurut al-Syaibani (Tafsir, 1999:221) bahwa, manusia mempunyai tiga kekuatan yang sama pentingnya, laksana sebuah segitiga yang sisi-sisinya sama panjang. Potensi yang dimaksud ialah jasmani, akal, dan roh. Kemajuan, kebahagiaan, dan kesempurnaan kepribadian manusia

bergantung pada keselarasan ketiga potensi itu. Selanjutnya Tafsir, merinci potensi-potensi tersebut:

"..Secara umum manusia memperoleh pengetahuan melalui tiga jalan, yaitu: (1) potensi jasmani berupa indera. Potensi ini dapat dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan empiris. (2) potensi akal. Potensi ini digunakan tatkala ingin memperoleh pengetahuan tentang obyek yang tidak dapat diindera (tidak empiris), tetapi dapat dipikirkan secara logis. (3) potensi hati (suara hati). Dengan menggunakan potensi ini manusia dapat memperoleh pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik yang dimaksud ialah semua pengetahuan yang mengenai daerah suprarasional (supralogis, gaib)." (Tafsir (1999:222).

Masalah mendasar terkait dengan proses pendidikan adalah fenomena pengukuran mutu hasil pendidikan fokus pada penilaian ranah kognitif atau menilai mutu hasil pendidikan berdasarkan angka-angka dan cenderung mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik. Islam mengajarkan keseimbangan antara potensi indera, akal, dan hati sebagai sumber pengetahuan. Islam tidak membenarkan akal berkuasa merajalela sehingga pengetahuan yang dihasilkan akal menjadi tidak terkendali.

Atas dasar itu, PTKIS, memiliki potensi besar untuk kemajuan, sehingga aktualisasi dan artikulasi dari potensi tersebut membutuhkan manajemen pendidikan yang bermutu dan akuntabel; rekonstruksi paradigmatis pengelolaan pendidikan tinggi di atas, dengan menekankan pada pengembangan wawasan keunggulan dan penciptaan iklim kompetitif.

Untuk hal itu, Dedi Mulyasana (2011:288), menegaskan bahwa persaingan di era perubahan bukanlah persaingan dengan sesama lembaga lain, tapi persaingan dengan diri sendiri. Rekayasa ulang, benchmarking, perbaikan terus menerus, manajemen kualitas total, produksi yang ramping, persaingan berdasarkan waktu (time-based competition).

Tidak dipungkiri, pengelolaan pengembangan 24 PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, masih didominasi oleh cara-cara konvensional, dimana proses manajemen sangat bergantung kepada figur pimpinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi. Pengelolaan pendidikan konvensional seperti ini, tidak cukup relevan dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan yang begitu cepat dan dinamis. Namun optimis, pada akhirnya penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan suatu keniscayaan. Mendesak segera diimplementasikan dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kebijakan Penerapan SKPI pada PTKS, merupakan suatu sistem baru di lingkungan Pendidikan Tinggi, menjadi prioritas untuk dikembangkan karena besarnya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan kesamaan dari kekuatan faktor internal atau institusional. Beberapa sistem gagal karena benturan diantara keadaan atau lingkungan internal. Yang dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem yaitu: tingkat penggunaannya relatif tinggi, kepuasan pengguna terhadap sistem, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staff dari sistem informasi, tujuan yang dicapai dan imbal balik keuntungan untuk organisasi.

Penelitian Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan penerapan SKPI, (Permenag RI No. 1 tahun 2016), dikaji melalui empat aspek, hasilnya menunjukkan bahwa kinerja 24 PTKIS, secara kualitatif maupun kuantitatif diperoleh nilai NR, sebesar 1.91. dikategorikan masih rendah. Maka dari itu, penelitian menyimpulkan bahwa pada umumnya PTKIS belum siap dan mendukung terhadap penerapan Kebijakan SKPI, yang sejatinya sudah dapat dilaksanakan sejak tanggal 12 Januari 2016.

Secara lebih spesifik hasil kajian pada 4 aspek, yaitu: (1) Aspek penafsiran/intepretasi kebijakan, dengan bobot 2.13 (29%) dinilai cukup; (2) Aspek pengorganisasian kebijakan, dengan bobot 1.70 (23%) dinilai masih rendah; (3) Aspek strategi

penerapan kebijakan, dengan bobot 1.90 (26%) dinilai masih rendah; (4) Aspek menghadapi kendala kebijakan, dengan bobot 1.90 (22%) dinilai paling rendah;

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini kebijakan penerapan SKPI pada PTKIS, bertumpu pada empat variabel baik langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi yaitu: (1) komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; (2) Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, karena sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. (3) Sumber Daya manusia, berhubungan dengan pengetahuan, kompetensi keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya; (4) Struktur Birokrasi sebagai sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (*written procedures*), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

B. Impikasi

Implikasi dirumuskan berdasarkan temuan penelitian yang merupakan konsekuensi logis untuk mencapai kondisi yang ideal dalam Implementasi SKPI dapat diimplementasikan, pada PTKIS. Agar program ini terlaksana dengan baik, maka implikasi dari penelitian ini, dijadikan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan kebijakan, antara lain:

1. Tujuan dan program kebijakan SKPI, sejatinya berorientasi pada kepentingan publik. Tujuan kebijakan dibuat, karena adanya masalah yang merupakan sasaran capaian kegiatan, dan program dibuat sebagai alat untuk mengantarkan

tercapainya tujuan. Penetapan kebijakan untuk mencapai tujuan, harus di kembangkan berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis lingkungan organisasi. Perencanaan kebijakan yang efektif bila perencanaanya melibatkan beberapa *stesholders* yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut, dan disebut sebagai kebijakan partisipatif. Penjabaran kebijakan perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan operasional sesuai bidang dan program pelaksanaan yang memuat aspek-aspek, (a) tujuan yang akan dicapai, (b) kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam mencapai tujuan, (c) aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, (d) perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan (e) strategi pelaksanaan .

2. Pelaksanaan kebijakan harus melibatkan unsur internal dan eksternal yang dapat menjadi daya dukung sehingga satu kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat. Efektifitas pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi/kesiapan, dan struktur birokrasi, serta dikawal dengan pengawasan yang efektif. Dampak dari sebuah pelaksanaan kebijakan adalah elemen penting yang perlu dilihat dan diperhentikan dalam sebuah analisis kebijakan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor-faktor yang harus diidentifikasi, di analisis dan diantisipasi sebelum pelaksanaan terimplementasi melalui pendekatan masalah implementasi melalui analisis lingkungan. Dengan analisis lingkungan akan diketahui secara jelas dan pasti faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan organisasi yang dapat mencakup saluran distribusi yang handal. Akan tetapi, tidak kalah pentingnya untuk dikenali secara tepat adalah berbagai kelemahan yang mungkin terdapat dalam organisasi. Kelemahan manajerial, fungsional, operasional, struktur atau bahkan yang bersifat psikologis.

4. Langkah strategis dalam implementasi kebijakan adalah upaya yang dikembangkan secara efektif. Manajemen strategis dalam implementasi kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perumusan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam perencanaan implementasi kebijakan publik. Setelah masalah dikenali dan diidentifikasi dengan baik, maka perencanaan implementasi kebijakan dapat dirumuskan atau disusun/ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah adanya penetapan kebijakan, harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dari tujuan yang diinginkan. Langkah strategis diperlukan sebagai sebuah upaya untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan.
5. Hasil penelitian ini, memperkuat penelitian terdahulu yang meneliti persoalan mutu kinerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang dilakukan oleh Wawan dan Imas Masitoh (2015), dengan judul; "Mutu Kinerja Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Jawa Barat". Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (a) Kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi layanan akademik dan mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta memiliki kriteria cukup baik. (b) Budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta. (c) Kinerja pimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta. (d) Komunikasi organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta. (e) Layanan akademik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta. (f) Kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, layanan akademik secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta.

C. Rekomendasi

Berdasar dari Implikasi dirumuskan, maka penelitian ini, merekomendasikan pada saran penelitian ini, yaitu:

1. PTKIS, diperlukan adanya pengembangan atas penyikapan kebijakan penerapan SKPI, menuntut adanya: (a) pelatihan dan bimbingan hendaknya terus dilakukan, dan (b) sejatinya PTKIS, meningkatkan koordinasi di tingkat internal mapupun eksternal kepada PTKIS lainnya mengenai kebijakan yang ditetapkan dari atasan kepada bawahan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaksana kebijakan.
2. Pemerintah, pemangku kepentingan dalam hal ini, Kemenag RI (Dijen Pendis/Kopertais), untuk merubah paradigma, pola pikir SDM PTKIS, agar lebih professional, difokuskan pada WASDALBIN, secara kontiniu dan berkelanjutan. **Bimtek PTKIS difokuskan pada tataran teknis Fakultas, dan program studi, bahwa kebijakan penerapan SKPI, sejatinya sudah di implentasikan sejak 12 Januari 2016.**
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini, dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan, apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainya.
4. Keterbatasan penelitian ini ini hanya mengkaji kesiapan PTKIS dari empat aspek, kesiapan yaitu penafsiran/intrepretasi kebijakan; pengorganisasian kebijakan; Aspek stategi penerapan kebijakan, dan menhadapi faktor-faktor yang dijadikan kendala dalam implementasi kebijakan SKPI. menhadapi kendala kebijakan. Adapun kesiapan dari sumber daya manusia, kesiapan imprastruktur, dan komitmen organisasi dan penilaian kesiapan sumberdaya manusia PTKIS hanya menggunakan persepsi, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya. **Maka dengan ini, merekomendasikan kepada peneliti lain, agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih mendalam.**



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2015. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*. Publik. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Tafsir, 2006. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (cet-5) Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ahsan, Abdillah dan Nur Hadi Wiyono. 2008. *An Analysis of the Impact of Higher Cigarette Prices on Employment in Indonesia*. Jakarta: SEATCA.
- Ali, M. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung. Penerbit Angkasa.
- Ali, Mohamad. 1982. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Angkasa.
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi, 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif*. JogJakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Depdiknas
- ASEAN Economic Community Blueprint, 2008. *Association of Southeast Asian Nations*, Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bambang Endroyo dan Ramelan, 1984. *Inovasi Pendidikan Guru Kejuruan Teknik Mesin kejuruan* Jakarta: Gramedia Pustaka
- Budi Winarno, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* Edisi Revisi, Yogyakarta: Media Presindo.
- Caswell, J. A. 2000. "Analyzing Quality And Quality Assurance (Including. Labeling)" *For GMOs. AgBioForum*, Vol3, No4..
- Carter V. Good, 1977, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta.
- Darwin, Muhadjir. 1999. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Binarupa Aksara,
- Effendi, Sofian 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,.
- Gordon B. Davis, 1998. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara,

- Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno. 1991. *Teori Motivasi dan Aplikasinya dalam Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husni Rahim, 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Ilmu
- Ishikawa, Kaoru, 1993. *Pengendalian Mutu Terpadu*, Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jujun S. Suriasumantri, 2000. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*. Jakarta: Sinar Harapan
- Kartini, K., 1991, *Menyiapkan dan Memandu Karier*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Lofland, John & Lyn.H.Lofland. 1984. *Analyzing Social Settings*. California: Wadsworth Publishing
- Majchrzak, Ann, 1984, *Method for policy research Methods*, Series Vol.3,. London: Sage Publication, Beverly Hill,
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Moekijat. 1984. *Dasar-Dasar Motivasi*, Bandung: Sumur Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Offset,
- Mukhadis, A. 2004. *"Standar dan ... Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja.Rosdakarya
- Mulyasana, Dedy. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosda. Karya.
- Nasution. S. 2003. *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 1999, *Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya.Manusia*: Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Koputindo.
- Nur Aedi 210. *Metode Penelitian: Instrumen Penelitian Dan Pengumpulan Data*: Bandung: UPI,
- Pardjono, dkk. 2007. *Panduan Penelitian tindakan Kelas*. Yogyakarta: Lembaga. Penelitian UNY
- Patton, Carl V. and David Sawicki. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, New York: Prentice-Hall.
- Purwanto, Ngalim. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Roestiyah, N. K. 1982. *Didaktik Metodik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede, 2014. *Significance of English in the Liberalisation Era*, a paper was presented in the national Jakarta: Conference held by English Departmen, State Islamic University, Syarif Hidayatullah.
- Slameto 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru
- Sugihartono, dkk., 2007. *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.Creswell (2010:
- Sukardi, Dewa Ketut. 1993. *Psikologi Pemilihan Karir*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Sukmadinata, 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan (konsep, Prinsip, dan Instumen)*, Bandung: Reflika Aditama.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo,
- Tuti Sukamto dan Udin Saripudin Winataputra, 1995. *Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Depdikbud.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno Surakhmad, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito.

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama*

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011, *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*, Jakarta, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014.
- Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang *Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi*, Kemendikbud, Jakarta, 2014.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan*.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*, Kementerian Sekretariat NegaraRI, Jakarta, 2012.

Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan (Pustaka Setia, 2016); Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Komunikasi Informasi Teknologi Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Auditing Syari'ah (Pustaka Setia, 2018).

Penelitian: Strategi Pengembangan IAIN Bandung (Tesis) (2002); Profil Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (Studi Analisis tentang Latar belakang Fotensi, Model Motivasi Pengembangan Diri Mahasiswa). (2009); Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) (Penelitian di MTs Al-Mishbah Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung) (2010); Strategi Akselerasi peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (2011); Implementasi Kebijakan WASDALBIN menuju akuntabilitas PT. (Disertasi) (2012); Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Wirausaha Produk Beras Ketan (di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis). (2012); Studi Evaluatif Pembelajaran MK Ke-Islaman di Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD.(2013); Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) Di Pusat Kediatan Belajar Masyarakat Tresna Bhakti Ds. Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis (2013); Penerapan Pendidikan Karakter melalui pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) di MTs. Al-Mishbah Cipadung Bandung. (2014); Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, (2015); Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS Jabar-Banten (2016); Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNI, menuju Akuntabilitas Peguruan Tinggi (2017).; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (2018). Serta telah menulis Jurnal tidak kurang dari 21 Jurnal Nasional dan internasional .

Disamping itu, tak luput dari pengabdian kepada masyarakat. Ia, membina dan mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Mishbah Cipadung-Bandung yang menyelenggarakan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984-Sekarang, serta garapan khusus "Bina Desa" melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pembina Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kab. Ciamis.



Drs. Nasihudin, M. Pd., lahir di Bekasi, 20 September 1962, Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Wakil Koordinator KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten

Pendidikan, S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus tahun 1987, S2 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2003. Sedang menyelesaikan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Mengajar mata kuliah Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jabatan; Wakil Koordinator Bidang Akademik pada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Jawa Barat dan Banten (2016-sekarang). Mengampu Mata kuliah Evaluasi Pemelaran, dan Statistik Pendidikan pada jurusan PAI dan PGMI Fakultas Tarbiyah Bandung.

Karya Penelitian: Kualitas keberagaman Keluarga Ojeg di Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung (2013); Upaya meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistik melalui pembelajaran Peer Teaching, di Jurusan PGMI UIN SGD Bandung (2014); Partisipasi Mahasiswa UIN SGD Bandung dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (2015); Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS Jabar-Banten (2016); Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNi, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017). dan menulis Jurnal; Nasionalisme pada sistem pendidikan Pesantren” pada Jurnal At-Tarbiyah IAIN Cirebon tahun 2010. Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran Bandung Tresna Bhakti (2016). Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNi, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017).; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (2018).



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201816588, 29 Juni 2018

Pencipta

Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105
Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105
Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis
Judul Ciptaan : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (Studi Di PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Juni 2018, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000110808

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

